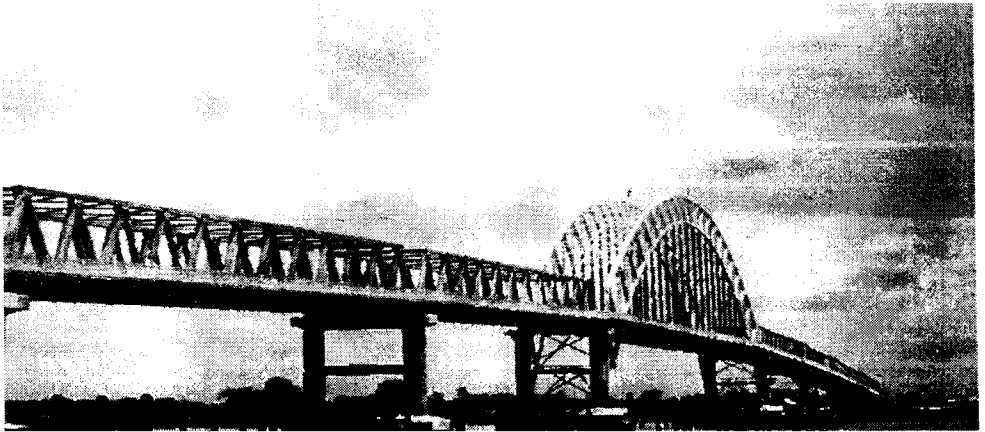


PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
RIAU PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN FISKAL ABDUL MANNAN



SALMIA

NIM: 15913192

TESIS

PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2017

PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU PERSPEKTIF
TEORI KEBIJAKAN FISKAL ABDUL MANNAN



Oleh:

SALMIA

NIM: 15913192

Pembimbing:

Dr. Yusdani, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salmia

NIM : 15913192

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU
PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN FISKAL ABDUL
MANNAN**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

Yogyakarta, 5 Desember 2017

Yang menyatakan,



Salmia



PROGRAM PASCASARJANA
MAJISTER ILMU ACAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU ACAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangrim Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 821517 Fax. 825517

PENGESAHAN

Normis: 1136/PS-MSI/Peng./XII/2017

TESIS berjudul : PEMBRANGAN SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN
INDRAGIRI JOLIR BOAO PERSPEKTIF TEORI
KEBIJAKAN FISKAL ABDUL MANNAN

Ditulis oleh : Salmih

N. I. M. : 15913192

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi,

Yogyakarta, 22 Desember 2017

Ketua

Dr. Hujairah Sunaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp./Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Salmia
Tempat/tgl lahir : Benteng, 20 Juni 1994
N. I. M. : 15913192
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR RIAU PERSPEKTIF TEORI
KEBIJAKAN FISKAL ABDUL MANNAN**

Ketua : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

Sekretaris : Dr. M. Roy Purwanto, MA

Pembimbing : Dr. YUSDANI, M.Ag.

Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM.

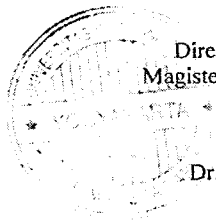
Penguji : Dr. Siti Achiria, SE., MM

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2017

Pukul : 14.00 – 15.00

Hasil : Lulus



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1705/PS-MSI/ND/XII/2017

TESIS berjudul : **PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR RIAU PERSPEKTIF TEORI
KEBIJAKAN FISKAL ABDUL MANNAN**

Ditulis oleh : Salmia

NIM : 15913192

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
Yogyakarta, 8 Desember 2017

Ketua


Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU
PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN FISKAL ABDUL
MANNAN**

Nama : **Salmia**

NIM : **15913192**

Konsentrasi : **Ekonomi Islam**



Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 5 Desember 2017

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Yasdani'.

Dr. Yasdani, M.Ag

PERSEMBAHAN

Mama dan Bapak

Semoga Allah SWT selalu memberikan Kesejahteraan dan Kebahagiaan dalam

Hidup Mu.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

“Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.” (Kaidah ke-26)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Śā'	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	-
ح	Hā'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Żal	z	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Şād	ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Waw	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	y	-

INDONESIA

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis	muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila Ta' Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila Ta' Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

V. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i> تنسي	ditulis Ditulis	Ā Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis Ditulis	Ī Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

I. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au

	قول	ditulis	Qaul
--	-----	---------	------

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Di tulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN FISKAL ABDUL MANNAN

Salmia

NIM: 15913192

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran anggaran di daerah maupun dalam Negara. Kebijakan Fiskal sangatlah penting dalam sebuah daerah, didalam kebijakan fiskal tidak hanya berbicara bagaimana daerah atau Negara mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut untuk membangun kehidupan didaerah, tetapi bagaimana kebijakan fiskal mampu memberikan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam kehidupan Sosial dan ekonomi. Kejayaan Islam dimasa lalu meyakinkan ummat Islam bahwa sistem pembangunan ekonomi yang digunakan bisa bertahan dengan baik dan memiliki sejarah yang terkenal, sehingga dengan menggunakan teori Abdul Mannan yang merupakan tokoh ekonom muslim kontemporer diharapkan kejayaan Negara-negara Islam masa lampau bisa kembali dinikmati oleh muslim yang ada saat ini. Mannan menulis dalam perspektif kebijakan fiskalnya yang berlandaskan Hukum Islam. Inti dari kebijakan fiskal dalam pembangunan ekonomi sosial Mannan adalah Prinsip kebahagiaan (*at-targib*) bagi masyarakat dan meningkatkan ekonomi social, namun tidak meninggalkan pembangunan spiritual dan moral. Sehingga dalam penelitian ini akan di lihat bagaimana Potret Pembangunan Sosial Ekonomi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang mayoritas penduduknya beragama Islam, apakah dalam pelaksanaan kebijakan fiskal daerah Indragiri Hilir telah relevan dengan teori Mannan. Hal ini dapat terjawab ketika peneliti melakukan penelitian di daerah Indragiri Hilir dengan metode wawancara kepada Informan dari Pejabat Pemerintah daerah, Anggota DPRD dan Masyarakat Indragiri Hilir. Adapun hasil yang peneliti temukan adalah potret pembangunan di Indragiri Hilir lebih fokus untuk pembangunan perkebunan karena masyarakat mayoritas petani dan berkebun, sedangkan yang belum relevan terkait birokrasi daerah yang belum kondusif dan pembangunan infrastruktur yang belum merata.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Pembangunan Sosial, Ekonomi, Abdul Mannan, Indragiri Hilir.

ABSTRACT

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDRAGIRI HILIR RIAU PERSPECTIVE OF ABDUL MANNAN'S FISCAL POLICY

Salmia

Student Number: 15913192

Fiscal Policy is a government's policy related to regional and national income and expenditure. This policy is very important in a region because this policy not only discusses how a region or state gets fund and utilizes the fund to develop the region, but also discusses how fiscal policy is able to create development and prosperity for people's socio-economic life. The glory of Islam in the past has also convinced people that the economic development system that was used could survive and had a well-known history, so the theory of Abdul Mannan, who was a contemporary Muslim economist, could be used, expecting that the glory of Islamic countries in the past could be repeated nowadays. Mannan wrote in his fiscal policy perspective based on Islamic law. The core of Mannan's fiscal policy in socio-economic development is the principles of happiness (*at-targib*) for society and socio-economic improvement, as well as spiritual and moral development. Therefore, this study focused on the Situation of Socio-Economic Development of Indragiri Hilir Regency whose majority of the population is Moslem; whether the implementation of fiscal policy in Indragiri Hilir has been relevant to Mannan's theory. Such question could be answered after conducting a research in Indragiri Hilir using interview technique to several informants from Local Government Officials, Members of Parliament and Indragiri Hilir Society. The results showed that the development in Indragiri Hilir focuses more on plantation development because the majority of population works as farmers and gardening. In addition, several things that are not yet relevant are: non conducive regional bureaucracy and uneven infrastructure development.

Keywords: Fiscal Policy, Socio-Economic Development, Abdul Mannan, Indragiri Hilir

December 6, 2017

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Culture Studies
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الانام وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين

Segala puji bagi Allah SWT yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayangnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam taklupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun tesis ini berjudul **“Pembangunan Sosial Ekonomi Di Kabupaten Indragiri Hilir Riau Perspektif Teori Kebijakan Fiskal Abdul Mannan”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan, motivasi, bimbingan, kritik saran, bantuan dan doa dari berbagai pihak, tidak akan penulis dapat menyelesaikan tesis ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsuhnya dalam menyelesaikan tesis ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.
3. Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Hujair AH. Sanaky, M.SI.
4. Sekretaris Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Yusdani, M.Ag sekaligus dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran, kritik, bantuan kepada penulis.
5. Instansi atau Lembaga dan masyarakat daerah tempat penelitian Kantor BAPPEDA, BAPENDA, DPRD, BPS Indragiri Hilir dan masyarakat Indragiri Hilir. Seluruh informan dan narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.

6. Pimpinan Perpustakaan beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan, bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, baik selama kuliah maupun selama penulisan tesis ini.
7. Orang tua tercinta Ibu Saidah, S.Pd.SD dan Bpk Misbaruddin, S.Pd, yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun spiritual. Terima kasih telah memberi semangat memberi motivasi dan dengan do'a kalian membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini. Kedua saudari Ka Hapsa. MIP, dan adik Misda Mulya yang juga selalu memberi motivasi dan seluruh keluarga besar penulis, sanak saudara yang tak henti-hentinya memberikan semangat.
8. Rekan-rekan di Mini Banking UMY yang banyak membantu penulis dalam perkuliahan dan memberikan banyak ilmu teori dan praktik.
9. Semua teman-teman seperjuangan Konsentrasi Ekonomi Islam angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan kebersamaan penulis dalam kegiatan akademik dan non akademik.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



Yogyakarta, 5 Desember 2017

Penulis

UNIVERSITAS
Salmia
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERPIKIR	
A. Kajian Peneliti Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	22
1. Pemikiran Abdul Mannan	23
1.1. Kebijakan Fiskal Mannan	25
1.2. Pembangunan Sosial Ekonomi Mannan	27
2. Kebijakan Fiskal	30
3. Pembangunan Sosial Ekonomi	30
4. Pembangunan Ekonomi Daerah	31
5. Pembangunan Sosial	32
C. Kerangka Berpikir	33
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	35
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	35
C. Informan Penelitian	36
D. Teknik Penentuan Informan	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37

F. Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kondisi Objektif lokasi Penelitian	41
B. Kondisi Pemerintahan dan Sosial Ekonomi di Indragiri Hilir	42
C. Potret Pembangunan Sosial Ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir.....	44
a) Pembangunan dimasa sebelumnya	57
b) Pembangunan dimasa sekarang	59
D. Kesesuaian Kebijakan Fiskal di Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kebijakan Fiskal Abdul Mannan Sebagai Solusi Pembangunan Social Ekonomi di Indragiri Hilir.....	61
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	xxi
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xxviii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	lvi



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Angka Kriminalitas di Kabupaten Inhil, 54
- Tabel 2. Keseuaian Kebijakan Fiskal Inhil dengan Kebijakan Fiskal Abdul Mannan, 65



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Kerangka Berfikir Penelitian, 33
Gambar 2. Ciri Khusus Sistem Ekonomi Islam Mannan, 76



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejayaan Islam dimasa lalu meyakinkan ummat Islam bahwa sistem ekonomi yang digunakan bisa bertahan dengan baik dan memiliki sejarah dunia yang terkenal dimasa itu, hal ini dibuktikan oleh Andalusia. Andalusia yang merupakan salah satu negara Islam yang sering diangkat sebagai model terbaik karena meninggalkan kesan dan warisan yang luar biasa dalam sejarah dunia hingga saat ini. Negara Andalusia juga dianggap besar karena telah membuka pintu kemajuan bagi peradaban Barat, ini merupakan bukti Islam sudah sejak dulu membangun masyarakat untuk menciptakan masyarakat Madani yakni masyarakat yang memiliki peradaban yang baik dari segi lahiriah dan rohaniyah diantaranya adanya kemajuan sosial, kemakmuran ekonomi, pendidikan dan Agama.¹

Perbedaan peradaban Barat yang berkembang saat ini tidak menjunjung nilai-nilai agama dan yang membuat banyak ketimpangan didalam lini kehidupan. Al-Fasi mengatakan bahwa ajara-ajaran Islam merupakan *starting poin* dalam pembangunan ekonomi Eropa, komunikasi Eropa dengan umat Islam pada waktu kebangkitan peradaban muslim telah menyelamatkan mereka dari hegemoni gereja, monopoli-monopoli riba dan resisten terhadap feodalisme sekutu gereja.² Uni Soviet yang dulu merupakan salah satu Negara adikuasa kemudian hancur menjadi negara yang hanya tinggal Nama, hal ini Dikarenakan system pemerintahan dan kebijakan pemerintah yang tidak mengedepankan moral.³ Islam membimbing manusia untuk bisa mendirikan negara dengan kebijakan yang mengedepankan moral dan kesejahteraan bersama.

System ekonomi Islam merupakan solusi untuk menjadikan sebuah Negara bertahan dengan pengelolaan yang baik, apalagi di Indonesia sudah memiliki potensi kekayaan Alam dan potensi-potensi lain yang apabila dikelola dengan baik oleh masyarakat dan terutama pemerintah yang tidak menyalah gunakan kewenangan. Ilmu ekonomi Islam seperti halnya Ilmu ekonomi modern tetapi tidak hanya berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, bahkan Ilmu ekonomi Islam telah mengusahakan keseimbangan yang langgeng antara pendapatan

¹ Khalif Muammar, "Factor kegemilangan Tamadun Islam: Pengajaran dari Masa Lalu". *Hadhari Bil Universitas Kebangsaan Malaysia* (2009), hlm. 2.

² Asmuni Mth. "Konsep Pembangunan Ekonomi Islam". *Al-Mawarid* Edisi X tahun 2003, hlm. 138-139.

³ Ekayanta Ginting, "Kelahiran Uni Soviet", dikutip dari https://www.academia.edu/6428087/Kelahiran_Uni_Soviet, diakses pada hari Senin 3 April 2017 jam 16.56 WIB, hlm. 3.

dan pembelanjaan guna mencapai sasaran keuntungan social yang maksimum.⁴ Pencapaian kesejahteraan dan keuntungan social merupakan perbedaan mendasar. Ilmu ekonomi Islam memiliki keterbatasan tertentu misalnya pengakuan terhadap ke Esaan Tuhan dan nilai moral dalam suatu harta namun lebih luas dari pada Ilmu ekonomi modern karena tidak diperbolehnya memaksakan aktivitas ekonomi yang tidak menghasilkan kesejahteraan.

Konsep ekonomi Islam yang luas namun memiliki batasan tertentu inilah yang menjadi keunggulan ekonomi Islam serta adanya aspek social yang dimiliki, ini merupakan salah satu bukti bahwa Islam sangat mendukung pembangunan social Ekonomi karena aspek social merupakan hal penting dalam ajaran Islam. Dalam dunia modern sosial ekonomi menjadi hal yang sering diperbincangkan namun tidak memiliki solusi yang dapat diterapkan secara baik dengan mengurangi ketimpangan dimasyarakat. Pembangunan fisik suatu daerah Akan berdampak positif bagi sosial ekonomi.⁵ Kenyataannya hingga saat ini sistem ekonomi yang ada di Indonesia bahkan di beberapa negara hanya semakin memperbesar jurang pemisah (*gap*) antara masyarakat yang kaya dan rakyat yang sengsara. Sehingga perlu tinjauan kembali terkait kebijakan pemerintah dalam meningkatkan social dan ekonomi masyarakat.

Pembangunan Sosial ekonomi dalam Islam bukan merupakan konsep yang baru karena dari awal kehadirannya sebagai agama, Islam mengedepankan pembangunan moral, pengetahuan, ekonomi dan kehidupan social yang sesuai dengan nilai-nilai hidup dalam Al-Qura'n, konsep masyarakat madani sendiri menurut penulis merupakan konsep awal Islam dalam mendirikan Negara Islam pertama yakni Madina. Sedangkan menurut Romi Sukma Pembangunan sosial merupakan sebuah proses perubahan sosial yang terencana, dan dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan yang dilakukan saling melengkapi dengan proses pembangunan ekonomi. Konsep pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dimana pendekatan pembangunan sosial lebih berfokus pada peningkatan kemampuan individu, komunitas, dan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan pengentasan masalah kemiskinan.⁶ Pendekatan pembangunan social ekonomi merupakan kewajiban pemerintah yang merupakan tujuan dari kebijakan fiskal.

⁴ M. Abdul Manna, *Islamic Economic Theory and Practice*, alih Bahasa M. Nastangin, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Cet. 1 (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 22.

⁵ Ayu dkk, "Dampak Pembangunan Fisik Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Prorinsi Sulawesi Tenggara", *Social Science Journal Vol 1*, No 1 (2013), hlm. 3.

⁶ Romi Sukma, "Strategi Pembangunan Sosial: Upaya Pengentasan Masalah Kemiskinan", dikutip dari <http://www.sumbangprov.go.id/details/news/6010>, di akses pada Sabtu 8 April 2017 jam 12.30 WIB.

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara atau daerah melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.⁷ Pentingnya kebijakan fiskal dalam suatu Negara akan menentukan bagaimana perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di Negara tersebut. Ketika kebijakan fiskal dibuat dan diterapkan pada saat pendapatan tinggi, tetapi pengeluaran tidak maksimal dan tidak membuahkan hasil ataupun tidak mencapai visi misi pemerintah dalam suatu Negara atau daerah maka Kebijakan Fiskal tersebut dianggap gagal, begitupun jika tidak ada Kebijakan dalam pendapatan maka Negara tidak akan maksimal mendapatkan sumber dana.

Kebijakan fiskal di Negara yang tidak menerapkan prinsip Islam sekalipun juga memiliki tujuan antara lain: untuk meningkatkan laju investasi, mendorong investasi optimal secara social, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak-stabilan internasional, menanggulangi inflasi, dan meningkatkan sekaligus mendistribusikan pendapatan nasional. Kebijakan Fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, jika kebijakan moneter mengatur lalu lintas peredaran uang, sedangkan kebijakan fiskal lebih fokus dalam mengarahkan Dana pemasukan dan pengeluaran (pungutan pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal memiliki instrument dalam mengarahkan pengeluaran dan pajak (pendapatan). Kebijakan fiskal merupakan jalannya perekonomian untuk menuju ke keadaan yang diinginkannya.⁸ Instrument dalam mengarahkan pendapatan dan pengeluaran antara lain, pendapatan: Pajak, non pajak, APBD/APBN sedangkan Pengeluaran terdiri dari: pembangunan infrastruktur, pembukaan lapangan pekerjaan, pembayaran gaji pegawai negeri polri dan TNI, pembangunan pendidikan, dll.

Konsep kebijakan fiskal menggunakan teori Abdul Mannan merupakan suatu usaha mengembalikan ummat Islam pada fitrahnya, yakni penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang notabennya ummat Islam terbesar di dunia. Diharapkan adanya gagasan penerapan kebijakan fiskal akan berdampak baik pada ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Konsep '*Umran Bashari* (pembangunan manusia) seperti yang diutarakan oleh Ibn Khaldun (2004) menekankan pembangunan yang menyeluruh sehingga menghasilkan kehidupan manusia yang seimbang.⁹ Dalam Islam pembangunan manusia merupakan awal yang baik sebelum melahirkan masyarakat

⁷ Haris Hermansyah. "Kebijakan Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Nasional", dikutip dari http://harishermansyah84.blogspot.co.id/2015/04/makalah-pengaruh-kebijakan-fiskal_28.html, diakses 12 Maret 2017 jam 14.25 WIB.

⁸ Tanpa nama. "10 Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomia", dikutip dari dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/perpajakan/peran-kebijakan-fiskal, diakses pada hari Selasa 4 April 2017 jam 15.30 WIB.

⁹ Khalif Muammar, "Factor kegemilangan Tamadun Islam: Pengajaran dari Masa Lalu", *Hadhari Bil Universitas Kebangsaan Malaysia* (2009), hlm. 18.

Madani, manusia tidak hanya dilihat dari sudut kebendaan dan ekonomi semata-mata tetapi sebagai makhluk Allah yang dianugerahkan roh dan akal. Pembangunan manusia seutuhnya meliputi pembangunan fisik (kesehatan masyarakat, ekonomi dan Infrastruktur), rohani (akhlak, etika masyarakat dan pemimpin serta meninggikan nilai keTuhanan) dan intelektual yang merupakan bagian dari mengembangkan Akal manusia.

Adanya otonomi daerah membuka peluang pengembangan kreatifitas pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam membuat dan memperbaiki kebijakan serta sistem ekonomi dan social di suatu wilayah. Salah satu bagian dari kebijakan otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal Dana dari APBN untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktifitas perekonomian masyarakat.¹⁰ Sebagaimana tujuan desentralisasi fiskal seharusnya kebijakan tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah, kenyataannya kadang kala kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah daerah hanya untuk mendukung kepentingan para pengambil keputusan, pengusaha dan merugikan masyarakat secara umum. Hal ini yang mengakibatkan perekonomian daerah meningkat sedangkan kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan. Karena dampak dari tumbuhnya perekonomian hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.

Menurut Joko Tri Haryanto justru dari pola inilah yang menjadikan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia semakin bergantung kepada Pemerintah Pusat, munculnya praktek dinasti penguasa di daerah serta maraknya perilaku korupsi para pejabat publik. Idiom yang muncul kemudian desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tak lain hanya memindahkan eksternalitas negatif dari Pemerintah Pusat di era Orde Baru menuju Pemerintah Daerah (Pemda) di era reformasi ini.¹¹ Padahal seharusnya adanya kebijakan fiskal dan otonomi daerah memberikan peningkatan pembangunan kesejahteraan untuk masyarakat daerah serta mengakomodir semua kebutuhan masyarakat daerah.

Teori Abdul Mananan di harapkan dapat menjadi Barometer untuk mencapai kesejahteraan, distribusi kemakmuran dan kebahagiaan yang merata bagi masyarakat yang sesuai konsep Islam yang diadopsi oleh Abdul Mannan. Teori Abdul Mannan juga banyak memaparkan terkait solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan ekonomi Islam, untuk memberikan batasan kewajiban dan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan pemerintah daerah. Ada beberapa konsep

¹⁰ Pramono Hariadi, "Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah" *Trikonomika* Volume 9, No. 2, Desember 2010. Hlm: 72.

¹¹ Joko Tri Haryanto, "Desentralisasi Fiskal Seutuhnya", pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, hlm. 1-2.

yang ditawarkan dalam ekonomi Islam pemikiran Abdul Mannan yakni teori konsumsi, produksi, distribusi dan paling banyak dikaji atas pemikirannya yakni kebijakan fiskal yang sangat urgen dalam suatu kajian di sebuah Negara ataupun daerah. Alasan penulis menggunakan teori kebijakan Fiskal Mannan dalam melihat suatu pembangunan social ekonomi karena Mannan sendiri merupakan tokoh pemikir Islam kontemporer yang sukses memberikan sumbangsi pemikiran terkait bank syariah di dunia dengan menghilangkan bunga dan merubah paradigma ekonomi.

Ide Mannan tersebut pada akhirnya juga mengilhami pendirian bank-bank syariah yang saat ini menjamur di dunia, termasuk di Indonesia.¹² Sehingga sangat layak mengangkat perspektif kebijakan fiskal Mannan melihat kesuksesannya atas ide pendirian Bank syariah didunia yang menjadi solusi bagi banyak kalangan khususnya kaum Muslim dan membantu sistem keuangan umat Islam. Diharapkan dengan pengembangan kebijakan Fiskal Mannan akan berdampak semakin baiknya sistem ekonomi yang ada saat ini di Negara-negara Islam maupun negara dengan jumlah muslim yang cukup banyak.

Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai system tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat materi maupun imateri. Termasuk dalam ekonomi, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Sistem dalam Islam dapat digunakan oleh manusia sebagai panduan dalam menjalankan kegiatan ekonomi, Sistem ekonomi dan kebijakan fiskal sudah ada sejak Rasulullah menjadi pemimpin dalam suatu Negara dan dikembangkan oleh Khulafaurasyidin, yakni pembangunan Infrastruktur berupa masjid dan baitull mal, serta adanya departemen Jaminan social untuk yatim-piatu dan janda istri mujahid dimasa itu.¹³ Adapun pemikir Islam yakni Abdul Mannan telah memaparkan hampir seluruh aspek ekonomi Islam secara utuh dan rinci dengan mengikutu Al-Qur'an dan Sunnah mencontoh system Rasul.

Mannan benar-benar ingin membangun sebuah peradaban ummat Islam dengan ilmu ekonomi Islam mulai dari kerangka paradigma teorinya, aspek individu, kelembagaan sampai ke tingkat negara. Untuk alasan tersebut penulis beranggapan bahwa penerapan teori kebijakan fiskal bisa menjadi pintu awal gerakan pertumbuhan sosial ekonomi disuatu daerah dengan melibatkan semua stakeholder, yakni masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Pembangunan sosial ekonomi menggunakan perspektif kebijakan fiskal Mannan diharapkan dapat menjadi solusi

¹² Fahrur Ulum, "Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan", *Al-Qānūn*, Vol. 12, No. 2, Desember 2009, hlm. 455.

¹³ Adiwarmanto Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi ke 3*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm: 62.

perekonomian ummat Islam yang arah dan kebijakannya masih terombang-ambing, diskriminasi ekonomi dan ketimpangan social terjadi dimana-mana konglomerasi menysikan banyak kemiskinan yang terisolir, masalah kesejahteraan semakin sulit dipecahkan.

Kebijakan fiskal Mannan yang diadaptasi dari Sistem Ekonomi Islam seharusnya mampu menyelesaikan masalah Ekonomi daerah di Indonesia karena sebagian besar masyarakatnya adalah ummat Islam, begitupun dengan pemerintahan yang banyak dijalanakna oleh pemerintah yang *notabennya* Muslim, hal ini juga karena konteks Mannan dianggap relevan bagi masyarakat Indonesia. Seharusnya kebijakan yang dibuat banyak menguntungkan ummat Islam karena Islam *Rahmatan Lil Alamin*. Solusi untutuk meningkatkan pembangunan social dan ekonomi masyarakat yakni produktifitas sebagai mana kesimpulan dari penelitian Sukotjo yang ditulis dalam jurnalnya.¹⁴ Bahwa masyarakat akan produktif jika pemerintah memberikan akses untuk melakukan kegiatan produksi, baik itu lapangan kerja, permodalan dan akses infrastruktur daerah. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana kebijakan pemerintah daerah menyediakan ruang dalam pembangunan social ekonomi.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletaak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada kekhasan daerah menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber fisik secara local.¹⁵ Apabila pembangunan infrastruktur terus terhambat karena alasan dana maka akan memperlambat peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat sekitar, sehingga perlu adanya langkah untuk mengatasi permasalahan yang terus-menerus terjadi. Pemerintah juga mulai melakukan reformat pembiayan lain yang sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mendanai pembangunan Infrastruktur dan kesejahteraan di Indonesia tersebut dengan Sukuk, dan juga obligasi syariah yang telah banyak digunakan oleh Negara-negara lain untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti Malaysia, Bahrain dan Turki.¹⁶

Peneliti kemudian melihat bahwa permasalahan pembangunan Infrastruktur yang sering terhambat dan cendrung lambat penaganannya terjadi di daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau fakta ini didapatkan dari beberapa kecamatan dan desa yang mengalami kerusakan jalan serta minimnya perbaikan infrastruktur dan

¹⁴ Sukotjo, "Produktivitas Suatu Faktor Penentu Bagi Pembangunan Sosial Dan Ekonomi" Majalah Ilmiah Ekonomika Volume 12 Nomor 3, Agustus 2009, hlm: 157.

¹⁵ Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm. 108.

¹⁶ Septian Hario Seto. "*Menggagas Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Melalui Obligasi Syariah*", hal. 59.

pasokan listrik, padahal potensi pertanian dan perkebunan di daerah ini cukup mumpuni yang seharusnya mendukung ekonomi daerah. Terbukti dengan potensi kabupaten ini salah satunya penghasil kelapa unggulan, hamparan perkebunan kelapa di Inhil ada 432 ribu hektar baik itu kelapa dalam dan hibrida.¹⁷ Belum lagi potensi unggulan lainnya, yang menjadi pertanyaan dalam diri peneliti apakah potensi yang dimiliki belum mampu menutupi pembangunan social ekonomi yang menurut hemat peneliti belum sebaik distribusi di daerah lain yang mana sudah berinovasi secara aktif dalam pembangunan daerah, padahal pembangunan social ekonomi daerah dapat menghasilkan output untuk kebaikan daerah dan masyarakat.

Sosial ekonomi umat di Indonesia harus terus di asah untuk menciptakan kesejahteraan bersama karena diketahui bahwa umat yang hidup dalam kefakiran sangat dekat dengan kekufuran, sehingga setiap umat atau individu memiliki kewajiban untuk tolong menolong dalam kebaikan. Didalam Islam sendiri setiap muslim memiliki kewajiban untuk menafkahi muslim lain dengan adanya zakat, sedekah, infak dan wakaf. Karena kemiskinan yang terjadi di sebuah negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga tanggung jawab masyarakat. Hasil dari penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa rasa percaya merupakan salah satu yang meningkatkan modal sosial di wilayah maju, modal sosial juga memiliki keterkaitan yang nyata dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga.¹⁸

Pembangunan sosial ekonomi adalah proses mengubah struktur ekonomi yang belum berkembang dengan jalan *capital investment* dan *human investment* yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk atau *income per capita* naik.¹⁹ Pembangunan Infrastruktur juga merupakan *capital investment* yang mana dapat meningkatkan ekonomi suatu daerah. Sedangkan pemberian pembiayaan atau subsidi ke masyarakat petani dapat menjadi *human investment* untuk meningkatkan kualitas kinerja dan hasil produksi pertanian. Dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dapat dilaksanakan dengan tindakan pengaturan wajib dan sukarela yang Islami berisi dua belas rumusan. Karena manusia memiliki banyak kebutuhan, dibutuhkan ilmu ekonomi untuk merealisasikan secara Islami. Hal ini

¹⁷ "Bupati Inhil 'Wardan' Paparkan Keunggulan Pertanian Kelapa Dihadapan Komisi B DPRD Riau 2015". dikutip dari <http://detakriau.com/read-5049-bupati-inhil-wardan-paparkan-keunggulan-pertanian-kelapa-dihadapan-komisi-b-dprd-riau-.html> di akses hari Senin 10 April 2017 jam 20.20 WIB.

¹⁸ Nyoman Utari Viprianti, "Studi Sosial Ekonomi Tentang Keterkaitan antara Modal Sosial dan pembangunan Ekonomi wilayah studi kasus di Empat Kabupaten di Provinsi Bali" *Thesis*, Bogor: Sekolah Pasca Sarjana IPB. Tanpa tahun, hlm. 3.

¹⁹ Hasibuan dalam Wiranto Bagus Suryono, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah", Tanpa No, Tanpa Tahun, Hal. 2.

menunjukkan bahwa kepuasan manusia tidak hanya diukur dari materi saja tetapi ada berbagai hal yang mereka butuhkan dalam melangsungkan kehidupannya.²⁰

Pemberian modal bagi individu yang dianggap memiliki kecakapan dan amanah merupakan *capital investment* ataupun dalam suatu usaha menyertakan modal bagian dari *capital investment*. Umer Chapra mengatakan, "bahwa tujuan keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan merata dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan terhadap komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan". Kurangnya pemahaman dasar-dasar pengetahuan agama Islam yang benar serta tidak meratanya informasi akan permasalahan ini menjadikan manusia melakukan transaksi jual beli yang ada tanpa melihat nilai yang ada pada transaksi tersebut.

Pembangunan sosial ekonomi harus terus dilakukan terutama untuk mendapatkan informasi dan rumusan bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi untuk individu maupun meningkatkan ekonomi dalam hal yang lebih luas. Rumusan kebijakan fiskal Abdul Mannan menjadi rujukan peneliti untuk pertanyaan terkait bagaimana pemerintah daerah menerapkan kebijakan fiskal untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi di kabupaten Indragiri Hilir, serta untuk melihat program apa yang menjadikan peningkatan ekonomi masyarakat sebagai gambaran sejauh mana penerapan kebijakan fiskal di kabupaten tersebut.

Fungsi dari kebijakan fiskal antara lain;²¹ 1) mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat berupa *Public goods* seperti jalan, jembatan, pendidikan dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, 2) fungsi Stabilisasi, agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai, 3) Fungsi Distribusi, yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan merata bagi masyarakat. Fungsi kebijakan fiskal ini kemudian disandingkan dengan materi ekonomi Islam yang lebih spesifik untuk menemukan *wind-wind solution* meningkatkan ekonomi ummat dan pemerataan kesejahteraan dalam suatu daerah.

Kajian ekonomi Islam solusi terhadap kebijakan fiskal dalam suatu daerah masih sangat jarang dikaji untuk itu dalam lingkup yang masih sederhana penulis

²⁰ Taufik, "Manusia dalam pandangan ekonomi Islam," dikutip dari <http://taufikopini.blogspot.co.id/2011/01/manusia-dalam-pandangan-ekonomi-islam.html>, pada Selasa 4 April 2017 jam 17.30 WIB.

²¹ Ady Supriadi, "Keterkaitan antara kebijakan fiskal dengan Pengeluaran Pemerintah", Dikutip dari <http://www.skokul.com/1780/keterkaitan-antara-kebijakan-fiskal-dengan-pengeluaran-pemerintah/>, diakses pada Sabtu tanggal 2 Desember 2017.

ingin melihat pengaplikasian kebijakan fiskal dari teori Mannan yang berlandas kesejahteraan untuk ummat dengan pendekatan sistem ekonomi Islam bagian mana saja yang sudah diterapkan di Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Terkait kebijakan apa saja yang menurut Mannan dalam penerapan kebijakan fiskal yang masih banyak menguntungkan para pembuat kebijakan dan masih merugikan masyarakat. Teori Mannan bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk dari kebijakan fiskal yang diambil tanpa pertimbangan Agama, moral dan hal-hal mendasar dalam ekonomi dan Islam.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis mencoba untuk menganalisa lebih lanjut kriteria kebijakan fiskal yang layak untuk diterapkan menggunakan teori Abdul Mannan dan sejauh mana kesesuaiannya, sehingga diharapkan tercipta peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi di dalam suatu daerah dan melibatkan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat lokal dan pihak swasta untuk bersinergi menciptakan masyarakat bahagia atau madani sebagaimana teori Mannan serta daerah yang sejahtera dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatan ekonomi dan kebijakan pemerintah pro masyarakat luas. Potret daerah Indragiri Hilir bertujuan sebagai bahan analisis Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *"Pembangunan Sosial Ekonomi Di Kabupaten Indragiri Hilir Riau Perspektif Teori Kebijakan Fiskal Abdul Mannan."*

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Supaya penelitian ini lebih terarah dan untuk memfokuskan permasalahan agar lebih tepat sasaran maka peneliti membatasi pembahasan mengenai Kesesuaian Kebijakan Fiskal Daerah Dengan Kebijakan Fiskal Abdul Manan Dilihat Dari Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah di Indragiri Hilir Riau. Sehingga peneliti dapat mengemukakan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Potret Pembangunan Sosial Ekonomi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana Kesesuaian Kebijakan Fiskal di Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kebijakan Fiskal Abdul Mannan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a) Mengetahui Potret Pembangunan Sosial Ekonomi dari kebijakan Fiskal Pemerintah di Kabupaten Indragiri Hilir.
- b) Menganalisis Kesesuaian Kebijakan Fiskal Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kebijakan Fiskal Abdul Mannan.

2. Manfaat Penelitian

- a) **Manfaat Teoritis**

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Ekonomi, dan Teori Kebijakan Fiskal yang sesuai dengan Ekonomi Islam.
- 2) Memaparkan Teori pemikiran Abdul Mannan Terkait konsep Kebijakan Fiskal yang tepat untuk diterapkan dalam Pembangunan sosial ekonomi.

b) Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan pembangunan social ekonomi di daerah dengan konsep Ekonomi Islam.
- 2) Penelitian ini sebagai referensi bagi Pemerintah daerah agar menyiapkan Kebijakan Fiskal yang dapat Menjadi Solusi Pembangunan Sosial dan Ekonomi daerah.
- 3) Penelitian ini juga sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah.

D. Sistematika Pembahasan

1. BAB I, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

- Latar Belakang Masalah merupakan alasan pemaparan masalah kenapa kemudahan peneliti ingin mengambil masalah penelitian tersebut, memaparkan kelebihan dalam penggunaan teori yang diambil dan disesuaikan dengan permasalahan kebijakan yang terjadi di setiap daerah untuk dijadikan sebagai solusi pengembangan potensi daerah dalam mencapai Pembangunan social ekonomi dan menciptakan kebijakan fiskal yang kondusif dan mementingkan kebahagiaan masyarakat secara luas, karena Islam merupakan system ekonomi dan politik yang paling ideal untuk diterapkan dimanapun dan kapan pun. Sehingga teori dari salah satu tokoh pemikir Islam dijadikan acuan dalam mengatasi masalah.
- Rumusan Masalah, merupakan pengkerucutan dari permasalahan yang dilihat dan ingin dirumuskan untuk menghasilkan suatu jawaban, yang mana jawaban Akan terpapar secara jelas dalam penelitian yang akan di lakukan.
- Tujuan Penelitian, pencapaian yang Akan diperoleh dari hasil perumusan masalah terkait pembanguan social ekonomi dalam teori kebijakan fiskal.
- Manfaat Penelitian, dari penelitian ini harus ada manfaat untuk kedepannya setelah dilakukan penelitian, sehingga penerapan penelitian untuk mencapai kebijakan fiskal yang memberi kontribusi besar bagi pembangunan social ekonomi dalam suatu daerah.

2. BAB II

- Kajian Penelitian Terdahulu, yakni merupakan suatu gambaran dan literature review untuk mengarahkan penelitian yang akan di lakukan terkait kebijakan fiskal, dan pembangunan social ekonomi, karena penelitian yang akan dilakukan merupakan penerapan kebijakan Fiskal Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah diharapkan dapat diterima dan menjadi solusi dalam penetapan kebijakan fiskal daerah atau bahkan Negara.
- Landasan Teori, untuk memperkuat suatu penelitian dan memberikan acuan dalam penelitian terkait kebijakan fiskal sehingga dalam landasan teori sangat banyak memasukkan pemikiran ekonom Islam terutama pemikiran Abdul Mannan dan tokoh-tokoh Islam lainnya yang mengacu pada teori kebijakan fiskal dan social ekonomi serta kesejahteraan.
- Kerangka Berfikir akan mengarahkan pola pemikiran yang akan dicapai dan arahan alur dalam penelitian.

3. BAB III

- Metode Penelitian, merupakan tata cara yang akan penelitian lakukan terkait pengumpulan informasi dan pengolahan hasil data yang nanti didapatkan, kemudian dianalisis untuk mengetahui hasil dari penelitian.

4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

- Konsep kebijakan fiskal Abdul mannan akan dipaparkan secara mendalam dan dikaitkan dengan konteks kekinian juga di analisis untuk melihat ada tidaknya nilai-nilai dari teori Mannan yang sudah diterapkan di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Konsep pembangunan social di Kabupaten Indragiri Hilir, dalam penyelenggaraan daerah ada kebijakan yang dibuat dan telah dilaksanakan dalam daerah, apakah pelaksanaannya sudah mengacu kepada pembangunan social ekonomi masyarakat di daerah Kabupaten Indragiri Hilir
- Kesesuaian Kebijakan Fiskal Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kebijakan Fiskal Abdul Mannan, dari hasil analisa dan wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti akan merumuskan bagian-bagian apa saja dari program pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir Riau yang sudah sesuai dengan kebijakan fiskal teori Abdul Mannan dan apa saja dampak dari kebijakan yang mengarah pada pembangunan sosial ini.

5. BAB V: PENUTUP DAN KESIMPULAN

Merupakan kesimpulan dari pembahasan dan alasan dari semua jawaban dirumasan masalah dipaparkan secara singkat untuk memudahkan pembaca.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam jurnal *Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedar Naqvi)* dalam jurnal ini membahas mengenai bagaimana Mannan dan Haedir Naqvi membangun teori dan sistem ekonomi Islam dan bagaimana perbedaan pandangan mengenai penafsiran sistem ekonomi Islam. Pemikiran kedua tokoh kontemporer ekonomi Islam ini memiliki keunikan yakni memiliki pendekatan yang lebih inovatif. Mannan juga menegaskan bahwa Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang berazaskan norma dan nilai-nilai dasar Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia, bukan sebagai Individu yang terisolasi, tetapi mengenai individu sosial yang meyakini nilai-nilai hidup Islam. Langkah operasional yang dirumuskan Mannan yakni Melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau atas target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan dalam seluruh kerangka yang ditetapkan pada langkah kedua maupun dalam dua pengertian pengembalian (*return*), yaitu pengembalian ekonomi dan non-ekonomi, membuat pertimbangan-pertimbangan positif dan *normative* menjadi *relative* tidak berbeda. Mannan sangat banyak membicarakan tentang kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat umum yakni dalam kategori kebijakan pemerintah, oleh karena itu peneliti menjadikan jurnal ini sebagai rujukan utama untuk melihat apa saja rumusan kebijakan fiskal yang disarankan Abdul Mannan dan dapat mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Pemikiran Ekonomi Abdul Mannan dalam website resmi Jumal Ahmad, Abdul Manan ketika menjelaskan pengertian ekonomi Islam menyebutkan "*Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of islam*". Dimana menurut beliau ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Mannan berpendapat bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dalam masalah produksi harus diselesaikan dan dipastikan status hukumnya. Beberapa masalah yang pokok yang berkaitan dengan faktor produksi yang harus tuntas penyelesaiannya adalah menyangkut: sistem penguasaan tanah dalam, kebijakan tentang kependudukan dan hubungan industrial. Ketiga hal itu dianggap penting dan menentukan dalam kaitannya dengan produksi

¹ Yusup Asdar, "Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedar Naqvi", Desember 2014, Vol. 11, No. 2, hlm. 234.

dalam ekonomi Islam, sedangkan kapitalisme maupun sosialisme telah dianggap gagal dalam menyelesaikan persoalan itu. Dalam persoalan pemerataan ekonomi, sejumlah paket kebijakan operasional yang diharapkan mempunyai implikasi berjangka penjang guna mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dapat direncanakan dengan melaksanakan tindakan pengaturan wajib dan sukarela yang secara Islami dibenarkan.²

Jurnal International di tulis oleh F.R. Faridi yang berjudul *Theory of Fiscal Policy in an Islamic State*, dalam jurnal ini memberikan pengetahuan bahwa Perilaku sistem ekonomi Islam di masa lalu telah diambil sebagai proyeksi teoritis di masa depan atau masa sekarang. Unsur-unsur utama dari teori System ekonomi Islam ini dapat diringkas sebagai berikut: yaitu sektor swasta dengan keuntungan, sektor sukarela dan sektor publik. Tiga sektor tersebut bekerja sama memberikan kerangka kelembagaan dari Ekonomi Islam. Zakat merupakan instrument kebijakan fiskal yang masih minimum dan masih di upayakan maksimal untuk mengubah situasi kemiskinan dan ketimpangan social yang terjadi. Jurnal ini dijadikan *Literatur Review* karena membahas mengenai teori kebijakan fiskal di Negara Islam, perbedaan penelitian dengan jurnal ini untuk mengkonfirmasi ke daerah terkait kebijakan fiskal yang sudah dijalankan daerah apakah memiliki kesamaan dengan tujuan kebijakan fiskal Islam yang dalam perspektif kebijakan fiskal Abdul Mannan.

Jurnal *Kebijakan Fiskal Negara Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam* yang ditulis oleh Supangat memaparkan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam bersifat lentur dan terbuka terhadap ijtihad. Nash-nash terkait dengan kebijakan fiskal tidak terlepas dari keadaan sosio-historis masyarakat Islam awal. Beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah merupakan reformulasi pajak yang diterapkan pada masa awal Islam. Dengan demikian, sistem kebijakan fiskal Negara Indonesia selama ini masih dalam koridor syari'ah. Hanya saja, implementasi sistem tersebut masih jauh dari yang diharapkan, jika tidak dikatakan bertolak belakang.⁴ Persamaannya jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan mencari kesesuaian kebijakan fiskal dengan kebijakan fiskal Islam, perbedaannya perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil ide dan gagasan Abdul Mannan. Pencapaian jurnal ini untuk menjadikan zakat sebagai salah satu instrument fiskal

² Jumal Ahmad, "Pemikiran Ekonomi Abdul Mannan". Dikutip dari <https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2014/02/19/pemikiran-ekonomi-abdul-mannan/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 jam 13.00 WIB.

³ F.R. Faridi, "Theory of Fiscal Policy in an Islamic State", *J. Res. Islamic Econ.*, Vol. 1, No. 1, hlm: 20-25.

⁴ Supangat, "Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Economica*, volume IV/ Edisi 2/ November 2013. IAIN Walisongo: Semarang, hlm. 104-105.

di Indonesia sedangkan peneliti ingin melihat sejauh mana pengaruh kebijakan fiskal terhadap peningkatan social masyarakat.

Tulisan Fahrul Ulum dalam jurnal yang berjudul *Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan*, hasil dari penelitian kualitatif ini merumuskan bagaimana pemikiran Mannan terkait kesejahteraan masyarakat dan merumuskan hal-hal yang harus dilakukan masyarakat, swasta dan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dengan kepemilikan yang beradil dan taat aturan serta bermoral, prodksi dan distribusi yang harus sesuai dengan sumber hukum dan berkeadilan. Mannan banyak merumuskan perkembangan Ilmu Ekonomi dari segi Teori dan menolak pendapat pemikir marxis dan kaum neo klasik positivis.⁵ Persamaan penelitian yang akan di lakukan dengan jurnal ini yakni pembahasan mengenai kebijakan dan pemikiran abdul mannan terkait Kebijakan Fiskal yakni lebih spesifik mengenai bagaimana cara kesejahteraan masyarakat umum didalam suatu daerah atau negara. Jurnal ini memaparkan semua Teori/ pemikiran Abdul Mannan, sedangkan penulis hanya pemikiran Abdul Mannan terkait kebijakan Fiskal dan membandingkan dengan kebijakan Fiskal di daerah.

Jurnal yang ditulis oleh Aan Jaelani (2012) *Pengelolaan APBN Dan Politik Anggaran Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.⁶ Dalam jurnal tersebut membahas mengenai fungsi dari dana APBN untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat namun kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk APBN justru berlawanan arah dengan peran pemerintah yang semestinya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Menggunakan perspektif ekonomi Islam karena peneliti mengetahui bagaimana tata kelola kenegaraan yang baik saat Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara saat itu. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, sejak masa Nabi Muhammad dan masa-masa berikutnya, pengelolaan keuangan negara dalam wujudnya sekarang ini berupa APBN, telah memiliki mekanisme dan pengelolaan yang bersifat khas sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya. Karena itu, APBN digunakan untuk kepentingan pembangunan dan politik anggaran yang memiliki komitmen dalam membela kepentingan masyarakat. Sedangkan system kapitalis dan sosialis masih memperdebatkan keikutsertaan pemerintah, menganggap pemerintah tidak perlu ikut campur dalam perekonomian kecuali terkait dengan aturan-aturan yang tidak ditentukan oleh setiap individu. Kesamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni mencari rumusan yang tepat untuk permasalahan kebijakan yang terjadi sehingga jurnal ini dijadikan salah satu literature review.

⁵ Fahrul Ulum, "Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan". *Al-Qamun*. Vol. 12, No. 2, Desember 2009.

⁶ Aan Jaelani, "Pengelolaan APBN Dan Politik Anggaran Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal *MPRA* 2012. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Jurnal *Kebijakan Fiskal dalam Islam* ditulis oleh Lilik Rahmawati Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengakui kebebasan manusia atas nilai-nilai tauhid, hak memiliki harta atas dasar kemaslahatan, melarang penumpukan harta, serta distribusi kekayaan justru yang sesuai dengan sifat dasar dan kebutuhan manusia. Negara Islam sangat signifikan dalam menjamin kesejahteraan dan kebutuhan rakyatnya, negara akan melakukan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut dinamakan kebijakan fiskal, yakni merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Tegaknya suatu Negara bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat, sehingga keuangan publik yang dipraktekkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Kebijakan fiskal dalam Islam bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil karena kebijakan fiskal dalam Islam merupakan kewajiban oleh pemerintah dan hak masyarakat. Karya al-Kharaj yang ditulis Abu Yusuf berusaha menganalisis masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diasopsi untuk kesejahteraan rakyat.⁷ Dalam penelitian ini membandingkan system perpajakan dan kebijakan fiskal Negara Indonesia dan kebijakan fiskal Islam di Zaman Rasulullah dan sahabat.

Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia ditulis oleh Asmak Ab Rahman, wakaf dalam konteks pembangunan ekonomi adanya fatwa berwakaf dalam bentuk uang tunai, hal ini masyarakat Islam di Malaysia dapat berwakaf dengan tunai tanpa rasa ragu-ragu lagi juga dengan mewakafkan saham. Perwakafan yang dibuat adalah dalam bentuk pembelian saham-saham wakaf yang diterbitkan oleh Majlis-Majlis Agama Islam Negeri, institusi tertentu dan juga mewakafkan uang dalam bentuk penyertaan takaful wakaf. Secara khususnya bahagian wakaf setiap daerah memiliki fungsi untuk melakukan pergerakan ekonomi bagi masyarakat. Harta-harta wakaf kontemporari yang diperkenalkan seperti wakaf saham, saham wakaf, wakaf tunai dan takaful wakaf merupakan satu bentuk perwakafan yang di luar kebiasaan amalan masyarakat Muslim, dana wakaf dibuat dalam bentuk pembangunan harta, pembangunan tanah wakaf disediakan untuk aktivitas pembangunan sosio ekonomi yang dirancang dari masa ke semasa bagi kebajikan pembangunan ekonomi ummah dan kepentingan agama Islam kerana Allah SWT, selama-lamanya. Apabila masyarakat mendapat kemudahan menerima Dana kesehatan, pendidikan dan pelatihan skill, maka dari sudut kemanusiaan mereka juga telah membangun, karena apabila mereka sehat dan

⁷ Lilik Rahmawati, "Kebijakan Fiskal dalam Islam". *Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 2, Desember 2008. IAIN Sunan Ampel: Surabaya.

terdidik serta mempunyai keahlian, Akan membuka peluang untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga mereka. Pembangunan ekonomi tidak sekadar diukur dari pembangunan bersifat fiskal, tetapi secara mendasar pembangunan insan juga merupakan sebahagian dari pada keperluan dalam pembangunan ekonomi.⁸

Peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Daerah jurnal yang ditulis oleh Syafi'i Antonio & Aam S. Rusydiana, paradigma pembangunan yang tidak menyerahkan sepenuhnya pertumbuhan ekonomi pada peran pengusaha-pengusaha besar, melainkan pada semua pihak terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan adanya Otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan Akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi sumbangan ekonomi syariah bagi ekonomi nasional Pertama, ekonomi syariah memberikan andil bagi perkembangan sektor riil. Kedua, ekonomi syariah lewat industri keuangan syariah turut andil dalam menarik investasi luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-negara Timur-Tengah. Ketiga, gerakan ekonomi syariah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di masyarakat Indonesia. Implikasi Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah, semakin banyaknya bank-bank syariah nasional yang membuka cabang di daerah-daerah sehingga membawa implikasi bagi pembangunan ekonomi setempat karena adanya aktivitas intermediasi yang dilakukan perbankan syariah. Mengajarkan kewirausahaan dan investasi yang etis kepada masyarakat. Pemerintah Daerah harus dapat mendaya gunakan potensi sumber daya daerah secara optimal.⁹ Berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat sehingga daerah dituntut mampu meningkatkan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah, melaksanakan reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah, melaksanakan perencanaan strategik secara benar, sehingga akan memacu terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, yang dapat memperkokoh basis perekonomian daerah.

Jurnal *Flypaper Effect Theory Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal*, yang ditulis oleh Suyanto (2010) membahas mengenai Dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk pembangunan daerah Pemerintah daerah dalam menerima transfer/hibah dipergunakan untuk meningkatkan

⁸ Asmak Ab Rahman. "Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia". *Shariah Journal*, Vol. 17, No. 1 (2009) 113-152. Academy of Islamic Studies, University of Malaya.

⁹ Syafi'i Antonio & Aam S. "Peranan Ekonomi Syari'ah dalam Pembangunan Daerah". *HARMONI, Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. IX, No. 33 Januari - Maret 2010, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Tazkiya Bogor.

pengeluarannya tanpa harus meningkatkan pajak daerah. Bantuan dana pemerintah pusat seharusnya dapat meningkatkan pendapatan pemerintah atau masyarakat local, jika tidak memberikan pengaruh yang sama besarnya maka hal inilah yang disebut *flypaper effect*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dana desentralisasi membuat daerah otonom semakin tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluarannya, Pengelolaan dana-dana desentralisasi sebagai sumber utama pembiayaan APBD perlu dilakukan lebih efisien dan efektif agar pengeluaran APBD betul-betul menyentuh pada kebutuhan masyarakat lokal sesuai preferensi yang dibutuhkan, terutama layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur.¹⁰ Kerja Sama pemerintah daerah dan dprd setempat untuk mengelola APBD dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat daerah.

Desentralisasi Fiskal Kontemporer Dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam

Any Setianingrum (2013) Unsur-unsur utama dari teori fiskal Islam ini adalah: 1) Ekonomi Islam terdiri dari ekonomi tiga sektor, yaitu, sektor swasta, sektor sosial/sukarela, dan sektor publik. Tiga sector bekerja sama, memberikan kerangka kelembagaan pada perekonomian Islam; 2) Zakat sebagai dasar dari system fiskal; 3) Penerapan semua instrumen fiskal melarang adanya eksploitasi yang menyebabkan riba, gharar/ ketidak pastian, spekulasi, produk/jasa yang diharamkan dan semua bentuk kezaliman. 4) Alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi dari ekonomi Islam diproses dan dilaksanakan melalui semua sector tersebut secara bersama-sama; 5) Peran sektor public dibanding sektor lain adalah minimal tapi penting sejauh beroperasi terus menerus untuk memastikan alokasi optimal sumber daya yang ada dalam masyarakat, distribusi pendapatan, dan membangun stabilitas. Dalam negara Islam kebijakan fiskal merupakan salah satu dari berbagai alat yang bekerja untuk mencapai tujuan Syariah. Secara teknis, seperti negaranegara lain, negara Islam juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban dan untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara dalam perspektif Islam juga harus aktif dalam mengurangi kesenjangan pendapatandan kekayaan dan mempromosikan tatanan ekonomi dan sosial yang egaliter. Kebijakan fiskaldalam negara Islam tidak harus menjadi faktor penghambat. Ibn Khaldun memperingatkan terhadap kemungkinan efek samping dari pajak yang berlebihan pada keinginan untuk berinvestasi danselanjutnya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Secara umum, efektivitas desentralisasi fiskal tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran negara, tingkat privatisasi dalam perekonomian, kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan, transparansi dankapasitas administrasi dan kelembagaan

¹⁰ Suyanto, "Flypaper Effect Theory Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 11, Nomor 1, Juni 2010, Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

local.¹¹ Kebijakan desentralisasi fiskal yang dijalankan pada era modern saat ini, minus zakat dan instrumen sosial Islam lainnya, yakni infak, shadaqah dan wakaf, memiliki kerangka tujuan yang sejalan dengan perspektif ekonomi Islam, namun penyimpangan pada implementasi masih banyak, yang diindikasikan karena masih banyaknya muatan eksploitasi sebagaimana yang dilarang dalam Islam.

Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Upaya Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara (Periode 1994-2013) jurnal yang ditulis oleh Yoan Bahalau, Een Novritha Walewangko dan Hanly F. Dj. Siwu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, metode analisis yang di gunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil estimasi, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan secara simultan (bersama-sama) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pada banyak negara berkembang termasuk Indonesia, tingkat kemiskinannya masih relatif tinggi dan oleh karenanya desentralisasi diharapkan Akan menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penduduk miskin. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia khususnya daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah di tuntut untuk melakukan berbagai macam program pembangunan pendidikan, di barengi dengan tekad untuk memprioritaskan alokasi anggaran terhadap sektor pendidikan sama halnya pula dengan sektor kesehatan dimana pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap berbagai macam program dalam rangka untuk meningkatkan fasilitas.¹² Pengelolaan anggaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan memerlukan manajerial dan akuntabel dalam menjaga agar dana yang ada dapat di salurkan sesuai dengan yang di rencanakan.

Jurnal yang ditulis oleh Sugeng Hadi Utomo dan Hadi Sumarsono (2009) yang berjudul *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur*. Kebijakan desentralisasi fiskal dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi ekonomi publik sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pengaruh pembelanjaan publik terhadap pertumbuhan, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur perlu meningkatkan efektifitas penganggaran melalui

¹¹ Any Setianingrum. "Desentralisasi Fiskal Kontemporer Dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam", Fakultas Ekonomi Universitas Az Zahra Jakarta, *Ekonomika-Bisnis* Vol. 4 No.1 Bulan Januari Tahun 2013.

¹² Yoan Bahalau, Een Novritha Walewangko dan Hanly F. Dj. Siwu, "Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Upaya Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara (Periode 1994-2013)", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 15 No. 04 Tahun 2015.

sistem perencanaan program yang lebih baik (bottom- up melalui musrenbang), baik di tingkat desa, kecamatan, maupun tingkat Kabupaten.¹³

Jurnal *Studi Sosial Ekonomi Tentang Keterkaitan antara Modal Sosial dan pembangunan Ekonomi wilayah studi kasus di Empat Kabupaten di Provinsi Bali*, yang ditulis oleh Nyoman Utari Viprianti, terbaikannya pembangunan sumber daya social menyebabkan lemahnya stok modal social sehingga menekan produktivitas kerja dan mendorong terbangunnya jaringan kerja yang tidak efisien, lemahnya norma serta hilangnya nilai-nilai bersama yang akhirnya merugikan semua pihak yang berinteraksi dalam proses pembangunan. Hasil dari penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa rasa percaya merupakan salah satu yang meningkatkan modal sosial di wilayah maju, modal sosial juga memiliki keterkaitan yang nyata dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga.¹⁴ Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Nyoman karakteristik social ekonomi di Bali, maka strategi terbaik yang harus dipilih oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya merevitalisasi modal social di Bali yakni bekerja sama (*cooperative*) tanpa menghilangkan semangat persaingan (*coompetition*). Implikasi dari strategi tersebut masing-masing pihak harus bersedia mengalokasikan dana untuk membangun aktivitas social. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan ekonomi dan kerjasama social di masyarakat setempat.

Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia yang ditulis oleh Ruslan Abdul Ghofur Noor (2012) dalam jurnal ini harapan untuk tawaran yang diajukan merupakan konsep yang terlahir dari sistem ekonomi Islam yang saat ini diharapkan mampu menawarkan konsep lebih menjanjikan, dan tetap sesuai dengan kepribadian bangsa dalam menciptakan keadilan ekonomi.¹⁵ Afzalur Rahman menjelaskan bahwa pemahaman distribusi secara adil dalam konteks syariah bukanlah distribusi yang ditawarkan sosialis dengan sama rata dan kapitalisme dengan sistem pajak progresifnya. Namun keadilan distribusi yang dimaksud ialah keadilan distribusi yang dituntun oleh nilai syariah. Kebijakan distribusi yang ditawarkan ekonomi Islam dengan tidak berpihak hanya pada salah satu agen ekonomi, dan diperkuat dengan prinsip-prinsip yang jelas memberikan arahan bahwa keadilan ekonomi harus ditegakkan. Hal awal yang dapat dilakukan ialah memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada pemerintah dan masyarakat selaku institusi ekonomi bahwa terciptanya keadilan ekonomi

¹³ Sugeng Hadi Utomo dan Hadi Sumarsono, "Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur". *JESP Vol. 1, No. 2, 2009*.

¹⁴ Nyoman Utari Viprianti. "Studi Sosial Ekonomi Tentang Keterkaitan antara Modal Sosial dan pembangunan Ekonomi wilayah studi kasus di Empat Kabupaten di Provinsi Bali". *Thesis*, Bogor: Sekolah Pasca Sarjana IPB. Tanpa tahun.

¹⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, Lampung *ISLAMICA*, Vol. 6, No. 2, Maret 2012.

merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab salah satu institusi yang ada, melainkan tanggung jawab bersama selaku agen ekonomi dan institusi ekonomi.

Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Indeks Pembangunan Manusia jurnal yang ditulis oleh Cok Istri Krisnanda Widani dan Ni Made Adi Erawati, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kapasitas fiskal daerah (dengan parameter PAD, DAU, DBH) dan pertumbuhan ekonomi daerah pada IPM di Kab/Kota Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Biro Keuangan Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data yang digunakan meliputi: uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada IPM, sedangkan DBH berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM, dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada IPM Kabupaten/Kota Provinsi Bali.¹⁶

*Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan.*¹⁷ Jurnal ini lebih menyoroti peran masyarakat dan LSM dalam meningkatkan kehidupan social dan ekonomi masyarakat didesa, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan program CSR. Sedangkan dalam penelitian tesis penulis bertujuan mengidentifikasi pembangunan social ekonomi yang telah dilakukan pemerintah daerah serta dampak dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat Indragiri Hilir.

*Sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha Dan Masyarakat Sipil (Civil Society) Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Cilegon.*¹⁸ Merupakan jurnal yang membahas bagaimana sinergi antara pemerintah dunia usaha dan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan melalui dana-dana CSR yang dimiliki oleh perusahaan dan peran masyarakat. Jurnal ini menjadi rujukan dalam penelitian karena sama-sama ingin melakukan pembangunan social ekonomi perbedaannya adalah karena

¹⁶ Cok Istri Krisnanda Widani dan Ni Made Adi Erawati, "Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Indeks Pembangunan Manusia". *E-Jurnal Akuntansi* Universitas Udayana Bali, Vol.17.1. Oktober 2016.

¹⁷ Isma Rosyida dan Fredian Tonny Nasdian, "Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan". *Jurnal Sodality* Institut Pertanian Bogor Fakultas Ekologi Manusia, ISSN: 1978-4333, Vol. 05, No. 01 30 Maret 2011.

¹⁸ Ipah Ema Jumiati, "Sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha Dan Masyarakat Sipil (Civil Society) Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Cilegon". Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Tanpa Tahun.

pembangunan social ekonomi yang dilakukan dalam jurnal ini hanya sekedar dalam memngtaskan kemiskinan, sedangkan peneliti ingin melakukan pembangunan social ekonomi lebih dari pengentasan kemiskinan. Dalam jurnal ini peneliti ingin menghasilkan output untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat cilegon dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibangun bersama, untuk kepentingan ke depan dalam jangka panjang. Sedangkan penelitian tesis ini ingin melihat sejauh mana peran pemerintah dalam pembangunan social ekonomi dan sinergitas yang telah di lakukan dalam perode pemerintah saat ini.

Sehingga dari beberapa penelitian yang disebutkan diatas penelitian ini berbeda karena bukan merupakan penelitian kuantitatif yang biasanya banyak digunakan dalam penelitian kebijakan fiskal, penelitian kebijakan public biasanya menghitung jumlah pendapatan dan melihat pengeluaran dari anggaran kebijakan fiskal, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang lebih melihat pendektan secara teoritis menggunakan teori salah satu tokoh pemikir Islam kontemporer (Muhammad Abdul Mannan) yang gagasannya membuat sejarah baru dalam ekonomi khususnya dalam mendukung dan menyebarkan pengaruh ekonomi Islam didunia dalam bidang pebankan Islam. Sehingga gagasannya terhadap penerapan kebijakan Fiskal Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah diharapkan dapat diterima dan menjadi solusi dalam penetapan kebijakan fiskal daerah atau bahkan Negara untuk mengulang suksesnya pengenalan system ekonomi Islam bukan hanya dalam perbankan tetapi juga system kebijakan fiskal yang sesuai dengan Islam yang di bumikan. Penelitian ini juga melakukan kebijakan fiskal apa saja yang secara tidak langsung sudah mengaitkan nilai-nilai Islam dan dari hasil penerapannya menghasilkann solusi serta perubahan dalam pembangunan social ekonomi didaerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

B. Kerangka Teori

Ekonomi Islam yang dimaksud Muhammad Abdul Mannan adalah "*social science which studies the economics problems of peole imbued with the values of Islam*" (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam). Ekonomi Islam telah ditandai sebagai ekonomi tiga sektor, yaitu sektor swasta dengan keuntungan, sektor sukarela dan sektor publik. Ketiga sektor bekerja sama memberikan kerangka kelembagaan Ekonomi Islam (*An Islamic economy has been characterized as a three sector economy, namely the private sector with profit, the*

*voluntary sector and the public sector. The three sectors working in conjunction furnish the institutional framework of an Islamic economy).*¹⁹

Keunggulan sistem ekonomi Islam berupa menyatunya nilai moral dan nilai spiritual didalam sistem tersebut. Nilai moral itulah yang tidak ada dalam kegiatan perekonomian model sistem ekonomi kapitalis ala barat. Jika tidak ada kontrol nilai moral, maka yang timbul adalah perilaku para pelaku ekonomi yang cenderung merusak dan dapat merugikan masyarakat umum. Sebagai contoh munculnya praktek-praktek monopoli, riba dan berbagai teknik kecurangan-kecurangan yang terus muncul dalam berbagai modus.²⁰

1. Pemikiran Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan lahir di Bangladesh pada tahun 1938 Setelah menerima gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Rasjshahi pada 1960, ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Pada 1970 ia pindah ke Amerika Serikat dan di sana ia mendaftarkan diri di Michigan State University untuk program M.A. (*Economics*). Pada 1973 ia lulus program Doktor dari universitas yang sama, dalam bidang minat beberapa bidang ekonomi, seperti bidang pendidikan, ekonomi pembangunan, hubungan industrial dan keuangan. Setelah mendapatkan gelar doktor Mannan mengajar di Papua Nugini dan pada 1978 ia ditunjuk sebagai profesor di International Centre for Islamic Economics di Jeddah (kini bernama Centre for Research in Islamic Economics).

Selama 30 tahun kariernya, Mannan berperan dalam sejumlah besar organisasi pendidikan dan ekonomi. Pada 1970 Ia menerbitkan buku utamanya yang pertama, yaitu *Islamic Economics Theory and Practice*. Buku ini dipandang oleh kebanyakan mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam sebagai buku teks pertama ekonomi Islam. Untuk sumbangannya bagi pengembangan ekonomi Islam, Mannan dianugerahi Award of Pakistan pada 1974, yang bagi Mannan setara dengan hadiah Pulitzer.²¹

Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai Islam. Ekonomi berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi barang serta jasa dalam kerangka (suatu) masyarakat Islam yang di dalamnya jalan hidup Islami ditegakkan sepenuhnya. Ekonomi Islam

¹⁹ F.R. Farid, "Theory of Fiscal Policy in an Islamic State". *J. Res. Islamic Econ.*, Vol. 1, No. 1, pp. 15-30 (1403/1983). King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia, hlm. 15.

²⁰ Djoko Setyo Hartono, "Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Krisis Ekonomi Eropa", Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan 112 Fakultas Ekonomi UNIMUS 2011, hlm. 118.

²¹ Mohammed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer analisis komparatif terpilih*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 16.

merupakan studi tentang masalah-masalah ekonomi dari setiap individu dalam masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai kehidupan Islami, yakni *homo Islamicus*. Dihadapkan pada masalah “kelangkaan” bagi Mannan, sama saja artinya dengan kelangkaan dalam ekonomi Barat, pilihan individu terhadap alternatif penggunaan sumber daya saling berbeda, dipengaruhi oleh keyakinannya terhadap nilai-nilai Islam. Dengan demikian, yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem ekonomi lain adalah sifat motivasional yang mempengaruhi pola, struktur, arah dan komposisi produksi, distribusi dan konsumsi.²²

Landasan teoritis Mannan berisi sejumlah asumsi dasar Manusia Islam (Islamic man) yang dimaksud ialah seseorang yang menginginkan bersatunya ekonomi dan moral yang maksimum, dianggap bersifat individualistik, tetapi sekaligus kooperatif dan bertanggung jawab secara sosial. Bagaimana kontradiksi yang sedemikian jelas ini dipecahkan, tidaklah jelas. Ia juga tidak percaya pada *harmony of interests*, yang menjamin terbentuknya pasar seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith. Dalam model eklektik itu ia menyimpulkan bahwa perekonomian Islam diharapkan akan bekerja pada perpotongan antara sistem pasar dan perencanaan terpusat, yaitu menggabungkan yang terbaik antara keduanya.

Mannan juga menolak materialisme historis dan percaya bahwa hal itu merupakan “versi moral dan spiritual” dari manusia yang memadukan kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan biologis, yaitu berlawanan dengan determinasi ekonomi Marxisme. Ia melihat adanya kebutuhan terhadap perubahan menuju yang lebih baik dan menyatakan bahwa hanya ekonomi Islam yang dapat memberikan perubahan tersebut karena nilai-nilai etika dan kemampuan motivasional yang dimilikinya. Ia juga menyebarkan gagasan mengenai perlunya membebaskan diri sendiri dari paradigma kaum neoklasik positifis, dengan menyatakan bahwa observasi harus ditujukan kepada dan dilengkapi dengan data historis dan data wahyu.

Mannan mendukung pandangan yang menyatakan bahwa kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah ada pada Allah SWT. Sebagai wakil amanah (khalifah Nya) di muka bumi, manusia diharuskan menggunakan semua sumber daya yang telah disediakan untuk kebaikan dan kemaslahatannya. Kepemilikan individu dikenal dan dilindungi dalam Islam, tetapi legitimasi kepemilikan bergantung pada kewajiban moral, agama, dan kemasyarakatan individu yang bersangkutan, selama tidak terjadi eksploitasi

²² *Ibid*, hlm. 17.

ataupun pencabutan atas hak pihak lain. Setiap orang memiliki hak yang sama mengenai sumber-sumber produktif yang tersedia, dan setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses distribusi. Penguasaan kekayaan fungsionu dibenarkan dan mendorong penggunaan modal secara produktif dan menguntungkan.

Mannan menyusun aturan berkaitan dengan kepemilikan individu dalam sistem ekonomi Islam, yaitu:

- 1) Tidak boleh ada aset yang menganggur. Setiap aset harus di manfaatkan secara terus-menerus;
- 2) Pembayaran zakat diwajibkan apabila telah memenuhi syarat;
- 3) Penggunaan yang menguntungkan atau penggunaan untuk kegiatan yang menguntungkan;
- 4) Penggunaan aset tidak boleh untuk hal-hal yang dapat membahayakan, baik bagi dirinya maupun orang lain;
- 5) Kepemilikan kekayaan secara sah;
- 6) Penggunaan yang seimbang;
- 7) Keuntungan dari penggunaan yang benar serta tidak diperkenankan konsentrasi kekayaan kepada sekelompok masyarakat;
- 8) Penerapan hukum Islam tentang warisan.

Negara boleh intervensi dalam perekonomian apabila terdapat pelanggaran terhadap berbagai aturan tersebut. Akan tetapi, ia tidak menyebutkan apakah individu yang melanggar masih boleh memegang hak kepemilikannya “dengan sanksi hukum” ataukah ia harus kehilangan haknya.

Kemudian, berkaitan dengan mekanisme pasar, Mannan tidak yakin jika mekanisme pasar saja sudah cukup untuk menentukan semua harga dan jumlah output, khususnya jika berhubungan dengan pemberian bagi si miskin. Disebabkan oleh konsep permintaan efektif yang mendasari mekanisme pasar, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan pasti akan menyebabkan kegagalan mekanisme pasar dalam penyediaan kebutuhan dasar untuk kepentingan permintaan si kaya. Mannan mengemukakan konsep kebutuhan efektif untuk menggantikan konsep permintaan efektif.

1.1. Kebijakan Fiskal Mannan

Kebijakan Fiskal dan Anggaran Belanja dalam Islam menurut Mannan bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan yang berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang Sama. Menurut Mannan Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan Negara mengenai pengeluaran

pendapatan. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui insentif atau meniadakan insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah. Mannan juga mengutip yang dikatakan Profesor R.W. Linson “dalam membuat pengeluaran pemerintah dan dalam memperoleh pemasukan pemerintah, penentuan jenis, waktu dan procedural yang harus diikuti,” hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan khas tertentu.²³

Mannan meghendaki kebijakan fiskal yang tidak hanya meletakkan orientasi material, akan tetapi perlu meletakkan perspektif nilai-nilai spiritual. Peranan negara adalah merestrukturisasi pola dan organisasi produksi yang menurut Mannan (1984) mencakup hal-hal berikut:

- 1) Penekanan pada kerja sama dan persaingan yang diawasi
- 2) Penekanan pada bagi hasil dan partisipasi berkeadilan untuk menggantikan bunga;
- 3) Kebijakan moneter dan fiskal yang terdefiniskan dengan jelas demi stabilisasi;
- 4) Kebijakan upah yang bagus;
- 5) Memajukan integrasi ekonomi antar negara Muslim;
- 6) Perlindungan umum atas kegiatan ekonomi.
- 7) Penyediaan kebutuhan dasar bagi semua orang.

Pemerintah harus mengambil peran penting dalam perekonomian karena alokasi sumber daya tidak dapat diserahkan pada kebebasan individu dalam kaitannya pencapaian kesejahteraan bersama. Dengan mendukung kontrol dan pengawasan Mannan menyatakan bahwa keadilan lebih penting daripada efisiensi, terutama jika berhubungan dengan kebutuhan dasar.

Berkaitan dengan instrumen fiskal dalam perekonomian, Mannan menggap zakat sebagai poros keuangan Negara Islam. Zakat merupakan sumber utama penerimaan yang tidak dipandang sebagai pajak lebih sebagai kewajiban agama karena kedudukannya sebagai salah satu rukun Islam. Zakat merupakan sebuah elemen sosialisme Islam yang digagasnya. Meletakkan wakaf sebagai instrumen kebijakan fiskal yang potensial dan zakat sebagai pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

²³ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, alih Bahasa M. Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 230.

Mannan juga menyatakan bahwa system produksi dalam Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjektif. Kriteria yang objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang. Kriteria subjektif dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah kitab suci Al-Qur'an dan sunnah. Jadi dalam Islam keberhasilan sebuah system ekonomi tidak hanya disandarkan pada segala sesuatu materiil tapi agar bagaimana setiap aktifitas ekonomi bisa menerapkan nilai-nilai, norma, etika atau dengan kata lain akhlak yang baik dalam berproduksi.²⁴

1.2. Pembangunan Sosial Ekonomi Mannan

Pembangunan ekonomi social menurut Abdul Mannan yakni pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat Muslim berdasarkan prinsip menggembirakan (*at-targib*) yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi pembangunan ekonomi dalam Islam untuk mewujudkan kehidupan yang baik (*al-hayat at-tayibah*) sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an. Tujuan pembangunan ekonomi untuk merubah masyarakat sehingga mendapatkan ridho Allah.

Mannan memandang bahwa "keterlibatan Islam yang bersifat pragmatis dan realistis bagi si miskin adalah sangat tulus sehingga distribusi pendapatan menjadi pusat berputarnya pola dan organisasi produksi dalam suatu negara Islam". Mannan menambahkan bahwa "Pertimbangan distribusi yang harus memengaruhi produksi barang jasa, sehingga ia juga menjadi indikator konsumsi".

Berkaitan dengan produksi dalam Islam, menurut Mannan, tujuan perusahaan bukan hanya memaksimalkan keuntungan, melainkan juga harus memperhatikan moral, sosial, dan kendala institusional. Perusahaan tidak lagi dipandang hanya sebagai pemasok komoditas tetapi juga sebagai penjaga bersama (yaitu, bersama pemerintah) bagi kesejahteraan ekonomi dan masyarakat. Proses produksi menurut Mannan (1984) adalah kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kesejahteraan ekonomi di masyarakat. Nilai persaudaraan, jika diaplikasikan ke dalam lingkungan ekonomi, akan melahirkan lingkungan kerja sama dan bukan persaingan; penyebaran lebih luas dan bukan konsentrasi ataupun eksploitasi sumber

²⁴ M. Abdul Manna, *Islamic Economic Theory and Practice*, alih Bahasa M. Nastangin, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Cet. 1 (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 1997), Hlm. 54-55.

daya alam (manusia) lebih lanjut. Akhirnya, menurut Mannan, produksi merupakan proses sosial. Dalam proses sosial ini ia menetapkan keputusan produksi tidak seperti pendekatan neoklasik yang memandang keduanya secara terpisah. Mannan setuju dengan gagasan pembagian kerja dan spesialisasi untuk mem produksi secara efisien dan adil, tetapi secara konstan menekankan perlunya humanisasi proses produksi.

Secara umum, pemikiran ekonomi yang disampaikan oleh M.A. Mannan adalah sebagai berikut;

- 1) Perekonomian Islam diharapkan akan bekerja pada perpotongan antara sistem pasar dan perencanaan terpusat.
- 2) Kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah ada pada Allah Sebagai wakil amanah (khalifah-Nya) di muka bumi, manusia diharuskan menggunakan semua sumber daya yang telah disediakan untuk kebaikan dan kemaslahatannya.
- 3) Pemerintah harus mengambil peran penting dalam perekonomian karena alokasi sumber daya tidak dapat diserahkan pada kebebasan individu dalam kaitannya dalam pencapaian kesejahteraan bersama.
- 4) Proses produksi merupakan usaha kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kesejahteraan ekonomi di masyarakat.

Mannan menerbitkan bukunya pada tahun 1984 yang berjudul *The Making Of Islamic Economic Society and The Frontier Of Islamic Economics*. Mannan memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam melalui bukunya yang berjudul *Islamic Economic Theory and Practice* yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan Hadits.

Dari sumber hukum Islam Mannan merumuskan langkah operasional yakni salah satunya mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, Melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau atas target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan dalam seluruh kerangka yang ditetapkan, dan Membandingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah dengan pencapaian yang diperoleh (*perceived achievement*).

Kelebihannya pemikiran Mannan dapat dikemukakan dalam beberapa hal:

- a) Pandangan dan pemikirannya komprehensif dan integratif mengenai teori dan praktek ekonomi Islam, menghadirkan

gambaran keseluruhan dan bukan hanya potongan-potongannya. Ia melihat sistem ekonomi Islam dalam perspektifnya yang tepat.

- b) Karakteristik *kedua* dari pemikirannya adalah terintegrasinya teori dengan praktik ekonomi Islam. Muhammad Abdul Mannan dengan sangat baik mengembangkan argumen yang jitu dalam menggulirkan konsep ekonomi Islam inklusif masalah peranan asuransi Islam.
- c) *Ketiga*, karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah meningkatkan tingkat perdebatan mengenai ekonomi Islam, asuransi dan perbankan Islam, oleh evaluasi kritis dari sebagian gagasan baru yang berkembang selama dekade baru, dengan menghadirkan pandangan-pandangan baru dan saran kebijakan yang relevan. Empat Belas (14) Evaluasinya tentang sebagian usulan dari Laporan Dewan Ideologi Islam Bangladesh telah memperkaya perdebatan. Pandangannya tentang konsep asuransi, uang, perbankan Islam, kerangka mikro dan makro ekonomi, kebijakan fiskal dan Anggaran Belanja dalam Islam di dasarkan atas pemahaman yang luas dan akurat.

Konsep wakaf tunai pemikiran Abdul Mannan, Wakaf merupakan instrumen fiskal yang memiliki ciri keabadian, yang artinya apabila harta tertentu telah diwakafkan maka hal itu tidak akan berubah hingga hari akhir. Menurut Abdul Mannan, yang merupakan salah satu *pioneer* dalam pengembangan wakaf tunai dalam ekonomi Islam. Bahwa wakaf tunai memiliki arti yang sangat penting bagi perekonomian negara, sebagai sarana transfer harta kekayaan orang kaya kepada para pengusaha dan warga masyarakat dalam membiayai berbagai program keagamaan, sosial, dan pendidikan dalam negara-negara Islam. Di samping itu, wakaf tunai juga dapat berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapuskan kemiskinan dan menangani ketertinggalan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan riset.

25

Kebutuhan dan Urutan Prioritas dalam Islam, Mannan menggolongkan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam tiga judul: *Pertama*, Keperluan biasanya meliputi semua hal yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan yang harus dipenuhi. *Kedua*, Kesenangan didefinisikan sebagai komoditi yang penggunaannya menambah efisiensi pekerja, akan tetapi tidak seimbang dengan biaya komoditi

²⁵ Martini Dwi Pusparini, "Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan", *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, hlm. 26.

semacam itu. *Ketiga*, kemewahan menunjuk kepada komoditi yang penggunaannya menambah efisiensi seseorang bahkan mungkin mengurangnya (misalnya: perhiasan, kendaraan mewah dll).²⁶

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal diartikan tindakan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan pendapat dan pengeluaran uang di daerah maupun dalam negara²⁷. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal terwujud dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).²⁸

Kebijakan disuatu daerah bisa mempunyai konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Suatu kebijakan publik mestinya lebih banyak diarahkan pada upaya pencapaian utilitas tertinggi dari masyarakat. Pada pelaksanaannya banyak sekali yang menjadi hambatan dan kesulitan ini bertambah manakala pemerintah daerah berhadapan dengan perubahan kebijakan. Tidak dapat dipungkiri kemudian kekuatan kompromi politik kemudian menentukan arah kebijakan.²⁹

Beberapa pandangan kebijakan fiskal menurut pandangan ahli; Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Menurut Prathama Rahardja Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelolah/ mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

3. Pembangunan Sosial Ekonomi

Konsep Pembangunan Ekonomi Islam, pembangunan ekonomi yang disertai perubahan social budaya, akan banyak menimbulkan masalah moral, oleh karena itu alternative yang dapat dilakukan oleh ilmu ekonomi agar merespon aspek moral dengan cara mengaitkan pembangunan ekonomi

²⁶ M. Abdul Manna, *Islamic Economic Theory and Practice*, alih Bahasa M. Nastangin, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Cet. 1 (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 48.

²⁷ Ibnu Syamsi, "Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara". (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 46.

²⁸ Siti Mujiatun, "Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Islam", *Fakultas Ekonomi UMSU*, tanpa tahun, hlm: 74.

²⁹ Asnita Frida Sebayon, *Kinerja Kebijakan Fiskal Daerah Di Indonesia Pasca Krisis*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10 No. 3, Desember 2005* Hlm: 204

dengan agama.³⁰ Dalam jurnal Asmuni teori Khursyid pembangunan ekonomi tidak terbatas variable ekonomi semata tetapi aspek moral dan social, material dan spiritual. Khursyid juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu pada seluruh generasi menghapus riba dan mewajibkan zakat. Pembangunan ekonomi untuk merealisasikan desentralisasi.

Quhaf mengatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi untuk membentuk iklim yang kondusif bagi keagungan nilai-nilai Islam dalam suatu masyarakat yang sejahtera secara material dan memenuhi kebutuhan yang memadai bagi masyarakat Muslim. Quhaf juga perlu menselaraskan pembangunan ekonomi di berbagai daerah.

Menurut Naqwa Islam harus mewujudkan keadilan distribusi pendapatan, meskipun dengan keadaan pertumbuhan ekonomi yang relative rendah. Tolak ukur untuk pertumbuhan ekonomi pada era modern memiliki indicator-indikator seperti, keadilan dalam distribusi pendapatan, keberhasilan dalam mengatasi pengangguran atau membuka lapangan kerja dan lain-lain.

4. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan Antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.³¹

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara local (daerah).

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industry-industri alternative. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah

³⁰ Asmuni Mth, "Konsep Pembangunan Ekonomi Islam", *Al-Mawarid* Edisi X tahun 2003, hlm. 129

³¹ Lincolin Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta:BPFE, 2011), hlm. 108-109.

5. Pembangunan Sosial

Secara konseptual, istilah pembangunan sosial (*social development*) sering dipertukarkan dengan pembangunan manusia (*human development*) dan pembangunan kesejahteraan sosial (*social welfare development*) memiliki konsentrasi yang relatif berbeda, meskipun bersinggungan. pembangunan manusia memfokuskan perhatiannya pada peningkatan modal manusia (*human capital*) yang diukur melalui dua indikator utama; pendidikan (misalnya angka melek huruf) dan kesehatan (misalnya angka harapan hidup). Pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial.³²

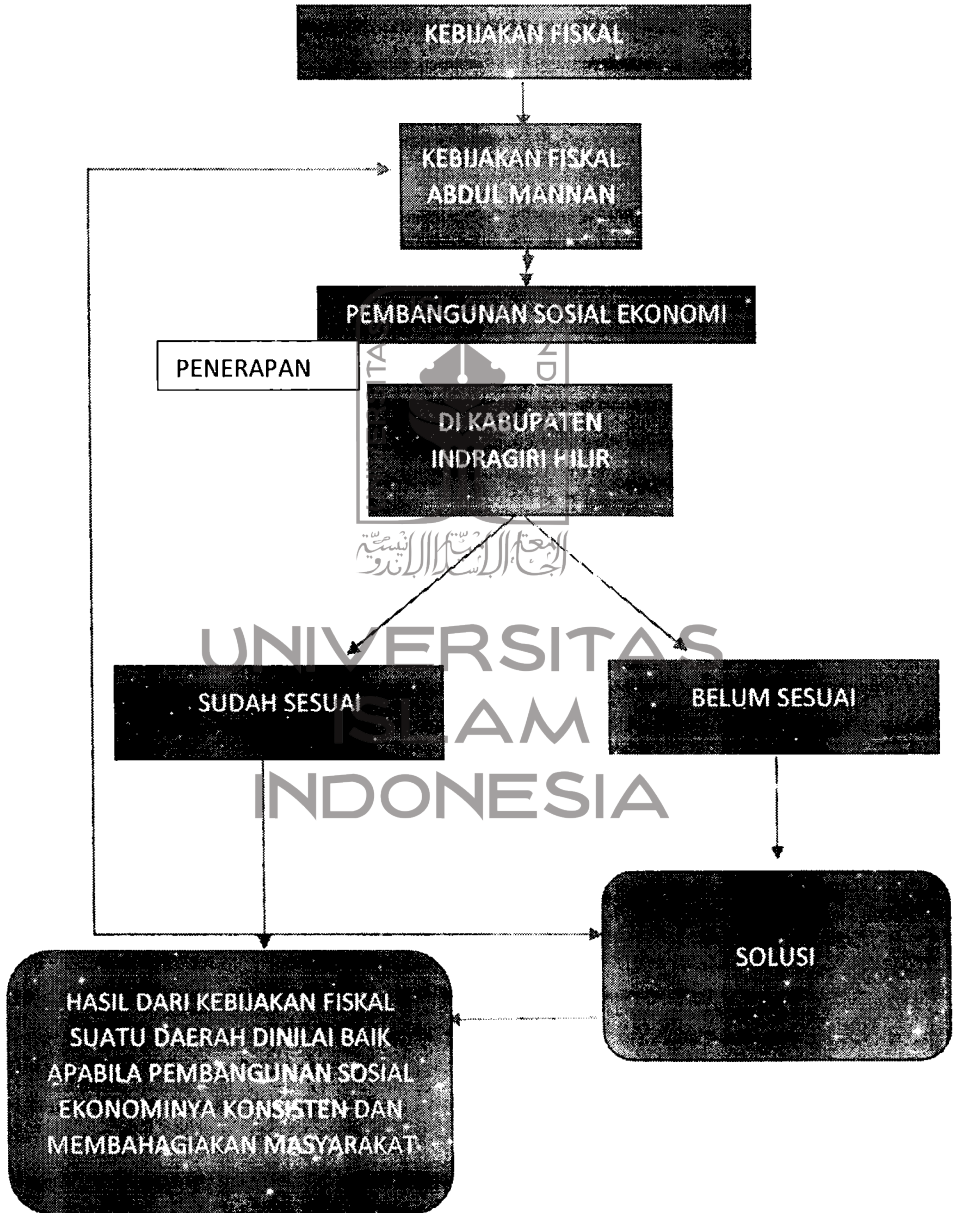


UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

³² Romi Sukma, "Strategi Pembangunan Sosial: Upaya Pengentasan Masalah Kemiskina," dikutip dari <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/6010>, diakses pada hari Sabtu 8 April 2017 jam 12.30 WIB.

C. Kerangka Berpikir

Gambar 1 Kerangka Berpikir Penelitian.



Penjelasan Kerangka Berpikir

- (1) Teori kebijakan umum yang dimasukkan dalam kerangka teori sebagai penghubung tujuan dari kebijakan fiskal di Indonesia dan sebagai penjelasan dalam penyusunan penelitian ini.
- (2) Teori kebijakan fiskal Mannan menjadi rujukan utama dalam penelitian ini.
- (3) Penerapan kebijakan fiskal memiliki fungsi yang sangat luas dalam suatu daerah atau Negara fungsi kebijakan fiskal ini yang menjadi sangat penting karena untuk pembangunan social ekonomi di suatu wilayah.
- (4) Pembangunan social ekonomi dalam kebijakan fiskal yang diambil dari pemikiran Mannan ini, akan dilihat yang mana saja yang diterapkan di Kabupaten Indragiri Hilir.
- (5) Kesesuaian dan ketidak sesuai dengan teori dianalisa dalam pembahasan penelitian.
- (6) Ketidak sesuai dengan teori akan dicarikan solusi yang merujuk keteori Mannan dan kebutuhan masyarakat.
- (7) Hasil dari penerapan yang sudah sesuai akan dibahas alasan mengapa dianggap sesuai.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Moleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya.¹ Dalam hal ini penelitian yang Akan dilakukan peneliti yakni fenomena terkait tindakan pemerintah daerah dalam suatu kebijakan Fiskal di daerah Indragiri Hilir Riau, dan apakah fenomena ini ada kesesuaian dengan teori Abdul Mannan.

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan *Grounded Theory* dan *Triangulasi data*. *Grounded Theory* adalah merupakan salah satu jenis pertanyaan pada pendekatan model penelitian kualitatif. Dalam buku Herdiansyah bahwa pendekatan *grounded theory* adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa dipelajari. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Abdul Mannan terkait Kebijakan Fiskal di dalam suatu pemerintahan. Akan lebih ideal jika ada kesesuaian antara kebijakan fiskal di suatu Daerah dengan kebijakan fiskal Abdul Mannan karena Mannan mendasari teori kebijakannya dengan nilai-nilai Islam dan konteks Pembangunan social ekonomi masyarakat. Pertanyaan lanjutan pada *grounded theory* dapat dikelompokan berdasarkan aspek-aspek tahapan pengodean. Beberapa poin penting yang perlu tercantum dalam pertanyaan penelitian model *grounded theory* adalah sebagai berikut: ²

- 1) Kategori-kategori umum apa saja yang dimunculkan dalam tinjauan (*review*) pertama dari data yang diperoleh.
- 2) Memberikan daya Tarik dari fenomena yang diangkat, apa yang mendasari atau menyebabkannya? Kondisi apa saja yang memengaruhi? Strategi apa saja yang digunakan serta apa yang dihasilkan dari fenomena tersebut? Konsekuensi apa yang akan didapatkan dari strategi yang digunakan tersebut.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk lebih mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan dan sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang ingin dikaji sesuai dengan substansi. Sehingga lokasi penelitian ini yaitu di Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau tepatnya pada lembaga pemerintah daerah

¹ Lexy, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XV, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 3.

² Haris Herdiansyah, *Metode penelitian kualitatif (untuk ilmu-ilmu social)*, cet. III, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 96.

yang membuat kebijakan fiskal, Pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir khususnya di kota Tembilahan yang merupakan Ibu kota kabupaten dan pusat birokrasi daerah.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara dan diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.³ Informan yang Akan diambil dalam penelitian ini merupakan pejabat daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang memiliki peran dalam pembuatan, pelaksanaan dan mendukung kebijakan fiskal daerah, baik itu kepala pemerintah, legislative dan pemerintah daerah dalam dinas terkait kebijakan fiskal. Antara lain;

- 1) Bupati dan Wakil Bupati atau staf yang mewakili.
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- 3) Perangkat Daerah (yakni; Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Sosial dan Lembaga teknis daerah)

Pengertian lain dari informan ialah sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka *cross check* data.⁴ Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan public yang dilakukan pemerintah daerah, untuk melihat keberhasilan kebijakan yang dilakukan harus berdampak terhadap pembangunan social ekonomi masyarakat di daerah. Sehingga masyarakat yang ada di daerah tempat penelitian di kabupaten Indragiri Hilir merasakan dampak dari kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah, maka dalam penelitian ini beberapa masyarakat yang dijadikan informan untuk meng*cross chek* hasil dari wawancara pemerintah daerah, terkait kepuasan masyarakat atas kebijakan fiskal dalam beberapa dasawarsa kebijakan.

Namun dalam wawancara mendalam peran informan tetap menjadi sentral, walaupun kadang informan berganti-ganti. Tugas pewawancara adalah untuk tetap menjaga agar peran informan selalu dapat berfungsi sebagaimana perannya dalam proses social yang sebenarnya.⁵ Sehingga apabila di lapangan informan berubah maka hal ini tidak di permasalahan selama informasi yang dicari peneliti sudah didapatkan dengan pergantian informan yang ada.

³ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 111.

⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 133.

⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) hlm. 112.

D. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Purposive adalah teknik penentuan Informan dengan cara peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti memiliki kriteria informan yakni yang membuat, memberikan usulan dan melaksanakan kegiatan tersebut dalam pembuatan kebijakan fiskal di kabupaten, anggota DPRD, bupati dan wakil bupati, serta beberapa perangkat daerah.

Kuota merupakan salah satu penentuan informasi untuk melengkapi teknik sebelumnya, kuota Informan yang dipilih bertujuan untuk memenuhi kuota yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka yang dipilih ini diambil begitu saja, tanpa metode/cara tentu, sebagai *cross chek* terhadap hasil wawancara sebelumnya dan untuk memperkuat hasil penelitian. dalam hal ini yang menjadu informan *cross chek* adalah masyarakat yang tinggal di daerah Indragiri Hilir.

E. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian disamping penggunaan metode yang tepat diperlukan pula kemampuan memilih dan menyusun tehnik dan alat pengumpulan data yang relevan, sehingga akan mempengaruhi keobjektifan dan kevalidtan hasil penelitian.⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁷ Yakni melakukan Observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian dapat diamati oleh peneliti.⁸ Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi dari lingkungan atau daerah yang menjadi subjek penelitian serta Instansi-instansi yang menjadi tempat penelitian.

⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial, cet. XII* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, cet. XXI* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 241.

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 143.

2) Wawancara

Salim mengungkapkan data dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata, maka wawancara menjadi perangkat yang sedemikian penting.⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu disediakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi dan improvisasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan data pada saat proses wawancara tersebut.¹⁰ Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan dan terhadap stakeholders yang berkaitan dalam pencarian data tersebut.

3) Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel jika didukung dengan dokumen tambahan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya tulis dari Abdul Mannan yang merupakan acuan teori paling utama dalam penelitian ini, dokumen yang didapat dari beberapa informan atau instansi, Badan Pusat Statistik Indragiri Hilir dan Data terkait APBD Indragiri Hilir serta dokumen foto hasil dari wawancara informan.

F. Keabsahan Data

Menurut Guba dan Lincoln dalam Meleong¹¹ teknik dokumentasi merupakan bahan tertulis atau film. Dokumen yang ada digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen digunakan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan. Sehingga dalam penelitian ini pengambilan data melalui dokumen-dokumen atau literatur yang berkaitan dengan kebijakan fiskal pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya dalam hal ini, dokumen yang digunakan adalah data yang bersifat tertulis ataupun rekaman yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Karena menggunakan sebuah teori dari Abdul Mannan dan melihat sejauh mana kesesuaian kebijakan fiskal di kabupaten Indragiri Hilir maka peneliti akan melakukan analisis secara terstruktur untuk melihat apakah kebijakan fiskal di kabupaten Indragiri Hilir sudah memenuhi kategori Kebijakan Fiskal yang Islami dalam teori Mannan.

⁹ Agus Salim, "Teori dan Paradigma Pemelitan Sosial", *Edisis. 2*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 16.

¹⁰ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum UGM, 1985), hlm. 26

¹¹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, cet. XV*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 9.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga proses pengumpulan data dan analisis berlangsung selama dan pasca pengumpulan data. Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan hasil studi.¹² Sehingga sebagaimana pernyataan Miles dan Huberman dalam Salim “analisis data kualitatif sebagai model alir (*flow model*), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).”

Untuk menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif yang dimulai dengan memaparkan dan menjelaskan apa yang telah didapatkan dari referensi ataupun data. Proses analisis data ini yang dilakukan dengan cara memulai menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber terutama dari hasil wawancara dan yang terpenting dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan pemikiran Abdul Mannan terkait kebijakan Fiskal dan pembangunan social ekonomi.

Ada 3 tahapan analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman, yaitu reduksi data, *display*, dan *conclusion/verification*.¹³

- 1) **Reduksi Data**, Maksud dari reduksi data adalah kita sebagai peneliti merangkum, memilah dan memilih, dan melakukan kategorisasi dari data-data yang kita dapatkan dari sumber data melalui beragam teknik pengumpulan data yang kita lakukan. Dalam penelitian kualitatif, data utamanya berupa kata-kata dan tindakan. Berbeda dengan penelitian kauntitatif yang data utamanya berupa angka-angka. Karena tindakan merupakan bagian dari data utama dalam penelitian kualitatif. Analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
- 2) **Display Data**, *display* atau Penyajian data kualitatif menurut bentuk/pola tertentu yang dapat dilakukan dalam bentuk bagan, grafik, uraian singkat, matrik, chart, dan network. Ketika pola-pola yang ditemukan oleh peneliti telah dilengkapi dan didukung oleh data, maka pola itu menjadi pola baku yang selanjutnya dapat disajikan dalam laporan akhir penelitian. Data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan melalui proses wawancara dan pengamatan perilaku manusia, direkam melalui pencatatan secara tertulis dan pengambilan gambar berupa foto.

¹² Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Edisi. 2, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006). Hlm. 22.

¹³Ahmad Mujib, “3 Langkah Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman”, di kutip dari <http://www.wikipendidikan.com/2017/05/analisis-data-kualitatif.html>, diakses pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 jam 16.17 WIB.

3) **Kesimpulan dan Verifikasi**, Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam pandangan Miles & Huberman, penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif hanyalah bagian dari serangkaian proses penelitian secara keseluruhan. Verifikasi maksudnya peneliti meninjau kembali atau mengoreksi ulang catatan-catatan data yang ia peroleh dan pemaknaan yang ia lakukan terhadap data tersebut.

Mengingat penelitian ini mengelaborasi antara teori Mannan dan Kebijakan Fiskal di daerah Indragiri Hilir maka untuk penguatan Analisa pada penelitian ini menambahkan analisis Komparasi Konstan (*Grounded Theory Research*), dalam pendekatan teori *grounded* ini, peneliti mengkosentrasikan dirinya pada deskripsi yang rinci tentang sifat/ ciri dari data yang dikumpulkan, sebelum berusaha menghasilkan pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih umum. Di saat telah memadainya rekaman cadangan deskripsi yang akurat tentang fenomena sosial yang relevan, barulah peneliti dapat mulai menghipotesiskan jalinan hubungan di antara fenomena-fenomena yang ada, dan kemudian mengujinya dengan menggunakan porsi data yang lain. Tiga aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu:¹⁴

- 1) Menulis catatan atau *note writing*.
- 2) Mengidentifikasi konsep-konsep atau *discovery or identification of concepts*.
- 3) Mengembangkan batasan konsep dan teori atau *development of concept definition and the elaboration of theory*.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁴ Tanpa Nama, "Tahapan Analisis Data Penelitian Kualitatif", Dikutip dari <https://bersukacitalah.wordpress.com/2011/01/20/tahapan-analisis-data-penelitian-kualitatif/> di akses Minggu 9 April 2017 jam 22.30 WIB.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

Indragiri Hilir (Inhil) adalah salah satu dari 12 Kabupaten/ Kota di Riau yang terletak di selatan Provinsi Riau.¹ Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara 0.36' Lintang Utara dan 1.07' Lintang Selatan, dan antara 102.32'-104.10' Bujur Timur. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 11.605,97 KM². Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;
- Sebelah selatan - Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi);
- Sebelah Barat - Kabupaten Indragiri Hulu;
- Sebelah Timur - Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau).

Kabupaten Indragiri Hilir, dikenal juga sebagai Negeri Seribu Parit, dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana penghubung atau transportasi yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah dengan menggunakan *speed boat* atau perahu kecil lainnya. Diantara sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah Sungai Indragiri yang berasal dari dari Danau Singkarak (Provinsi Sumatera Barat) yang bermuara di selat berhala.

Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada dataran rendah atau pesisir timur dengan ketinggian <5 meter di atas permukaan laut. Hal ini mengakibatkan daerah ini menjadi daerah rawa-rawa yang beriklim tropis basah. Akan tetapi, terdapat desa-desa yang merupakan dataran tinggi. Desa-desa tersebut terdapat di Kecamatan Keritang dan Kemuning. Hal ini menyebabkan lahan pertanian pada daerah tersebut tidak terpengaruh pada air laut.

Mayoritas penduduk Kabupaten Indragiri Hilir memeluk Agama Islam. Hal ini digambarkan dari banyaknya jumlah Mesjid dan Surau/ Mushallah sebagai tempat ibadah Ummat Islam pada tahun 2016 Kantor kementerian agama kabupaten Indragiri Hilir dalam data Badan Pusat Statistik inhil 2016. Jumlah bangunan Mesjid 846, surau atau mushallah 756. Kota Tembilahan juga memiliki slogan "*Tembilahan Kota Ibadah*". Walaupun Kota "Ibadah" merupakan sebuah singkatan dari kata Indah, Bersih, Aman, Damai Harmonis namun kata ibadah mencerminkan masyarakat yang religius. Di kabupaten INHIL hanya memiliki 1 gereja, 3 klenteng dan 6 vihara.² Sehingga dapat

¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Perubahan RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018*, (Tembilahan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016) Hlm. II-1.

² Data Badan Pusat Statistik Indragiri Hilir, "Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir 2016", dikutip dari <https://inhilkab.bps.go.id/frontend/linkTabelStatistik/view/id/292>, diakses pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017. Pukul 10.16 WIB.

ditarik kesimpulan bahwa masyarakat dan yang menjabat di pemerintahan mayoritas Muslim.

B. Kondisi Pemerintahan dan Sosial Ekonomi di Indragiri Hilir

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan program yang sesuai dengan daerahnya dan melakukan banyak hal untuk mengembangkan daerah, tentunya setiap daerah memiliki kelebihan tersendiri baik dari alam maupun dari masyarakatnya.

Adapun penelitian sebelumnya mengenai modal sosial yang dikemukakan, bahwa modal sosial yang ada di subjek penelitian berpengaruh terhadap perilaku kewirausahaan.³ Sehingga penelitian ini bisa dijadikan acuan karena modal social yang baik dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan perilaku kewirausahaan sebagai mana dalam penelitian sebelumnya. Sedangkan di Indragiri Hilir perilaku kewirausahaan belum terlalu banyak digeluti oleh masyarakat.

Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Susunan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir periode 2014–2019 terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Sejak November 2014, Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh Drs. H. M. Wardan, MP sebagai Bupati Kabupaten Indragiri Hilir dan Wakil Bupati adalah Rosman Malomo, B.Sc. Periode kepemimpinan 2014 – 2018.⁴

Penghasilan utama penduduk didaerah kabupaten Indragiri Hilir berasal dari perkebunan dan pertanian. Hal ini didukung karena secara umum tanah di kabupaten Indragiri Hilir memiliki dua golongan tanah mineral dan tanah organic. Jika dilihat dari lapangan usahanya, penduduk Kabupaten ini sebagian besar bekerja disektor pertanian dan perkebunan. Pekerja disektor pertanian mencapai 79,31 persen , disektor perdagangan sebesar 6,31 persen, industry 6,02 persen, jasa masyarakat,

³ Erwin Thobias, A.K. Tungka, J.J Rogahang. dkk. "Pengaruh Modal Sosial Terhadap Perilaku Kewirausahaan", *Journal Acta Diurna*, Edisi April 2013, hlm. 2.

⁴ Badan Pusta Statistik Indragiri Hilir, *Katalog Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2016*, (Tembilahan: BPS Inhil, 2016), hlm. 18.

social dan perorangan 5,21 persen, dan lainnya (pertambangan, listrik, gas dan air minum, kontruksi, transportasi serta lembaga keuangan) hanya 3.15 persen.⁵

Potensi luasan dan produksi kelapa di Indragiri Hilir terbesar didunia namun belum mampu untuk dikembangkan secara optimal untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Lebih kurang 432 ribu hektar perkebunan kelapa dimiliki kabupaten yang berjuluk negeri seribu parit.⁶ Produk dari hasil perkebunan petani tidak dikelola sehingga delama yang terjadi produk pertanian mengalami kelemahan dalam persaingan. Kurangnya perhatian pemerintah mengakibatkan harga jual untuk produk kelapa tanpa pengolahan milik masyarakat terus berfluktuatif dengan trend menurun, sehingga sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat Indragiri Hilir. Hal ini tentulah sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat jika tidak ditangani secara cepat tanggap mengingat masyarakat Indragiri Hilir sendiri merupakan masyarakat yang mayoritas bekerja di perkebunan.

Sedangkan kondisi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang merupakan indicator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Secara makro selama periode 2011-2015 terjadi peningkatan kemakmuran dikabupaten INHIL bahkan pertumbuhan perkapitnaya sebesar 8.59% per tahun lebih tinggi dari pendapatan per kapita provinsi Riau yang justru menurun.⁷ Permasalahan apakah pertumbuhan ini riil dilapangan mengalami pertumbuhan atau hanya pertumbuhan yang semu.

Kriminalitas di suatu daerah juga mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Secara teori dinyatakan bahwa factor penyebab seseorang melakukan tindak criminal antara lain (i) kemiskinan, (ii) kesempatan, (iii) kehendak bebas, keputusan yang hedonistic dan kegagalan dalam melakukan kontrak social, (iv) sifat-sifat anti-sosial bawaan, dan (v) hukuman kepada pelaku criminal yang tidak proporrional.⁸ Pada periode 2011-2014 jumlah tindakan criminal di kabupaten Indragiri Hilir memiliki *trend fluktuatif* menurun. Dari bebarapa informan disebutkan bahwa, kejahatan yang banyak terjadi dan agak susah untuk dibendung adalah penggunaan obat-obat terlarang dan juga penggunaan lem yang banyak digunakan anak-anak.

⁵ *Data Statistik Sektoral Kabupaten Indragiri Hilir 2013*, (Tembilahan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2014), hlm. 17.

⁶ Ikhwanul Rubby, "Sistem Resi gudang jadi cara kabupaten Indragiri Hilir selamatkan perkebunan kelapa". *Tribun Pekanbaru.com*, dikutip dari <http://pekanbaru.tribunnews.com/2016/03/19/sistem-resi-gudang-jadi-cara-kabupaten-indragiri-hilir-selamatkan-perkebunan-kelapa?page=all>, diakses pada hari Selasa 29 November 2017.

⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016. *Perubahan RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018*. (Tembilahan: Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir), hlm. II-42.

⁸ *Ibid.*, hlm. II-41.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia merupakan data strategis karena sebagai ukuran pemerintah juga digunakan dalam menentukan Dana Alokasi Umum. IPM INHIL pada 2014 lebih rendah dibanding dengan IPM Provinsi Riau. Sedangkan untuk angka harapan hidup kabupaten Indragiri Hilir dibandingkan dengan harapan hidup Indragiri hulu dan Provinsi Riau relative lebih rendah, hal ini disebabkan kualitas sanitasi lingkungan baik karena factor alam maupun pembangunan yang masih terbatas serta pembiayaan pembangunan kesehatan yang juga terbatas.⁹

C. Potret Pembangunan Sosial Ekonomi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Potret pembangunan sosial dan ekonomi daerah Indragiri Hilir yakni memaparkan pembangunan sosial ekonomi yang telah dilakukan, yang akan dilakukan dan yang sudah dilakukan dari tahun 2011 hingga 2017 yang mana telah terjadi 2 kali pemerintahan dari Bupati sebelumnya hingga pemerintahan sekarang yakni pengangkatan bupati baru sejak 2014. Penulis menganggap bahwa pentingnya mengukur dan melihat pembangunan sosial ekonomi di daerah ini karena keunikan daerah Indragiri Hilir.

Pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial.¹⁰ Dalam pembangunan social, ekonomi sangat berperan secara beriringan sehingga pembangunan social yang baik tentu juga akan diikuti dengan pembangunan ekonomi yang baik. Pembangunan social ekonomi melibatkan seluruh masyarakat yang bermukim di daerah atau wilayah tersebut karena masing-masing elemen mengambil peran dan memiliki porsi untuk kemajuan daerah.

Pembangunan sosial ekonomi dalam suatu wilayah merupakan bagian sangat urgen untuk menentukan masa depan daerah. Dalam Islam aktivitas pembangunan sosio ekonomi yang dirancang dari masa ke masa bagi kebajikan pembangunan ekonomi ummah dan kepentingan agama Islam karena perbuatan ini Allah SWT akan menjadikannya sebagai amal jariyah. Namun juga bisa menjadi suatu dosa ketika amanah yang diberikan tidak dijalankan dengan baik.

⁹ *Ibid.*, hlm. II-43 – II-44.

¹⁰ Romi Sukma, "Strategi Pembangunan Sosial: Upaya Pengentasan Masalah Kemiskina," dikutip dari <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/6010>, diakses pada hari Sabtu 8 April 2017 jam 12.30 WIB.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Artinya: jikalau sekiranya penduduk negri-negri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustkan (ayat-ayat kami), maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Al-A'raf: 96).¹¹

Allah SWT menerangkan dalam ayat ini, bahwa seandainya penduduk Mekkah dan yang berada disekitarnya serta umat manusia seluruhnya, beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terakhir, yaitu nabi Muhammad SAW dan seandainya mereka bertakwa kepada Allah sehingga mereka menjauhkan diri dari segala yang dilarangnya, seperti kemusyrikan dan berbuat kerusakan di bumi, niscaya Allah akan melimpahkan kepada mereka kebaikan dan keberkatan yang banyak, baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi.

Nikmat yang datang dari langit, misalnya hujan yang menyirami dan menyuburkan bumi, yang kesemuanya sangat diperlukan oleh manusia. Disamping itu mereka akan memperoleh ilmu pengetahuan yang banyak, serta kemampuan untuk memahami Sunatullah yang berlaku di alam, sehingga mereka mampu menghubungkan antara sebab dan akibat dan dengan demikian mereka akan dapat membina kehidupan yang baik, serta menghindarkan malapetaka yang menimpa umat yang ingkar kepada Allah dan tidak mensyukuri nikmat dan karunia-Nya.¹²

Penafsiran dari ayat Al-Quran diatas bahwa kejahatan manusia yang sering dilakukan yakni meyelewengkan amanah yang telah diberikan, membuat kerusakan dengan melakukan tindakan yang mengganggu manusia lain misalnya; korupsi, pencurian uang, merusak lingkungan masyarakat misalnya pembakaran lahan yang berakibat bagi kesehatan masyarakat dan tumbuh-tumbuhan akan rusak dan tidak bisa memberikan kebaikan bagi manusia. Tiga hal yang dapat penulis simpulkan dari penafsiran diatas bahwa Ekonomi (perkebunan dan peternakan), kesehatan dan juga pendidikan merupakan hal yang perlu dijaga dalam bentuk mensyukuri nikmat Allah dan menghindari mala petaka dengan menjaga alam.

Apabila masyarakat mendapat kemudahan menerima Dana kesehatan, pendidikan dan pelatihan *skill*, maka dari sudut kemanusiaan mereka juga telah membangun suatu peradaban karena apabila mereka sehat, terdidik serta mempunyai keahlian, Akan membuka peluang untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga

¹¹ al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid III Juz 7-8-9. Naskah Asli Milik Depertemen Agama Republik Indonesia, (Percetakan UII: Yogyakarta, tanpa tahun), hlm. 510.

¹² *Ibid.*, hlm. 511-512.

mereka.¹³ Dimana kebutuhan dunia kerja yang semakin hari semakin meningkat kualifikasi *skill*, tingkat pendidikan dan *attitude* kerja. Sebagaimana dalam Hadis Riwayat Bukhari:

إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

“... Apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada seseorang yang bukan ahli di bidangnya, maka tunggulah kehancurannya (HR. Bukhari)”.¹⁴

Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang salah satu pertanda akan datangnya hari kiamat adalah bilamana amanah atau kepercayaan diserahkan bukan pada ahlinya. Manusia memiliki keahlian yang berbeda-beda. Idealnya seorang manusia harus mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Jika manusia melakukan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengannya maka pekerjaan tersebut akan berantakan.¹⁵ Dari hadis ini dapat dilihat bahwa jauh hari sebelum dikenal istilah *professional*, Islam sudah menyuruh setiap hambanya bekerja dengan *professional*. Individu yang *professional* tentulah akan berdampak juga bagi pembangunan daerah secara *social* dan *ekonomi* apabila melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Didalam lembaga pemerintahan juga sangat dituntut pekerja yang profesional sehingga pelayanan yang diberikan akan maksimal.

Penelitian yang di lakukan di Kabupaten Indragiri Hilir, terkait bagaimana pemerintah dan pejabat daerah mengelola kebijakan fiskal dalam program pembangunan *social* *ekonomi* masyarakat di daerah kabupaten Indragiri Hilir. Namun realita yang terjadi dalam masyarakat yang merasakan kebijakan fiskal banyak keluhan terkait pembangunan *social* *ekonomi* di Inhil terutama terkait Infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah. Infrastruktur yang masih sangat minim juga dikarenakan Indragiri Hilir termasuk wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) Walaupun *ekonomi* daerah dan masyarakat Indragiri Hilir menurut Informan tidak mengalami penurunan dan mulai memiliki kehidupan *social* yang baik, namun sarana dan prasarana belum tercukupi. Akses masyarakat untuk menuju desa, kecamatan dan kabupaten lain sangat sulit. Terbukti dari transportasi yang

¹³ Asmak Ab Rahman. “Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia”. *Shariah Journal*, Vol. 17, No. 1 (2009) 113-152. Academy of Islamic Studies, University of Malaya.

¹⁴ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Faathul Baari Syarah Shahih Al- Bukhari*, alih Bahasa Ghazirah Abdi Ummah, Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 264-265.

¹⁵ Ahmad Multazam, “Hadis tentang Amanah”, <https://multazam-einstein.blogspot.co.id/2013/03/hadis-tentang-amanah.html>, diakses pada Selasa tanggal 28 November 2017, pukul 07.20 WIB.

banyak digunakan masyarakat tidak memiliki perlengkapan yang *safety* juga beberapa transportasi dinilai belum memenuhi standar sebagai transportasi umum.

Pembangunan social ekonomi juga sangat ditentukan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk Realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp1,82 triliun Bila dibandingkan dengan Belanja Daerah dan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1,71 triliun dan mengalami defisit sebesar Rp142.371.009.722,25.¹⁶ Namun dari wawancara dari pihak Badan Perencanaan Pembangunan daerah bahwa deficit anggaran selalu terjadi walaupun untuk tahun-tahun kebelakang mulai mengalami penurunan dan realisasi pembangunan daerah sudah mulai mengarah kerah yang lebih baik. Bukan dalam pemarkan data angka-angka saja namun juga perlu realisasi dalam bentuk fakta di masyarakat.

Padaحال pembangunan social ekonomi seharusnya saling meningkat bersamaan, jika salah satu mengalami kemerosotan atau *stagnan* maka pembangunan social ekonomi ini belum bisa dikatakan adanya pertumbuhan yang baik. Abdul Mannan sendiri memberikan spesifikasi terkait Pembangunan ekonomi social menurut Abdul Mannan yakni pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat Muslim berdasarkan prinsip menggembarakan (*at-targib*) yang terdapat didalam al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga batasan sejahtera harus merata tidak hanya masyarakat yang berada di kota tetapi juga masyarakat yang tinggal didesa-desa terpencil. Keluhan terkait prasana yang kurang disampaikan oleh informan;

“Pernyataan Ibu Mogomulyo (Asli Jawa Barat pernah tinggal di Jogja selama 4 tahun dan sekarang merupakan warga Desa di Indragiri Hilir): *Saya datang ke INHIL tahun 1990an Setelah sampai disini ya ampun desa banget-banget saya belum pernah lihat desa seterpencil ini di Jawa Barat dan Jogja. Saya mengira Riau itu dalam benak saya sama dengan pembangunan di singapura karena pada tahun 1990an riau pernah menjadi daerah yang menyumbang APBN terbesar. Lah pasnyampe saya kaget! Pembangunannya sampai sekarangpun cenderung lambat, malah pembangunan provinsi sebelah seperti kabupaten Jambi perbatasannya dengan daerah kita malah lebih bagus, pelabuhannya, jalannya...*”¹⁷

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) daerah Pandeglang didalam jurnal penelitian sebelumnya menyatakan bahwa “Penyebab suatu desa tertinggal sangat banyak, diantaranya kurangnya potensi sumber daya alam dan sarana prasarana”.¹⁸ Daerah Indragiri Hilir sendiri Sumber Daya Alam sangat

¹⁶ <http://senuju.com/mobile/detailberita/829/berikut-rincian-pendapatan-dan-belanja-daerah-pemkab-inhil-di-apbd-2015>

¹⁷ Wawancara Ibu Mugomulyo, Selaku tenaga pengajar di Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah. Di Kuala Enok pada tanggal 17 Juli 2017.

¹⁸ Yudha Manggala Putra, “Banyak Faktor yang Sebabkan Desa Tertinggal”, *Republika.co.id* dikutip dari http://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/nmum5x, diakses pada Sabtu 24 November 2017, pukul 06:02 WIB.

melimpah karena daerah ini memang sangat baik untuk Agraris. Bahkan Indragiri Hilir merupakan penghasil kelapa Hydro terbesar didunia. Namun terkait sarana dan Prasarana Inhil memang jauh dari kata bagus akses jalan yang banyak mengalami kerusakan, transportasi yang tidak memadai, listrik yang belum merata dan jangka waktu menyalanya sangat rendah, hal ini merupakan permasalahan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat daerah khususnya didesa-desa yang jauh dari ibu kota kabupaten.

Kebijakan fiskal daerah menjadi salah satu ujung tombak pembangunan sosial ekonomi. Dimana dalam kebijakan fiskal pemerintah memiliki dua tujuan:¹⁹

- a) Tujuan yang bersifat ekonomi; (i) menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, (ii) meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, (iii) memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan dalam masyarakat.
- b) Tujuan yang bersifat Sosial dan politik; (i) meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, (ii) menghindari masalah-masalah sosial, keamanan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat, (iii) mewujudkan kestabilan politik.

Lapangan pekerjaan di Indragiri Hilir yang paling banyak terkait perkebunan dan pertanian. Masyarakat Indragiri Hilir merupakan masyarakat yang banyak bekerja di bidang agraris. Sehingga program pembangunan sosial ekonomi yang dilakukan pemerintah menyesuaikan dengan banyak kebutuhan masyarakat. Sangat layak jika program pemerintah mendukung segala sesuatu yang berhubungan dengan agraris. Karena lapangan pekerjaan ini keberadaannya juga dari masyarakat secara turun-temurun. Pemerintah hanya memfasilitasi agar lapangan pekerjaan ini bisa tetap memiliki eksistensi untuk menghidupi ekonomi masyarakat. Misalnya pengadaan alat berat untuk perbaikan perkebunan masyarakat yang mana pemerintah menyediakan 1 alat *excavator* besar untuk 1 kecamatan. Walaupun untuk realitanya penggunaan alat berat ini masyarakat harus tetap mengeluarkan dana untuk pembayaran isi ulang bahan bakar.

“Strategi lain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat karena masyarakat kita mayoritas berkebun sehingga trio tata air dimana setiap kecamatan diberi alat untuk bisa mengerok 1 kecamatan 1 eksapator. Walaupun untuk dananya dari pemerintah masyarakat juga banyak yang melakukan swadaya untuk mengoperasikan mesin tersebut baik pengerukan jalan maupun kebun. Sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan renovasi kebun karena di Indonesia sendiri Inhil merupakan penghasil kelapa hydro terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Nah maka dari itu kemarin telah dilakukan festival kelapa internasinal. Sehingga kelapa-kelapa yang dulu hanya bisa dibuat

¹⁹ Sukirno dalam Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 254

*minyak sekarang bisa di inovasi atau dikreasikan di buat dalam minuman kemasan dan lain lain serta produk kreativitas lainnya.*²⁰

Standar yang di tampilkan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) pada pembahasan terkait kondisi ekonomi Indragiri Hilir mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan dari segi pendidikan, pendapatan masyarakat, kesejahteraan, kesehatan dan kualitas hidup. Namun kenyataan Informan yang dari masyarakat umum banyak menyampaikan ketidak puasannya atas kualitas pembangunan di daerah Indragiri Hilir yang lamban. Dari data yang diperoleh masyarakat Indragiri Hilir taraf kemakmurannya meningkat dan secara fakta dan hasil dari lapangan banyaknya keluhan masyarakat menjadi alasan kuat hal ini belum terpenuhi dengan baik.

Sebagaimana dalam teori Mannan dalam pembangunan sosial ekonomi bukan hanya kriteria objektif atau kesejahteraan yang dapat diukur dengan uang tetapi ada kriteria subjektif yang harus diperhatikan yakni segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah kitab suci al-Qur'an dan sunnah. Aktifitas ekonomi bisa menerapkan nilai-nilai, norma, etika atau dengan kata lain akhlak yang baik dalam berproduksi.²¹ Artinya bahwa produksi yang dilakukan didalam daerah tidak boleh merugikan masyarakat atau hanya dinikmati segelintiran orang saja. Wawancara dengan Andrismar selaku sekretaris Badan Perencanaan dan pembangunan daerah hal ini terus diusahakan untuk peningkatan yang signifikan dalam hal ekonomi dan pembangunan infrastruktur namun butuh proses dan kesabaran dari masyarakat.

Potensi pengembangan wilayah kabupaten Indragiri Hilir ada disektor pertanian yang diperkuat dengan sector industry pengolahan walaupun sector pengolahan di Indragiri Hilir belum bisa menampung semua hasil perkebunan. Wilayah kabupaten Indragiri Hilir yang sebagian besar wilayah rawa pasang surut dan perairan sejak awal mempunyai keunggulan komparatif antara lain pada tanaman kelapa, ikan dan kelapa sawit. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan wilayah dengan tanaman kelapa terluas di provinsi Riau dan Indonesia. Sehingga bulan September lalu di kabupaten Indragiri Hilir terselenggara festival kelapa Internasional yang diadakan di kota Tembilahan Inhil Riau. Harapan dari pelaksanaan acar ini sebagai ajang agar hasil daerah bisa bersinergi baik terkait permodalan untuk mengembangkan atau sebagai ajang untuk mengenalkan daerah.

“Menurut Said Syarifuddin; Kita ketahui bahwa daerah kita mayoritas penduduknya merupakan berprofesi sebagai pekebun/ petani, sehingga program-program pemerintah selalu mengedepankan untuk perbaikan dalam meningkatkan hasil perkebunan. Festival kelapa internasional akan

²⁰ Wawancara dengan Andrismar selaku Sekretaris BAPPEDA Indragiri Hilir di Tembilahan pada Tanggal 4 oktober 2017.

²¹ M. Abdul Manna, *Islamic Economic Theory and Practice*, alih Bahasa M. Nastangin, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Cet. 1 (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 1997), Hlm. 54-55.

dilaksanakan pada bulan september tahun ini, untuk mendukung program pemerintah dan memberikan kesempatan untuk masyarakat, karena daerah yang memiliki kelapa hydro terbesar di dunia yakni Inhil merupakan salah satu yang memiliki kelapa hydro. Namun saat ini masyarakat dihadapkan dengan masalah kerusakan kebun kelapa. Sehingga pemerintah sudah melakukan program-program untuk menanggulangi kerusakan kebun kelapa di inhil."²²

Wawancara yang melibatkan SEKDA inhil ini tentunya memberikan informasi lebih untuk peneliti. Sekertaris daerah memiliki kewenangan membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten. Sehingga pada penelitian ini peneliti hanya di perkenankan untuk mewawancarai SEKDA Inhil yang juga ikut terlibat Banyak dalam kinerja Bupati dan Wakil Bupati. Ada angin segar untuk produk pertanian kelapa di Indragiri Hilir karena pemerintah sudah berusaha konsen melakukan inovasi terkait produk perkebunan.

Melihat fakta dilapangan banyaknya keluhan dari masyarakat terkait harga perkebunan yang sering menurun secara fluktuatif

*"...Sering kali rasanya kesal kalau hasil kebun sudah di panen kenapa buru-buru dipanen atau di mundurkan jadwal panen karena harganya lagi kurang bagus, setelah uda dengar kabar harganya lagi bagus buru-buru dipanen setelah habis panen harga anjlok lagi mau ditahan takut hasilnya kelapa atau pinang rusak nanti malah gak ada harganya mau di jual uda turun harganya jadi kadang merasa kerja sama hasilnya kurang maksimal"*²³

Dampak social ekonomi yang akan terjadi jika harga yang terus mengalami penurunan yakni; mata pencarian penduduk tidak berkembang, bahkan pekerjaan dari berkebun dikarenakan harga yang sering mengalami fluktuasi membuat banyak masyarakat yang berkebun mengalami banyak gejala ekonomi didalam kehidupan. Pemerintah melakukan penanggulangan terhadap perkebunan namun kerjasama yang dibangun dengan pihak swasta belum terlalu gencar sehingga pengembangan produk pertanian belum terlihat hasilnya untuk saat ini.

Sedangkan terkait kesehatan masyarakat di Indragiri Hilir sudah sangat baik untuk saat ini, walaupun di beberapa desa sarana kesehatan masih terbatas dan untuk kasus-kasus gawat darurat sering telat ditangani karena akses kondisi infrastruktur dan tenaga kesehatan yang terbatas namun dibandingkan tahun 2015 di bidang kesehatan Kabupaten Inhil berada di posisi paling atas untuk kasus kematian ibu dan bayi. "Salah satu penyebabnya adalah masalah dan kondisi infrastruktur yang kurang

²² Wawancara dengan Said Syarifuddin, Selaku SEKDA Kab. Indragiri Hilir, di Tembilahan, 19 Juli 2017.

²³ Wawancara dengan Syarifuddin sebagai masyarakat yang memiliki kebun dan bekerja sebagai petani di Benteng Inhil tanggal 8 Juli 2017.

memadai," tutur Bupati Wardan.²⁴ Sehingga permasalahan di daerah Indragiri Hilir lebih banyak diakibatkan oleh infrastruktur. Permasalahan ini tentulah sangat memicu permasalahan lain di daerah.

Selama periode 2006-2014, jumlah penduduk miskin di kabupaten Indragiri Hilir telah menurun secara signifikan yaitu dari 14.85% di tahun 2006 menjadi 7.51% tahun 2014 dan meningkat di tahun 2015 menjadi 7,79%. Pertumbuhan ini sangat baik namun yang menjadi alasan keraguan peneliti bahwa keluhan masyarakat. Melalui wawancara terkait ekonomi dan infrastruktur daerah sehingga peneliti menemukan fakta yang berbeda dengan angka-angka yang sering dipaparkan dalam data. Lebih terlihat ada pertumbuhan yang semu, sedangkan secara psikis masyarakat belum banyak merasakan pertumbuhan yang memadai.

Tingkat pendidikan masyarakat Indragiri Hilir rata-rata sudah melek huruf yakni berkisar 80%. Bahkan di Inhil sendiri sudah ada program Magrib mengaji, tujuan dari program ini untuk meningkatkan minat mengaji dan kemampuan membaca al-Qur'an belum lagi program dari ibu Bupati INHIL yang program kerjanya terkait 1 desa 1 PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Adanya dua universitas swasta di kabupaten Indragiri Hilir juga yang mendukung pernah adanya program satu rumah satu sarjana. Walaupun untuk realisasinya belum tetapi masyarakat Inhil sudah sangat di permudah untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dengan adanya beberapa kampus swasta di daerah, diluar tetap adanya ketimpangan social terkait lapangan kerja yang masih sangat terbatas.

*"... dengan adanya kampus di Indragiri Hilir masyarakat sudah bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi yang aksesnya dekat dengan kampung dan bisa ditempuh dengan hitungan jam bisa berkuliah dan sambil membantu orang tuanya berkebun dikampungnya..."*²⁵

Kesulitan yang dirasakan masyarakat terkait infrastruktur dan merembet ke permasalahan ekonomi dll, tentunya harus diatasi oleh pemerintah sebagai pemberi kebijakan dalam suatu daerah karena masyarakat yang hidup dalam kesulitan ataupun kemiskinan sangat dekat dengan kekufuran sebagaimana As-Siba'I berpendapat bahwa Islam tidak membenarkan kemiskinan, dengan mengacu kepada sabda Nabi Muhammad SAW; *"Kemiskinan hampir-hampir mendekatkan orang kepada pengingkaran terhadap Islam (kekufuran)"*.²⁶ Sehingga dalam bermasyarakat sebagai orang muslim tentulah harus menjaga muslim lain untuk

²⁴ Tanpa Nama, 2015, "Wardan: Masalah Kesehatan di Inhil Juga Disebabkan Kondisi Infrastruktur" di kutip dari <http://www.inhilklik.com/news/detail/2381/wardan-masah-kesehatan-di-inhil-juga>, diakses pada Senin tanggal 4 Desember 2017 jam 13.00 WIB.

²⁵ Wawancara dengan Masykur Hz, Selaku Kasubbid Sumber Daya Alam dan Pertanian BAPPEDA Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan, 4 oktober 2017.

²⁶ Nur Rianto Arif, 2015, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm 136.

tidak terjerumus dengan kekufuran. Sebagaimana di sebutkan bahwa pemimpin terbaik adalah yang mengamalkan QS. Al-Anbiya;

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah, (QS. Al-Anbiya (21):73)²⁷

Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini tambahan karunianya kepada Ibrahim, selain karunia yang telah diterangkan pada ayat yang lalu, yaitu bahwa keturunan Ibrahim itu tidak hanya merupakan orang-orang yang shaleh, bahkan juga menjadi imam atau pemimpin umat yang mengajak orang untuk menerima dan melaksanakan agama Allah, dan mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat, berdasarkan perintah dan Izin Allah.

Nabi Ibrahim As yang diberi gelar *Kalilullah* (Teman Akrab Tuhan) dan banyak dinatara nabi-nabi yang datang sesudahnya adalah dari keturunannya. Karena keturunannya banyak menjadi nabi mereka memperoleh wahyu berisi ajaran-ajaran dan petunjuk kearah bermacam-macam kebajikan. Disamping itu Allah SWT juga mewahyukan kepada mereka agar mendirikan shalat dan membayar zakat. Kedua macam ibadah ini disebutkan Allah secara khusus, sebab ibadah shalat memiliki keistimewaan sebagai ibadah jasmani yang amat mulia, sedangkan zakat mempunyai keistimewaan sebagai ibadah harta yang paling utama, lebih-lebih bila diingat bahwa harta benda sangat penting kedudukannya dalam kehidupan manusia.²⁸

Seseorang yang telah dijadikan pemimpin tentulah merupakan orang terbaik, begitupun pemimpin daerah. Masyarakat telah mengamanahkan hartanya kepada pemerintah yang menjabat untuk dikelola secara baik. Memberi petunjuk dengan perintah kami Allah memerintahkan ummatnya untuk berlaku adil begitupun dengan pemimpin berlaku adil merupakan cara yang paling baik dalam kepemimpinan dan berzakat yakni memperhatikan kehidupan masyarakatnya dengan bantuan dari dana-dana social yang tepat sasaran. Hal ini akan memperkecil *gap* yang selama ini banyak terjadi dalam masyarakat dan akan mengurangi kriminalitas dalam suatu daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan

²⁷ al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid VI Juz 16-17-18, Naskah Asli Milik Depertemen Agama Republik Indonesia, (Percetakan UII: Yogyakarta, tanpa tahun), hlm. 302

²⁸ *Ibid*, Hlm. 303-304.

membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.²⁹ Secara pribadi melihat kondisi ekonomi di Indragiri Hilir masyarakat sudah sangat kerja keras dalam memenuhi ekonomi keseharian mereka, lapangan pekerjaanpun didapat dari turun temurun yang terus dikembangkan perkebunan yang dimiliki tanpa melibatkan pemerintah, sehingga pihak swasta juga tidak banyak dilibatkan dalam perkebunan daerah. Seharusnya dengan sumber alam yang melimpah dan harga bahan mentah yang fluktuatif turun bisa dilakukan inovasi produk untuk meningkatkan nilai ekonomis dengan bersinergi antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta sehingga memberikan peluang kerja bagi masyarakat.

Sebuah penelitian dari Caska dan RM. Riadi juga memaparkan bahwa Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi/daerah yang cukup kaya baik dengan hasil bumi berupa migas dan hasil perkebunan berupa kelapa sawit, nenas, kelapa, karet dan lainnya. Akan tetapi masyarakat masih belum puas dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masing-masing daerah. Hal ini tentu saja akan menimbulkan gejolak bagi daerah yang masyarakat tidak puas.³⁰ Jika tidak ada pengembangan produk ini akan menjadi masalah baru karena perbedaan kebutuhan yang semakin berkembang.

Ketimpangan yang terjadi di Indragiri Hilir memang tidak terlalu mengkhawatirkan namun distribusi pendapatan masyarakat yang dipersulit karena infrastruktur jalan sangat mempengaruhi pekerjaan maupun aktivitas masyarakat daerah. Padahal Otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan Akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah. Kenyataannya asumsi yang berkembang di masyarakat otonomi daerah menghadirkan masalah baru dalam pembangunan ekonomi dan social, karena pengalokasian yang kadang kurang tepat sasaran dan dinikmati oleh oknum birokrasi tertentu.

Kondisi sosial ekonomi yang buruk ketika pendidikan masyarakat rendah, peluang kerja rendah, dan berpengaruh pada pendapatan masyarakat yang juga ikut rendah serta kesehatan masyarakat terganggu karena kemampuan untuk memenuhi kehidupan yang semakin sulit, akan memunculkan berbagai macam penyakit fisik dan psikis. Tentulah hal ini akan semakin hari menjadi permasalahan yang mengganggu kestabilan suatu daerah. Hal yang paling kecil dalam kehidupan sosial

²⁹ Lincoln Arsyad, 2011. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Kedua*. (Yogyakarta: BPFE), hlm. 108

³⁰ Caska dan RM. Riadi, *Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Riau*, (Pekanbaru: Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat FKIP UR),

masyarakat dilihat dari kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Data dari kementerian agama Indragiri Hilir memaparkan bahwa jumlah perceraian di kabupaten Inhil berkisar 830 kasus di tahun 2016.³¹ Data tersebut dapat diklasifikasikan alasan penyebab perceraian, alasan ekonomi menempati posisi ke empat terbanyak untuk kasus perceraian di tahun 2016 yang berjumlah 78 kasus. Adanya hal tersebut sangatlah mengawatirkan dan memprihatinkan sehingga kasus-kasus seperti ini bisa terminimalisir dengan adanya langkah untuk memperbaiki ekonomi masyarakat.

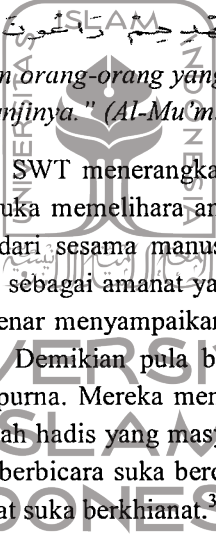
Terkait masalah-masalah sosial, keamanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat di Indragiri Hilir. Selama periode 2011 – 2014, jumlah tindak kriminal di kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif menurun. Secara keseluruhan angka kriminalitas di kabupaten Indragiri Hilir menurun yaitu dari terdapat 1 kejadian pada untuk setiap 1.113 penduduk menjadi 1 kejadian kriminal pada setiap 1.824 penduduk.

Tabel 1 Angka kriminalitas di kabupaten INHIL tahun 2011 – 2014

No.	Jenis Kriminal	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kejahatan konvensional	535,00	337,00	251,00	261,00	300,00
2	Kejahatan transnasional	46,00	56,00	55,00	261,00	300,00
3	Kejahatan Terhadap kekayaan negara	14,00	8,00	2,00	80,00	59,00
4	Kejahatan implikasi kontijensi	-	-	-	-	-
5	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	595,00	401,00	308,00	350,00	380,00
6	Jumlah penduduk	662.305,00	674.001,50	687.818,00	61.107,00	693.445,00
7	Angka kriminalitas	1.113,12	1.680,80	2.233,18	1.974,59	1.824,86

³¹ Data Badan Pusat Statistik yang diapat dari kementerian Agama 2016.

Kejahatan konvensional adalah kejahatan yang paling sering terjadi diikuti dengan kejahatan transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara. Inhil sendiri merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat mumpuni dan dikelola oleh masyarakat sendiri sehingga investasi perkebunan di inhil masih di kuasi masyarakat local. Namun menurut penelitian Caska dan RM.Riadi Untuk daerah atau kabupaten yang maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah pada Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.³² Sehingga peneliti berasumsi banyaknya kendala ekonomi dan pembangunan social di Indragiri Hilir diakibatkan penyelewengan dana-dana daerah yang seharusnya untuk pembangunan daerah.



 وَأَقِيمُوا صُومَ بِلْمَاتَاتِيْمِ وَعَهْدِيْمِ ذُرْعُوْبِ

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya." (Al-Mu'minin: 8)³³

Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan sifat keenam dari orang mukmin yang beruntung itu, ialah suka memelihara amanat-amanat yang dipikulnya, baik dari Allah SWT ataupun dari sesama manusia, yaitu bilamana kepada mereka dititipkan barang atau uang sebagai amanat yang harus disampaikan kepada orang lain, maka mereka benar-benar menyampaikan amanat itu sebagaimana mestinya, dan tidak berbuat khianat. Demikian pula bila mereka mengadakan perjanjian, memenuhinya dengan sempurna. Mereka menjauhkan diri dari sifat kemunafikan seperti tersebut dalam sebuah hadis yang masyhur, yang menyatakan, tanda orang munafik itu ada tiga yaitu berbicara suka berdusta, jika menjanjikan sesuatu suka menyalahi dan diberi amanat suka berkhianat.³⁴

Perlu adanya kesadaran dari pejabat daerah atau bahkan Negara khususnya untuk Indragiri Hilir dimana kejahatan terhadap kekayaan daerah merupakan posisi yang tinggi, hal ini sangatlah melukai masyarakat jika tidak dilakukan perubahan, sehingga penyelewengan dana-dana yang untuk rakyat bisa digunakan untuk pembangunan daerah yang masih dalam keadaan memprihatinkan dan banyak terjadi deficit anggaran yang berlanjut terbengkalainya proyek-proyek pembangunan.

³² Caska dan RM. Riadi, *Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Riau*, (Pekanbaru: Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat FKIP UR), hlm. 6

³³ al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid VI Juz 16-17-18, Naskah Asli Milik Depertemen Agama Republik Indonesia, (Percetakan UII: Yogyakarta, tanpa tahun), hlm. 494

³⁴ *Ibid*, hlm. 496

Analisis penelitipun sedikit di bantah oleh salah seorang pegawai pemerintahan yang mejelaskan bahwa deficit anggaran untuk pembangunan daerah dikarenakan struktur pertanahan dan daerah inhil yang agak unik dibandingkan daerah lain. Dimana struktur tanah gambut dan rawa sehingga proses pembangunan membutuhkan anggaran dana yang lebih besar dan proses yang lebih lama.

“Pada dasarnya usaha untuk melakukan pembangunan daerah terus dilakukan untuk jalan-jalan lintas provinsi pemerintah juga melakukan banyak lobi ke pusat untuk pelaksanaan pembangunannya, walaupun yang sulitnya untuk di daerah Indragiri Hilir, pemerintah sering mengalami defisit anggaran jadi banyak terhambatnya karena alokasi dana yang masih kurang. Sedangkan untuk kerusakan yang sangat cepat terjadi karena struktur tanah di Indragiri Hilir memang banyak tanah gambut.”³⁵

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas, wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia. Kemampuan ekonomi daerah dianalisis menggunakan indicator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran pemerintah non pangan per kapita, produktivitas total daerah dan nilai tukar petani. Fasilitas wilayah/ Infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah diperlukankedian seperti, jalan, jembatan, sarana tranportasi, listrik, air bersih dll. Lengkapnya fasilitas akan menjadi factor pendorong investor untuk menanamkan modalnya. Iklim investasi akan lebih baik jika kondisi daerah kondusif sehingga diperlukan kepastian dan penegakan hukum yang didukung oleh elemen masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.³⁶ Hasil dari penelitian lapangan yang ditemui bahwa beberapa Instansi yang seharusnya bersinergi dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat melakukan tindakan yang malah mempersulit masyarakat. Hal ini dirasakan langsung oleh peneliti ketika melakukan penelitian di Instansi Sosial Indragiri Hilir yang mana peneliti telah melampirkan Surat penelitian dan surat dari Badan Pemerintahan dan Politik Daerah namun kenyataan di lapangan dari oknum Instansi tidak kooperatif ketika peneliti ingin melakukan wawancara.

Ditengah zaman modern yang mana pemerintahan daerah lain telah menyediakan akses data-data online yang layak di publis dan mudah untuk diakses, tetapi di Indragiri Hilir beberapa instansi tidak memiliki website bahkan beberapa

³⁵ Wawancara dengan Andrismar, Selaku Sekretaris BAPPEDA Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan, 4 oktober 2017.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, cet. XXI (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 245.

instansi website yang dibutuhkan tidak ada sama sekali. Sehingga penulis berasumsi bahwa instansi Sosial ini memberikan ruang yang sangat sempit dalam pembangunan social masyarakat dari segi intelektual, karena menutup diri dari informasi yang ingin didapatkan untuk pengembangan instansi kedepannya dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Padahal penelitian ini dapat diaplikasikan untuk kemajuan instansi dan terselesaikannya masalah yang mungkin tengah dihadapi.

Potret masalah yang kemudian peneliti dapatkan dari pembangunan social ekonomi di Indragiri Hilir, sebagaimana jabaran diatas bahwa pembangunan infrastruktur dinilai lambat, pendapatan masyarakat tidak mengalami signifikan, iklim bisnis di Indragiri Hilir, tidak berjalan dengan baik dan kurangnya sinergi antara pemerintah daerah dalam menciptakan iklim bisnis yang baik, tingkat pendidikan belum terlalu berkualitas sehingga lulusan dari universitas maupun sekolah-sekolah tinggi belum terserap baik dalam dunia kerja saat ini. Padahal kebijakan fiskal yang baik menyediakan pekerjaan bagi masyarakatnya, memberikan akses infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang memadai serta meningkatnya kehidupan sosial masyarakat.

a. Pembangunan Di Masa Sebelumnya

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan daerah mencakup pendapatan dari penerimaan dan pembiayaan daerah. Oleh karenanya untuk mengetahui kinerja (kapasitas) keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan susunan struktur masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan kabupaten Indragiri Hilir. Maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan kabupaten INHIL tahun 2011-2015. Secara berturut-turut pada sub bagian ini akan dijelaskan tentang kinerja keuangan kabupaten Indragiri Hilir. Mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.³⁷

Pendapatan daerah kabupaten Indragiri Hilir bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen PAD terdiri dari: a) Pajak Daerah, b) Retribusi daerah, c) Hasil

³⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016. *Perubahan RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018*. (Tembilahan: Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir), hlm. III-3.

Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan d) lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah. Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap total PAD diikuti komponen retribusi, PAD yang sah lainnya dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Padahal sumber daya alam untuk perkebunan sangat besar namun sumbangan untuk PAD belum besar saat itu.

Sedangkan belanja daerah lebih diprioritaskan untuk pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Peningkatan tertinggi terdapat pada belanja pegawai yakni 3.35%. Pembiayaan daerah juga meliputi; pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada daerah lain, realisasi proyek pembiayaan pemerintah.

Pembangunan sosial ekonomi dimasa kepemimpinan Bupati dan Wakil bupati yang sebelumnya menargetkan untuk setiap rumah memiliki 1 orang sarjana. Keberadaan salah satu kampus di Indragiri Hilir juga sudah digagas oleh Bupati sebelumnya. Bahkan kampus swasta ini yang diklaim milik pribadi dari bupati sebelumnya memiliki bangunan yang sangat baik didaerah indragiri Hilir serta terletak di jalan yang sangat strategis. Namun bangunan ini belum digunakan untuk aktivitas apapun karena terait izin penggunaan dan persengketaan hak milik antara pemerintah dan Bupati sebelumnya.

Hal ini membuat banyak kerugian untuk kedua belah pihak dan juga masyarakat tidak dapat menikmati fasilitas yang sebenarnya sudah ada. Seharusnya pemerintah dan pihak kampus melakukan diskusi bersama untuk kemudian ditemukan jalan keluar yang tidak merugikan siapapun dengan asas transparansi ke Masyarakat. Dalam wawancara ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) peneliti sempat menanyakan terkait bangunan yang bagus ini permasalahannya seperti apa dan bagaimana bisa bangunan ini menjadi sebuah dilema dalam pembangunan Infrastruktur, bukannya malah memberikan dampak yang baik dan menjadi bangunan yang mubazzir karena tidak digunakan. Namun dari pihak BAPPEDA sendiri tidak mau menjawab hal ini karena satu dan lain hal yang intinya menyatakan bahwa hal ini tidak layak untuk dijawab oleh pihaknya. Bangunan ini masih dicari apakah kepemilikan individu atau milik pemerintah daerah.

Sebagaimana Mannan telah menyusun aturan yang berkaitan dengan kepemilikan individu dalam sistem ekonomi Islam terdiri atas delapan unsur;³⁸ Tidak boleh ada aset yang mengganggu, setiap aset harus dimanfaatkan secara

³⁸ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, alih Bahasa M. Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 65.

terus menerus untuk ukuran daerah Indragiri Hilir gedung yang tidak digunakan ini sangat bagus dan terletak didaerah yang strategis. Penggunaan untuk kegiatan menguntungkan, tidak digunakan gedung ini menurut peneliti pribadi adalah bentuk kesia-siaan dan banyak yang dirugikan dalam hal ini. Padahal untuk universitas sendiri masih kekurangan ruang belayar dan dibandingkan bangunan lain, bangunan yang tidak digunakan adalah bangunan terbaik.

b. Pembangunan Di Masa Sekarang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. selama periode 2010-2015, PDRB harga berlaku tanpa migas di kabupaten Indragiri memiliki trend meningkat yaitu dari Rp. 28.057.9444,7 Juta, meningkat menjadi Rp. 47.842.723,8 Juta dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,26% per tahun. kondisi ini menggambarkan bahwa kemampuan sumber daya ekonomi kabupaten Indragiri Hilir cukup besar dalam menghasilkan barang dan jasa. Namun kenyataannya yakni masyarakat mengeluhkan kesulitan mendapatkan pendapatan tetap. lapangan usaha (sektor) yang berkontribusi besar dalam menghasilkan barang dan jasa di kabupaten Indragiri Hilir adalah pertanian (a), diikuti industri pengolahan (b), perdagangan besar dan eceran (c), Reparasi motor dan mobil (d), konstruksi (e), administrasi pemerintahan (f), pertahanan dan jaminan sosial wajib (g), dan transportasi dan pergudangan (h). lapangan usaha lainnya hanya berkontribusi 1%.

Pembangunan sosial ekonomi di Indragiri Hilir untuk saat ini lebih diutamakan dalam bidang pertanian dan perkebunan Bupati Indragiri Hilir (INHIL) fokus menyelamatkan perkebunan masyarakat. Karena kelapa, pinang, dan padi merupakan komoditas utama yang ada di Indragiri Hilir perlu untuk menjaga stabilitas harga dari komoditas penting didaerah Indragiri Hilir, dimana pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini dibandingkan dari beberapa kabupaten yang produksi daerahnya lebih ke Migas. Kabuten lain malah mengalami minus pertumbuhan ekonominya. Kepemilikan dari kebun yang ada di Indragiri Hilir yang berjumlah 400-an ribu hektar merupakan milik masyarakat Inhil secara pribadi. Schingga perusahaan bukan pengelola utama pada perkebunan dia Indragiri Hilir. Karena 76 persen lebih masyarakat Inhil hidup dan bergantung pada kebun kelapa yang ada di Inhil. Sehingga sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dari hasil perkebunan terus dilakukan untuk meminimalisir dan menghindari keluhan masyarakat misalnya dengan mengusahakan dan membuat

Sistem Resi Gudang hal ini untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat Inhil khususnya.³⁹

Menanggapi paparan pada koran ini menurut Mannan proses produksi adalah kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kesejahteraan ekonomi di masyarakat. Melihat kenyataan dilapangan Indragiri Hilir sendiri belum memiliki produk asli daerah yang dikelola sendiri dan di perjual belikan dalam pasar lokal apalagi bersaing dengan produk daerah lain. Sehingga peneliti berasumsi bahwa pengembangan iklim bisni di Inhil sangat kecil dan belum di jadikan ujung tombak pembangunan daerah. Padahal Teori Mannan bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk dari kebijakan fiskal yang diambil tanpa pertimbangan Agama, moral dan hal-hal mendasar dalam ekonomi dan Islam.

Pembangunan sosial ekonomi di Inhil harus terus di asah menuju ke arah yang lebih baik dan menciptakan kesejahteraan bersama, karena seperti yang diketahui bahwa umat yang hidup dalam kefakiran sangat dekat dengan kekufuran. Indonesia adalah Negara berkembang yang mayoritas penduduknya beragama Muslim, namun hampir setiap tahunnya angka kemiskinan tidak dapat dibendung dan tidak sepadan dengan angka pengentasan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal inilah yang kemudian menimbulkan efek tidak baik dalam kehidupan sosial, maka tidak heran jika kita perhatikan banyaknya ketimpangan social ekonomi yang terjadi di daerah-daerah termasuk di Indragiri Hilir.

Padahal di masa-masa kejayaan Islam, Negara Muslim memiliki peradaban dan ekonomi yang baik. Contohnya saja zakat, ia mampu menjadi Instrumen fiskal yang mumpuni, namun seiring berjalannya waktu peran zakat sebagai pengentas kemiskinan mulai tidak tampak lagi setelah kemunduran Islam. Di mana zakat dipisahkan dari kebijakan fiskal Negara dan tidak menjadi Instrumen kebijakan fiskal, tapi justru menjadi urusan masing-masing pribadi Muslim.⁴⁰ Bagaimana kemudian peranan instrument fiskal di Indonesia mampu mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat serta mampu menciptakan kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip kebijakan fiskal Islam.

³⁹ "Gubri Akui Ekonomi Inhil Stabil", *Posmetro Indragiri*, Edisi; 1.533/V (19 Juli 2017), hlm 1 & 11, kolom 1.

⁴⁰ Andri Tinambunan, "Entas Kemiskinan dengan Zakat sebagai Fiskal Negara". dikutip dari <http://www.acehtrend.co/entas-kemiskinan-dengan-zakat-sebagai-fiskal-negara/>, diakses pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017.

D. Kesesuaian Kebijakan Fiskal di Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kebijakan Fiskal Abdul Mannan Sebagai Solusi Penerapan Pembangunan Social Ekonomi di Indragiri Hilir

Mannan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴¹ Sehingga dengan hal ini kebijakan fiskal Abdul Mannan yang mengedepankan prinsip kebahagiaan bagi masyarakat seharusnya didukung dari infrastruktur dan birokrasi pemerintahan yang baik dalam melayani kebutuhan masyarakat. Namun Infrastruktur di daerah Indragiri hilir masih terbilang sangat lamban pembangunannya, birokrasi pemerintahan di Inhil juga sangat tidak kondusif.

Terkait birokrasi disebabkan karena akses jalan yang sulit dan transportasi yang terbatas sehingga untuk mengurus urusan terkait berkas-berkas yang harus dimiliki sangat sulit dan berbelit-belit. Belum lagi system birokrasi di daerah cenderung bisa dibilang sangat mempersulit masyarakat atau individu yang membutuhkan. Peneliti mengalami langsung terkait birokrasi di salah satu instansi yang membawahi bagian social untuk peneliti mintai informasi dalam penelitian peneliti, namun kenyataan di lapangan dari instansi tersebut tidak kooperatif memberikan informasi dan memberikan banyak alasan untuk mengulur waktu dan bahkan melemahkan posisi peneliti.

Ekonomi Islam adalah perpaduan antara pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukan kewajiban bagi Allah dan masyarakat.⁴² Keterkaitan tujuan ekonomi hampir menyerupai Tujuan kebijakan fiskal yakni untuk mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Tujuan yang paling penting dalam kebijakan fiskal saat ini yakni mempertahankan kesempatan kerja dan stabilitas harga di pasar.

Kenyataan di lapangan terlalu banyak ketimpangan dan perbedaan antara tujuan dan harapan dengan realita yang terjadi. Banyak yang belum sesuai dengan teori-teori fiskal maupun ekonomi secara umum apalagi dengan teori fiskal Islam. Birokrasi jauh dari kata membahagikan bagi masyarakat, dana *corporate social Responsibility* Perusahaan atau lembaga yang mengambil untung di daerah, dikeluarkan sebatas mengeluarkan tanpa memperhitungkan besaran kerugian

⁴¹ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, alih Bahasa M. Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 19.

⁴² Munrokhim Misanam, P P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 18. Riyonggo suseno, dan Bhakti Hendrienatono.

masyarakat asalkan perusahaan mendapat untung yang besar, bahkan bank syariah tidak memberikan sumbangsi bagi pendaptan daerah dan pembinaan masyarakat. Hal ini sangat lah diluar batas ketidak nyamanan bagi masyarakat, mereka menjadi korban atas kesewenangan perusahaan besar ataupun ketidakadilan oknum birokrasi.

Teori Mannan juga berbicara bahwa tujuan perusahaan dalam suatu negara atau daerah bukan hanya memaksimalkan keuntungan perusahaan, melainkan juga harus memperhatikan moral, sosial dan kendala institusional. Perusahaan tidak hanya sebagai pemasok komoditas tetapi juga menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar bersama pemerintah daerah. Mannan juga mengharapkan produksi suatu perusahaan melibatkan masyarakat dalam menghasilkan produk bagi kesejahteraan masyarakat. Tetapi kenyataannya beberapa perusahaan masih sering alfa dalam kontribusi untuk pembangunan daerah, tempat keberadaan perusahaan. Wawancara dengan pihan Bappeda yang mengawasi CRS.

*" ... Dalam mengawasi perusahaan yang memberikan CSR pihak kami selalu melakukan diskusi dengan pihak perusahaan yang mengelola hasil sumber daya alam dan membrikan pengawan terhadap perusahaan tersebut kalau perusahaan yang di Guntung dan di Kuala Enok CSR yang diberikan pun cukup besar. Sedangkan kalau bank syariah sendiri Sampai saat ini bank syariah belum fair dalam melakukan csr nya serta sumbangsinya bagi pembangunan daerah INHIL belum Nampak."*⁴³

Terkait kebijakan fiskal yang sudah relevan dengan teori dari Manna adalah adanya bantuan penanggulangan perbaikan kebun dan pemberian alat untuk perbaikan serta trio tata air yang juga masih dalam penangggulangan kerusakan kebun di Indragiri Hilir. Hal ini sangat penting dan sangat membahagiakan bagi sebagian besar masyrakat Inhil, karena untuk daerah Inhil yang mayoritas memiliki kebun, berprofesi sebagai petani dan kebun merupakan sumber ekonomi utama didaerah serta untuk rakyat. Sehingga program ini sangat cocok dalam pembangunan social ekonomi masyarakat Indragiri Hilir.

Program lainnya yang cukup relevan yakni program magrib mengaji yang sangat diapresiasi oleh masyarakat serta sangat dibutuhkan untuk pembangunan kualitas sumber daya Manusia yang baik dan bermoral untuk kedepannya. Magrib mengaji merupakan program pemerintah dimana anak-anak dikumpulkan di masjid ataupun suaru-suruau kemudian diajarkan metode membaca Iqra, Al-Quran dan kegiatan keagamaan lainnya. Magrib mengaji ini menyerupai kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA). Akan tetapi waktu pelaksanaan program ini, setelah shalat Magrib selesai dilakukan. Konsep pengajarannya bukan hanya mengenalkan

⁴³ Wawancara dengan Masykur Hz, Selaku Kasubbid Sumber Daya Alam dan Pertanian BAPPEDA Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan, 4 oktober 2017.

huruf hijaiyah saja, namun juga memberikan metode lain seperti metode menghafal al-Qur'an yang telah dilakukan di beberapa tempat. Sebenarnya diluar dari panduan yang sudah ada pembimbing/ guru mengaji juga bisa menambahkan sarana kegiatan lainnya seperti mengkreasikan system pengajaran efektif yang efeknya pada pengenalan dasar agama ataupun lebih luas dari itu.

Program ini melibatkan banyak *stakeholder*, pemerintah daerah, pengajar atau guru pembimbing, masyarakat serta orang tua dilingkungan kegiatan berlangsung, dan terpenting melibatkan anak-anak didik mulai dari usia dini sampai usia remaja. Karena anak-anak ini merupakan asset bangsa yang harus dilindungi, keberhasilan mereka merupakan keberhasilan dalam pembangunan daerah bahkan Negara. Keuntungan lain dari program ini dalam hal ekonomi, secara tidak langsung pemerintah daerah sudah membuka lapangan pekerjaan untuk para guru mengaji dengan memberikan insentif yang merupakan pendanaan dari PEMDA sehingga daya beli masyarakat khususnya guru mengaji akan kian meningkat.

Walaupun insentif yang di berikan belum diatas Upah Minimum Regional khususnya untuk wilayah Riau. Namun hal ini berkesesuaian dengan kebijakan fiskal Mannan dimana kebijakan fiskal merupakan alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui insentif atau meniadakan insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah karena daya beli akan meningkat ketika masyarakat mendapatkan pendapatan.⁴⁴ Saat ini program Magrib Mengaji kontribusi besarnya di kota kabupaten saja, sehingga perlu keseriusan pemerintah untuk memberikan perhatian lebih di kecamatan-kecamatan dan desa-desa terkait program Magrib Mengaji.

Program pendidikan lainnya yang sekarang berjalan dengan baik di daerah Indragiri Hilir adalah terkait keberadaan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap desa memiliki minimal 1 PAUD yang memberikan akses bagi warga desa untuk memajukan pendidikan di desa-desa yang dimulai sejak dini. Program pengadaan PAUD ini dijalankan oleh Istri dari bapak bupati yang sangat mendukung dan memprogramkan hal ini.

Badan Pendapatan Daerah juga melakukan banyak pengembangan dan evaluasi untuk meningkatkan pendapatan daerah demi kelancaran pembangunan daerah, hal yang telah dilakukan yakni system jemput bola pembayaran pajak bumi dan bangunan di daerah Indragiri Hilir untuk desa-desa yang memiliki akses yang sulit. Serta melakukan pemantauan yang konsen untuk melihat hasil usaha baru masyarakat yang memiliki keuntungan besar, seperti pajak burung walet, pajak

⁴⁴ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, alih Bahasa M. Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 48.

tambang pasir yang merupakan milik perorangan di salah satu kecamatan yang ada di Indragiri Hilir.

Diluar dari ketiga program unggulan Indragiri Hilir yang terlihat jelas dan satu program yang akan mulai di jalankan untuk mendukung dalam kehidupan social ekonomi Indragiri Hilir, yang juga membawa dampak membahagiakan bagi masyarakat tentunya ada program yang diwacanakan untuk beberapa tahun kedepan agar lebih meningkatkan pertumbuhan pembangunan social ekonomi. Dalam wawancara saya dengan salah satu anggota DPR D Indragiri Hilir menyatakan bahwa;

"... Saya di komisi 4 membidangi kesejahteraan masyarakat, semakin bagusnya perekonomian masyarakat semakin membantu dalam hal-hal social kemasyarakatan. Adapun program-program kita, kita akan melakukan pendataan terhadap para posisi yang miskin, anak yatim dan lain sebagainya yang terkait dengan sosial, kalau bisa angka kemiskinan di Indragiri Hilir bisa menurun. Kita akan prioritas bagi anak-anak yang tidak mampu tapi berprestasi kita perjuangkan ke dinas pendidikan tentang beasiswa bagi anak-anaka yg tidak mampu tetapi berprestasi nanti kalau seandainya anak tidak mampu dan kurang berprestasi kita coba juga di bantuan pendidikan miskin..."⁴⁵

Harapan dan yang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan daerah akan membawa pendidikan Inhil lebih baik karena memberikan ruang belajar bagi semua lapisan masyarakat, apalagi mengingat bahwa pendidikan di Indragiri Hilir cukup baik terbukti dari keberadaan 4 kampus yang terdiri dari 1 Universitas, 2 Akademi (Kebidanan dan Komputer) dan 1 Sekolah Tinggi Islam. Ekonomi Islam ditandai dengan tiga sector; sector swasta, sector sukarela, dan sector public. Ketika tiga sector ini bersinergi untuk menciptakan pembangunan social ekonomi (Pendidikan, pendapatan, pekerjaan, kesehatan dll) maka hasilnya akan lebih cepat dalam suatu daerah. Namun jika tidak ada komitmen besar dari pemerintah khususnya tentulah pembangunan ekonomi akan semakin lambat.

Kesesuaian antara kebijakan fiskal daerah Indragiri Hilir dengan Kebijakan Fiskal Abdul Mannan. Jika dilihat dari nilai moral pembangunan social dalam hal pendidikan di Indragiri Hilir sudah sangat baik, apalagi kesadaran pemerintah untuk melibatkan pendidikan Islami dan moral yang jarang diadakan didaerah lain. Nilai moral itulah yang tidak ada dalam kegiatan pembangunan social model system ekonomi kapitalis ala barat. Sehingga masyarakat sangat bersyukur atas perhatian khusus pemerintah daerah terhadap kegiatan keislaman. Walaupun dalam hal

⁴⁵ Wawancara dengan Sumardi selaku Ketua Komisi IV DPRD Indragiri Hilir di Tembilahan pada tanggal 18 Juli 2017.

pembangunan Infrastruktur yang lamban dan Birokrasi yang belum tertata baik bahkan kadang malah mempersulit masyarakat, serta lapangan pekerjaan yang belum memadai, namun di luar hal tersebut sudah ada salah satu yang dikuatkan yakni dalam hal pendidikan, yang bisa di syukuri oleh sebagian besar masyarakat Indragiri Hilir.

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industry-industri alternative. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.⁴⁶ Pembentukan institusi baru untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat belum terbentuk, industry-industri alternative belum bisa menutupi jumlah masyarakat yang dapat bekerja, didaerah Indragiri Hilir peluang kerja masih sangat terbatas. Berikut peneliti sertakan yang relevan dengan kebijakan fiskal Abdul Mannan.

Tabel 2 kesesuaian Kebijakan Fiskal Indragiri Hilir dengan Kebijakan Fiskal Abdul Mannan.

No.	Kesesuaian	Alasan	Teori Mannan yang sesuai
1.	Pendidikan Islami dan Moral	- 1 Desa 1 PAUD - Magrib Mengaji - <i>Islamic Events</i>	Individu dan daerah harus bekerja sama menciptakan masyarakat yang baik, salah satunya dengan pendidikan
2.	Pembangunan Ekonomi dalam hal Perbaikan Perkebunan	- 1 Kecamatan 1 <i>Excavator</i> (alat pengeruk) - Trio Tata Kelola Air - Resi Gudang	Dalam ekonomi Mannan peran Negara sangat penting dalam memajukan ekonomi masyarakat, dengan jalan kebijakan fiskal dan penyediaan kebutuhan dasar dalam suatu daerah. Karena masyarakat

⁴⁶ Lincoln Arsyad, 2011. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Kedua*. (Yogyakarta: BPFE), hlm. 109.

			Inhil masyarakat yang bekerja di bidang agraris maka perbaikan perkebunan merupakan hal yang urgen.
3.	Inovasi pajak yang mulai dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> - Jemput Bola terhadap Pajak didesa-desa - Melakukan studi banding kedaerah dengan tata kelola perpajakan yang baik. - Pajak bagi usaha masyarakat yang potensial dan layak terkena pajak 	Implementasi zakat dalam ekonomi Mannan menjadi hal dasar untuk pemenuhan bagi masyarakat, sehingga pajak yang juga merupakan kewajiban warga Negara harus terus di inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah
4.	Birokrasi yang belum kondusif	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan yang tidak memadai - Disiplin tenaga birokrasi yang lemah 	Kerja sama yang baik antara Negara dan individu juga harus diwujudkan sehingga birokrasi yang kurang baik merupakan hal yang sangat menyalahi dalam teori Mannan.
5.	Infrastruktur dan pembangunan yang Lamban	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada beberapa desa yang akses listrik tidak memadai - Banyak jalan penghubung yang rusak - Alat transportasi yang tidak 	Salah satu penyebab masyarakat tidak bahagia, tidak terpenuhinya kebutuhan akan infrastruktur padahal teori Mannan mengedepankan

	dilengkapi dengan alat <i>safety</i> yang memadai	kebahagian bagi masyarakat
6. Peluang kerja yang Minim	- Iklim bisnis yang tidak mendapat perhatian khusus - industry-industri alternative yang belum memadai	Peranan Negara atau daerah menurut Mannan harus mampu mendorong partisipasi berkeadilan termasuk dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan.

Dalam tabel diatas pemaparan terkait kesesuaian dan ketidak sesuaian kebijakan pemerintah daerah dengan perspektif Mannan dari pembahasan sebelumnya, pada tabel *pertama* dianggap sesuai karena adanya program pendidikan magrib mengaji untuk membangun nilai spiritual anak-anak, keberadaan kampus sehingga masyarakat memiliki jalan untuk mengenyam dan mendapatkan pengetahuan yang lebih, lembaga pendidikan anak usia dini di satu desa yang mampu melahirkan anak-anak usia dini yang berakhlak dan cerdas, serta apresiasi masyarakat terhadap kegiatan *Islamic Events* membuktikan pemerintahan yang mementingkan pembangunan spiritual dengan konsisten mengadakan acara-acara keislaman.

Tabel pada point *kedua* pembangunan ekonomi masyarakat di Indragiri Hilir difokuskan dengan perbaikan perkebunan agar hasil perkebunan masyarakat dapat meningkat karena mayoritas berprofesi sebagai pekerja kebun, maka program ini tentulah membahagiakan sebagian besar masyarakat Indragiri Hilir dengan adanya program 1 Kecamatan 1 *excavator* (alat pengeruk), Trio Tata Kelola Air, Resi Gudang.⁴⁷ Hal ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Indragiri Hilir.

Point *ketiga* berbagai upaya dan langkah dalam mengoptimalkan sumber PAD terus digali dari sejumlah potensi dan sektor, dalam peningkatan dan menggali potensi sumber pajak daerah Indragiri Hilir untuk meminimalisir keterhambatan pembangunan karena kurangnya dana. Inovasi yang dilakukan yakni, Jemput Bola terhadap Pajak didesa-desa, Melakukan studi banding kedaerah dengan tata kelola perpajakan yang baik, dan juga pengambilan pajak untuk usaha-usaha masyarakat seperti tambang pasir yang dimiliki warga.

⁴⁷ Sitem Resi Gudang ini merupakan cara perdagangan suatu komoditas melalui satu penampungan komoditas sebelum dilakukan pemasaran

Hal yang belum sesuai dengan prinsip kebijakan fiskal mannan adalah belum dijadikannya wakaf sebagai sumber untuk pembangunan infrastruktur daerah, dan permasalahan yang mempersulit pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat seperti Birokrasi yang tidak kondusif di beberapa Instansi, Infrastruktur dan pembangunan yang lamban,⁴⁸ dan peluang kerja yang minim. Sehingga menjadikan banyak keluhan di masyarakat dan kesulitan masyarakat ini juga berdampak ke banyak aspek.

Islam dalam konteksnya mengungkapkan bahwa peran negara dilakukan dalam rangka melanjutkan misi kenabian.⁴⁹ Yaitu pencapaian *al-maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'ah). Negara sebagai agen Tuhan untuk merealisasikan *al-maqashid al-syari'ah*. Sebagai contoh, pada negara Islam pengalokasian sumber-sumber daya yang tidak sesuai dengan tujuan syara' tidak dibenarkan. Karena itu, penerimaan keadilan dan persamaan menjadi komponen esensial dalam kebijakan publik (*public policy*).⁵⁰ Jadi, kemaslahatan yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi kata kunci. Sama halnya dengan Mannan yang menganggap bahwa dalam kebijakan fiskal bukan hanya pemenuhan kebutuhan ekonomi yang harus diutamakan untuk menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat namun juga aspek moral yang harus diasah.

Aspek moral yang terus diasah ini harus melalui pendekatan agama, dan pendidikan, sehingga program yang berjalan baik di Indragiri Hilir yakni terkait program Magrib Mengaji dan keberadaan 1 desa 1 sekolah Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) merupakan hal yang harus diapresiasi. Menurut Mannan System social ekonomi Islam dengan system ekonomi lain yang membedakannya adalah sifat motivasional yang mempengaruhi pola, struktur, arah, dan komposisi produksi distribusi serta konsumsi.⁵¹ Teori Mannan ini harus diterapkan dalam sebuah daerah yang memiliki motivasi untuk pembangunan social ekonomi yang sesuai dengan Islam, begitupun dengan kebijakan fiskal daerahnya. Sehingga masyarakat dan daerah yang ingin mencapai masyarakat madani bisa dimulai dengan melakukan penerapan nilai-nilai Islam dalam keseharian.

Instrument kebijakan fiskal dalam Islam antara lain; zakat, sedekah, wakaf, Infak dan penerapan pajak untuk masyarakat yang menetap dinegara-negara Islam dan tidak memeluk agama Islam. Instrument kebijakan Fiskal dalam Islam dapat

⁴⁸ Lamban adalah Tidak cekatan (dalam bekerja dan sebagainya), dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lamban> diakses pada Minggu tanggal 4 Desember 2017.

⁴⁹ Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa-al-Din*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm: 94.

⁵⁰ Aan Jaelani, *Pengelolaan APBN Dan Politik Anggaran Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, MPRA 2012, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, hlm. 3.

⁵¹ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, alih Bahasa M. Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 19

dijadikan solusi untuk perekonomian saat ini.⁵² Teori Mannan terkait kebijakan fiskal juga ingin menjadikan wakaf dan zakat sebagai instrument Islam di Negara-negara Islam atau Negara yang masyarakatnya mayoritas Muslim. Otonomi daerah sebenarnya merupakan suatu kesempatan bagi daerah melakukan banyak inovasi untuk kebaikan daerah dan masyarakatnya, daerah-daerah yang mayoritas Muslim dan kehidupannya cukup kondusif di tengah ekonomi daerah yang masih mengalami *deficit* bisa saja melakukan inovasi dengan menjadikan wakaf dan zakat sebagai Instrumen fiskal daerah.

Mannan menganggap bahwa zakat sebagai poros keuangan Negara Islam yang sangat layak untuk dijadikan kembali sebagai instrument fiskal dalam perekonomian Negara-negara Islam atau daerah yang mayoritas muslim dan ini merupakan sebuah elemen sosialisme Islam yang digagas Mannan. Pengendalian dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat atas perintah Allah SWT, melalui program zakat, infaq dan sedekah.⁵³ Di Indonesia zakat belum dijadikan instrument fiskal namun program zakat, infaq, wakaf dan sedekah akan membuat motivasi masyarakat lebih besar bila dikelola untuk pendistribusian social ekonomi dan pembangunan infrastruktur didesa-desa apalagi ada sanksi tegas dari agama dan juga sanksi dari Negara jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Sehingga ini akan signifikan meningkatkan pendapatan dan mengurangi *deficit* anggaran jika dikelola dengan baik dan membantu pembangunan social ekonomi.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sebagai produk sebuah lembaga keuangan Islam yang *capable* dan *credible*. Upaya dan peran BMT dalam meningkatkan posisi ekonomi rakyat harus menunjukkan *performancenya* dalam kapasitasnya sebagai sebuah lembaga keuangan yang memiliki kemampuan untuk berperan dan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam kerjasama usaha mikro dan bermitra bisnis. Di inhil sendiri lembaga-lembaga mikro Islam belum *familier* dan sepengetahuan peneliti belum ada. Padahal dengan adanya lembaga semacam ini akan memotivasi minat menabung masyarakat dan merupakan bagian dari literasi ekonomi syariah.

Keberadaan lembaga mikro Islam akan memfasilitasi kepemilikan harta masyarakat yang bergerak dalam bidang mikro dan memberikan instrument untuk melakukan penyimpanan dimasa yang akan datang serta untuk kepentingan keluarga atau usaha seseorang. Kepemilikan individu dikenal dan dilindungi dalam Islam, tetapi legitimasi kepemilikan bergantung pada kewajiban moral, agama dan kemasyarakatan individu yang bersangkutan, selama tidak terjadi eksploitasi ataupun pencabutan hak kepada pihak lain. Sehingga lembaga mikro Islam bisa

⁵² Adiwarman Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi ke 3*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm.

⁵³ Djoko Setyo Hartono, Seminar Nasional Ilmu ekonomi Terapan 112 Fakultas Wkonomi UNIMUS 2011. *Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Krisis Ekonomi Eropa*, hlm. 119.

menfasilitasi hal tersebut dan bisa dijadikan sebagai referensi untuk pengelolaan harta individu, termasuk masyarakat kecil.

Ekonomi Islam sebagai solusi dalam menghadapi krisis karena menurut John K. Galbraith, dalam bukunya *The New Industrial State* menyatakan bahwa, “konsumsi barang telah menjadi sumber kenikmatan yang paling besar, dan tolak ukur prestasi manusia yang paling tinggi”. Akibatnya perilaku *hedonisme*, *materialisme* dan *konsumtivisme* melanda hampir di seluruh aspek lapisan anggota masyarakat saat ini. Hal ini diakibatkan dari fenomena kapitalisme modern, sehingga perlu memenuhi kebutuhan-kebutuhan spiritual, dan kebutuhan akan pemerataan distribusi kesejahteraan di masyarakat. Distribusi pendapatan yang tidak adil yang disertai dengan perbedaan tingkat kehidupan yang mencolok,⁵⁴ membuat orang terus menerus menderita dan menimbulkan gesekan yang berbahaya di masyarakat. Orang tidak pernah puas dan tidak pernah mau memenuhi kewajiban terhadap orang lain. Akibatnya, tingkat solidaritas sosial semakin melemah dan masyarakat mengalami degradasi⁵⁵ moral yang memprihatinkan.

Tentunya tingkat solidaritas sosial yang melemah merupakan suatu permasalahan global yang Islam dari awal sudah memiliki motivasi untuk memperkuat *Ukhuwa Islamiyah*. Sehingga sangat layak semua teori yang mengacu pada Islam sangat layak untuk diterapkan. Begitu juga dengan keunggulan sistem ekonomi Islam untuk menjadi solusi bagi ekonomi saat ini. Nilai moral itulah yang tidak ada dalam kegiatan perekonomian model, jika tidak ada kontrol nilai moral, maka yang timbul adalah perilaku para pelaku ekonomi yang cenderung merusak dan dapat merugikan masyarakat umum.

Alternatif solusi yang ditawarkan oleh konsep ekonomi Islam dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi saat ini ada 2 (dua), yaitu: pertama, solusi yang bersifat parsial. Kedua, solusi yang bersifat komprehensif (*kafah*).⁵⁶ Untuk menerapkan sistem ekonomi Islam secara komprehensif (*kafah*) terdapat tiga asas; pertama cara memperoleh harta kekayaan (*al milkiyah*), kedua cara mengelola kepemilikan harta kekayaan yang telah dimiliki (*tasharuruf fil milkiyah*), dan ketiga cara mendistribusikan kekayaan tersebut di masyarakat (*tauzi'ul tsarwah bayna an-naas*). Kepemilikan harta kekayaan di sistem ekonomi Islam dibagi menjadi tiga jenis pertama kepemilikan individu (*private property*), kedua Kepemilikan oleh negara (*state property*), ketiga Kepemilikan oleh umum (*collective property*).

⁵⁴ Membangkitkan rangsangan orang yang melihat karena terlalu berlebih-lebihan (tentang pakaian, kelakuan, dan sebagainya), dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mencolok>, diakses pada Minggu tanggal 4 Desember 2017.

⁵⁵ Penurunan (tentang pangkat, mutu, moral, dan sebagainya); kemunduran; kemerosotan, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/degradasi>, diakses pada Minggu tanggal 4 Desember 2017.

⁵⁶ Djoko Setyo Hartono, *Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Krisis Ekonomi Eropa*, Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi UNIMUS 2011, hlm: 118-119.

Pajak dalam konsep keuangan Publik Ibnu Khaldun menyatakan bahwa Departemen perpajakan merupakan jabatan penting dan selalu ada dalam sebuah negara ataupun kerajaan. Berkenaan dengan operasi pajak dan memelihara hak-hak negara dalam masalah pendapatan dan pengeluaran, menetapkan gaji mereka, serta menyerahkan upah tepat pada waktunya. Sumbernya kembali kepada ketentuan yang telah ditata oleh kepala operasi pajak, dan para aparat lainnya yang di tulis dalam sebuah buku yang memuat seluruh perincian mengenai pemasukan dan pengeluaran berdasarkan bagian penting yang baik dari akuntansi, yang hanya dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kemampuan mantap dalam operasi perpajakan.

Sehingga petugas pajak atau dalam hal ini Badan Pendapatan daerah harus bisa melakukan inovasi terkait bagaimana meningkatkan pajak didalam daerahnya. Sebagaimana wawancara saya dengan pegawai BAPENDA Indragiri Hilir;

*"...Masyarakat kadang enggan mebayarkan pajak tanahnya misalnya tanah perkebunan dengan dalih sejak zaman nenek moyang sudah ada tanah itu dan tidak pernah di bayar, kepekaan masyarakat yang sangat minim mengakibatkan pendapatan daerah yang didapat juga sangat minim padahal untuk Indragiri Hilir perhitungan pajak yang harus diterima kadang berbeda jauh dengan yang diterima. Partisipasi masyarakat masih sangat kecil namun setelah dilakukan program jemput bola seperti ini sehingga masyarakat mengapresiasi Pembayaran pajak. Kami sudah melakukan studi banding di Jawa Barat yang sistemnya sudah sangat baik menurut saya, jadi semua masalah perpajakan daerah akan mudah diakses dengan android-android masyarakat dan pemantaunyaapun lebih"...*⁵⁷

Alasan pengambilan pemikiran Abdul Mannan dalam penelitian ini karena Mannan merupakan salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam kontemporer yang sukses merubah paradig ekonomi pengalihan system bunga kepada system *Mudharabah*. Ide Mannan tersebut pada akhirnya juga mengilhami pendirian bank-bank syariah yang saat ini menjamur di dunia, termasuk di Indonesia.⁵⁸ Sehingga sangat layak mengangkat perspektif kebijakan fiskal Mannan melihat kesuksesannya atas Ide pendirian Bank syariah didunia yang menjadi solusi bagi banyak kalangan khususnya kaum Muslim dan membantu sistem keuangan ummat Islam. Diharapkan dengan pengembangan kebijakan Fiskal Mannan akan berdampak semakin baiknya sistem ekonomi yang ada saat ini di Negara-negara Islam maupun negara dengan jumlah muslim yang cukup banyak. Buku Mannan yakni Teori dan Praktek Ekonomi Islam mendapat apresiasi besar dalam bidang literasi dan mendapat penghargaan.

⁵⁷ Wawancara dengan Burhan Selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah BAPENDA Indragiri Hili, di Tembilahan pada tanggal 5 oktober 2017.

⁵⁸ Fahrur Ulum. "Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan", *Al-Qānūn*, Vol. 12, No. 2, Desember 2009, hlm. 455.

Penerapan gagasan beliau sehingga Perbankan-perbankan Islam sudah menjadi instansi yang berperan dalam perekonomian Negara. Masyarakat juga mendapatkan pilihan untuk memilih lembaga dalam bertransaksi, terlepas dari apakah alasan *pure* agama atau kemudahan yang lebih. Pemikiran Abdul Mannan yang juga banyak membahas isu kebijakan fiskal menjadi salah satu alasan mengapa peneliti menggunakan teori Abdul Mannan karena dinilai masi sangat relevan untuk di bahas dimasa kekinian. Masa Abdul Mannan juga dihadapkan dengan ekonomi yang mengalami kenaikan dan penurunan serta pemerintah tanggung jawabnya rendah terhadap pembangunan daerah atau Negara. Banyaknya praktek KKN yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga persepsi masyarakat bahwa penyelenggaraan otonomi daerah hanya semakin membuka banyak peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan praktek Korupsi. Hilangnya kepercayaan masyarakat menyebabkan banyak peluang pendapatan daerah yang kemudian tidak bisa didapatkan karena masyarakat tidak mau mematuhi peraturan pemerintah yang mana dari hasil pengumpulan dana-dana tersebut mereka ketahui dimanfaatkan oleh oknum pemerintah. hal inilah yang membuat pengelolaan pendapatan daerah tidak maksimal dan jauh dari target yang telah ditentukan.

Keunggulan sistem ekonomi Islam berupa menyatunya nilai moral dan nilai spiritual didalam sistem tersebut. Nilai moral itulah yang tidak ada dalam kegiatan perekonomian model sistem ekonomi kapitalis ala-barat. Jika tidak ada kontrol nilai moral, maka yang timbul adalah perilaku para pelaku ekonomi yang cenderung merusak dan dapat merugikan masyarakat umum. Sebagai contoh munculnya praktek-praktek monopoli, riba dan berbagai teknik kecurangan-kecurangan yang terus muncul dalam berbagai modus. Belum lagi di Indragiri hilir data sebelumnya menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kekayaan Negara juga banyak terjadi menjadi salah satu bukti mudahnya moralitas setiap individu.

Ekonomi Islam sebagai salah satu ilmu social perlu kembali kepada sejarah dalam melaksanakan eksperimen-eksperiennya dan menurunkan kecendrungan jangka jauh dalam berbagai umahan ekonomi.⁵⁹ Kembali kepada sejarah disini misalnya zakat dijadikan instrument fiskal dimasa sekarang karena penggunaan utang sebagai instrument fiskal daerah bahkan Negara sudah membuat resesi dunia semakin parah, penumpukan utang Negara dan daerah tidak bisa dibendung lagi. Sehingga sangat perlu dicarikan solusi yang memungkinkan dalam suatu daerah. Inti pendapat Mannan bisa dijadikan acuan solusi bahwa dalam konsep ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Pengembangan sutau masyarakat di

⁵⁹ Nur Rianto Arif, 2015, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 43.

Indonesia sendiri banyak dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan juga lembaga-sosial keIslaman atau diluat dari itu.

Permasalahan infrastruktur daerah di Indragiri Hilir cenderung lambat dan membuat banyak aktivitas masyarakat yang terbengkalai karena infrastruktur jalan, listrik, dan transportasi yang tidak memadai bagi masyarakat. Disinilah dibutuhkan sinergi tiga sector yakni masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Masyarakat bisa melakukan sumbangan bersifat material maupun moriil, pemerintah memberikan peluang untuk mensukseskan pembangunan dengan mengawal dan mengusahaakan dana daerah, pihak swasta bisa melakukan bantuan materiil dari dana-dana *Corporate Social Responsibility*. Data yang ditemukan dari badan Perencanaan Pembangunan daerah Indragiri Hilir beberapa pihak swasta sudah ikut terlibat dalam pembngunan jalan, jembatan dan sarana prasarana sekolah-sekolah.

Landasan teoritis Mannan berisi sejumlah asumsi dasar. Manusia Islam (*Islamic Man*) yang dimaksud ialah seseorang yang menginginkan bersatunya ekonomi dan moral yang maksimum, dianggap bersifat individualistic, tetapi sekaligus kooperatif dan bertanggung jawab secara social. Mannan tidak percaya pada *harmony of interests* yang menjamin terbentuknya pasar seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith. Pemerintah harus mengambil peran penting dalam perekonomian karena alokasi sumber daya tidak dapat diserahkan pada kebebasan individu dalam kaitannya pencapaian kesejahteraan bersama. Sehingga *fluktuasi* harga bahan pokok yang sering menyengsarakan ekonomi masyarakat di Indragiri Hilir boleh ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan memberikan akses pelatihan *skill* untuk mengolah bahan perkebunan menjadi produk yang bisa digunakan dalam jangka waktu lama dan memiliki harga jual yang lebih. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu Anggota DPR D Indragiri Hilir yang juga pernah menjadi atasan disalah satu perusahaan pengolahan hasil perkebunan Indragiri Hilir

"... Untuk perusahaan Swasta skala besar di himbau untuk tidak menjadikan perkebunan kelapa biasa dialih fungsian kesawit. Karena pemerintah Indragiri Hilir sendiri tetap ingin memberdayakan kelapa rakyat kelapa biasa lokal. Karena untuk kelapa hidrolik terbesar di Indonesia emang di Inhil. 10 atau 20 tahun yang lalu kelapa kita hanya dikelola untuk di buat minyak dan turunannya tidak banyak, minyak goreng sabun. Tapi untuk sekarag ini turunna dari kelapa itu sudah mulai banyak di buat tepung santan minuman dsb otomati dengan demikian kelapa kering itu atau bulat. Kelapa bulat pekerjaannya mudah dan harganya sudah mulai mahal karena bisa di olah oleh perusahaan..."⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan Taufik Hidayad selaku anggota DPRD Indragiri Hilir Komisi II, di Tembilahan pada tanggal 18 juli 2017.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara local (daerah).⁶¹ Pada dasarnya jika dikelola dengan baik sumber daya alam di Indragiri Hilir bisa dijadikan tempat wisata apalagi dengan jumlah kelapa hydro terbesar di dunia namun karena akses desa satu dengan lainnya agak sulit sehingga mungkin butuh waktu lama untuk bisa menjadikan produk local sebagai tujuan wisata. Mempertahankan produk local bisa jadi masalah dan juga bisa menjadi peluang, masalahnya penanaman untuk jenis sawit yang dinilai cepat tapi bisa merusak struktur tanah karena biasanya lahan harus dibakar dahulu untuk proses penanamannya. Sedangkan harga jual kelapa yang mudah fluktuatif menurun tetapi bisa dilakukan banyak inovasi produk jika dikelola dengan baik dan mengikuti sertakan inovasi.

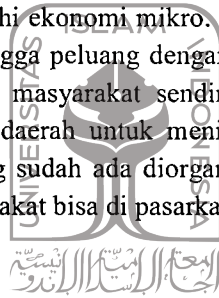
Inovasi masyarakat inhil tidak berhenti dari kegiatan rutinnnya sebagai masyarakat petani dan berkebun, tetapi juga memanfaatkan setiap *events* yang diselenggarakan pemerintah setempat untuk meningkatkan social ekonomi mereka. Hal ini terlihat dari apresiasi masyarakat serta banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam *Islamic Events*, adapun *Islamic Events* adalah kegiatan-kegiatan Islam yang di rayakan ataupun dilaksanakan diwaktu tertentu dengan banyaknya rangkaian acara dan juga melibatkan banyak masyarakat. Bahkan *Islamic events* atau kegiatan keIslaman di Indragiri Hilir, yang dilaksanakan pada perayaan tahun baru Islam beberapa bulan yang lalu mendapat rekor muri. Belum lagi agenda-agenda *Musabaqah Tilawatil Qur'an* (MTQ) yang banyak dilaksanakan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya dalam menyeleksi Qori terbaik daerah untuk kemudian dilanjutkan mewakili dalam ajang yang lebih besar. Apresiasi masyarakat Inhil dengan adanya kegiatan rutin *Islamic events* yang semakin banyak dilaksanakan diInhil tentunya tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan pemerintah setempat.

Hal yang unik dalam kegiatan masyarakat bekerja sama dan mengapresiasi setiap *events* serta melakukan banyak inovasi untuk mendukung kelancaran acara. Inovasi inilah yang kemudian sangat menguntungkan banyak masyarakat dan menghidupkan acara yang sedang berlangsung. Bazar-bazar yang melibatkan masyarakat untuk diberi kesempatan menjual produk-produk *Home Made* dan berkesempatan mempromosikan *home Industry* masyarakat, khususnya ibu-ibu dari beberapa desa. Menjadikan acara ini semakin meriah dan memunculkan banyak penawaran dan permintaan produk layaknya pasar, sehingga menghidupkan ekonomi masyarakat setempat juga masyarakat yang terlibat. Keuntungan ini

⁶¹ Lincolin Arsyad, 2011. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Kedua*. (Yogyakarta: BPFE), hlm. 109

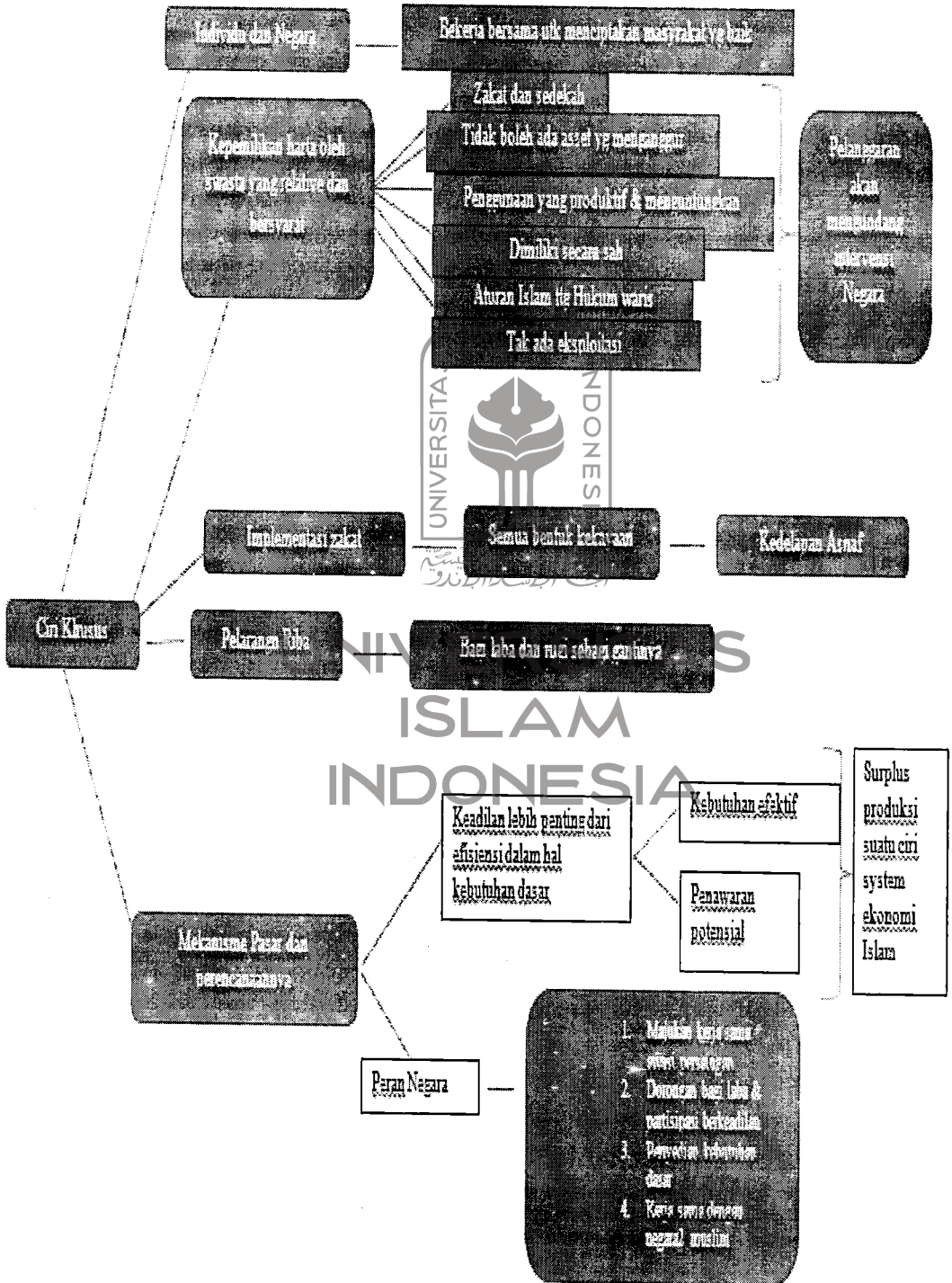
mungkin terlepas dari perhatian pemerintah, dimana ada suatu aktivitas saat *events* berlangsung yakni meningkatnya kemampuan masyarakat untuk melakukan ajang kreativitas dalam menangkap peluang pasar, melakukan transaksi dan aktivitas enterpreuner lainnya terjadi dalam *Islamic Events*.

Events semacam ini seharusnya mendapat perhatian khusus dari dinas terkait sehingga bisa dilakukan pengembangan, dan masyarakat yang terlibat akan semakin banyak serta pengembangan ekonomi semakin luas di Inhil. Hal ini juga akan menuai peningkatan pendapatan masyarakat, apabila mendapatkan bimbingan dari dinas terkait. Ketika setiap daerah berlomba-lomba melakukan peningkatan sosial dan kreativitas untuk program kemasyarakatan yang lebih baik dalam pembangunan daerahnya, di Inhil sendiri kita telah memiliki wadah yang belum dilihat peluangnya oleh pemerintah setempat. Padahal dalam meningkatkan social ekonomi perlu memperkuat dan membenahi ekonomi mikro. Masih terlalu minim pengembangan usaha bisnis di Inhil, sehingga peluang dengan adanya *Islamic Events* seharusnya dapat di manfaatkan oleh masyarakat sendiri dan kedepannya bisa di jadikan program bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan memanfaatkan wadah yang sudah ada diorganisir dengan baik, sehingga produk-produk yang dibuat masyarakat bisa di pasarkan hingga keluar daerah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Ciri Khusus Sistem Ekonomi Mannan



Ciri Khusus Sistem ekonomi Mannan memiliki ciri yang pas untuk diterapkan di daerah Indragiri Hilir karena sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa masyarakat Indragiri Hilir merupakan masyarakat yang mayoritas Muslim baik secara umum maupun yang melaksanakan birokrasinya. Serta masyarakat Inhil memiliki tingkat kegamaan yang baik terbukti dari setiap *events Islam* atau hari-hari besar Islam sangat di apresiasi oleh masyarakat, belum lagi melihat pemerintahan dan masyarakat dimasa sekarang terus melakukan banyak kegiatan dan program-program keislaman untuk mengembangkan daerah. Adapun Ciri khusus ekonomi Mannan seperti tabel diatas yang sebaiknya bisa di terapkan dan semakin mendukung pembangunan social di Indragiri Hilir:

- 1) Individu dan Negara atau dapat disimpulkan masyarakat per orang dengan daerah harus memiliki hubungan kerja sama yang baik untuk menghasilkan kemajuan bagi daerah dan dampak baik bagi masyarakat. Sinergi ini tentu akan semakin baik apabila masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap kebijakan yang dibuat.
- 2) Pembatasan kepemilikan swasta harus diawasi karena sebaik-baik suatu harta yakni dikelola oleh pemiliknya sendiri, konsep kepemilikan harta dalam Islam sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah ayat 284. Dalam konsep ini setiap muslim harus menyadari bahwa harta yang dimiliki bukanlah mutlak kepemilikannya, mealinkan sekedar titipan. Sehingga penggunaan harta haruslah memberikan kemaslahatan bukan hanya bagi diri dan keluarga tetapi juga bagi masyarakat sekitar.⁶² Dari hal tersebut juga setiap perusahaan swasta yang memiliki bisnis di suatu daerah harus patuh membayar CSR sesuai dengan keuntungan dan kerugian yang diakibatkan perusahaan.
- 3) Dalam kebijakan fiskal Abdul Mannan yang teorinya berlandaskan hukum Islam maka Mannan menganjurkan zakat dan wakaf sebagai salah satu instrument fiskal dalam suatu daerah atau bahkan Negara, yang akan berkontribusi banyak bagi pembangunan social ekonomi.
- 4) Pelarangan riba sangat di anjurkan berkaca pada landasan Al-Quran seseorang yang memakan riba maka sama seperti melakukan zina. Sehingga dalam suatu Negara atau daerah Mannan sangat menganjurkan untuk menghilangkan system riba, baik dalam perbankan maupun dalam kegiatan sehari-hari suatu masyarakat. Solusi ini juga sejalan dengan wawancara yang kami lakukan dengan salah satu anggota dprd Inhil Riau yang memberikan saran untuk Inhil sendiri melakukan studi perbandingan dan perubahan bank daerah yang selama ini masih menggunakan system konvensional untuk digiring mengikuti Bank daerah Lombok dan Bank daerah Aceh.

⁶² Nur Rianto Arif, 2015, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 137.

“... System ekonomi dipengaruhi oleh perbankan sehingga segala sesuatu yang mendukung perekonomian di zaman sekarang yakni perbankan jadi kalau menurut saya anda seharusnya meneliti bagaimana caranya agar Bank Riau yang tentunya menghasilkan keuntungan yang banyak dan memiliki pengaruh besar dalam ekonomi daerah bisa menjadi Bank Syariah jadi bisa dilakukan studi banding DPR-DPR atau siapalah... di Lombok ke bank Lombok atau Aceh yang juga baru-baru ini menjadikan bank daerahnya sebagai bank syariah.”⁶³

- 5) Ciri khusus ekonomi pemikiran Mannan yang terakhir adalah Mekanisme Pasar dan perencananya, hal ini merupakan point penting mengingat bahwa ekonomi akan baik apabila system di pasar baik, karena ekonomi ujung tombaknya berada pada pasar. Dalam mekanisme pasar terdiri atas 2 bagian yakni
- a) Keadilan lebih penting dari efisiensi dalam hal kebutuhan dasar

Dalam Islam adil tidak berarti sama rata dan diwaktu yang sama tetapi memberikan hak seseorang sesuai porsinya sebagaimana dalam surah an-Nisa ayat 58 yang artinya;

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْلَمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾

“*Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya padamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat*”. (QS. An-Nisa: 58).⁶⁴

Pada ayat ini diterangkan bahwa diantara amal-amal saleh yang penting ialah; melaksanakan amanat dan menetapkan hukum antara manusia dengan adil dan jujur. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setelah Rasulullah SAW memasuki kota Mekah pada hari ditaklukkannya, Usman bin Talhah pengurus Ka'bah pada waktu itu menguasai pintu Ka'bah lalu naik ke atas bubungannya. Ia tidak mau memberikan kunci Ka'bah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib merebut kunci Ka'bah itu dari Usman bin Talhah secara paksa dan membuka Ka'bah, lalu masuklah Rasulullah ke dalam dan shalat dua rakaat. Setelah beliau keluar dari ka'bah tampilah pamannya 'Abbas kehadapannya dan meminta supaya kunci itu diserahkan dan diberi jabatan pemeliharaan Ka'bah dan jabatan penyediaan air untuk jamaah haji, maka turunlah ayat ini, lalu Rasulullah SAW

⁶³ Wawancara dengan Abdurahman selaku anggota DPRD Inhil komisi III, di Tembilahan pada tgl 19 juli 2017.

⁶⁴ al-Qur'an dan Tafsirnya. Jilid II Juz 4-5-6. Naskah Asli Milik Depertemen Agama Republik Indonesia, (Percetakan UII: Yogyakarta, tanpa tahun), hlm. 208.

memerintahkan Ali bin Abi Thalib mengembalikan kunci Ka'bah kepada Usman bin Thalhah dan minta maaf.

Pengertian “Amanat” pada ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanat ini termasuk juga didalam; Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain didalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri, sebagaimana ditegaskan Allah dalam ayat ini.⁶⁵ Sebagai pemimpin dan hakim, Rasulullah menegakan keadilan dengan sebaik-baiknya. Hal ini beliau mencontohkan dalam hadis;

«وَأَيْمَنَ اللَّهُ بِأَنْ لَا تُصَابَ سُرْقَةُ فَاتِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سُرِقَتْ لُقَيْبٌ بِهَا»

“Jika sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya”. (HR. Bukhari Muslim)⁶⁶

Sehingga keadilan harus diberikan kepada siapapun yang berhak menerimanya sesuai dengan porsinya, bahkan Rasulullah tetap akan melakukan suatu hukuman bagi anaknya sendiri jikalau melakukan kesalahan sebagaimana orang lain.

- b) Peran Negara menurut Mannan dalam Asumsi ekonominya bahwa peran Negara terdiri dari; Majukan kerja sama, awasi persaingan Dorongan bagi laba & partisipasi berkeadilan, Penyediaan kebutuhan dasar, Kerja sama dengan Negara-negara muslim. Semua unsur ini harus ada dalam sebuah Negara.⁶⁷ Negara yang Ideal dalam pemikiran Abdul Mannan. Suatu Negara harus menghadirkan kerja sama dengan semua lini baik suatu lembaga negara, perusahaan swasta dan Negara lain/ daerah lain. Mengawasi persaingan bisnis dalam suatu Negara agar tidak terjadi persaingan yang merugikan masyarakat Negara tersebut. Negara berperan untuk mendukung masyarakat mendapatkan keuntungan dan masyarakat berpartisipasi secara aktif dan Negara tidak boleh membatasi partisipasi tersebut. Negara harus menyediakan kebutuhan pokok dalam suatu Negara atau daerah sehingga walaupun hasil dari kebutuhan belum *memback up* bisa dimiliki cadangan yang disediakan oleh daerah. Kerja sama dengan Negara atau daerah lain

⁶⁵ al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid II Juz 4-5-6. Naskah Asli Milik Depertemen Agama Republik Indonesia, (Percetakan UII: Yogyakarta, tanpa tahun), hlm. 209.

⁶⁶ Bukhori Abdul Somad. “Nilai-Nilai Masalah Dalam Hukum Potong Tangan: Analisis Kritis Perspektif Hadis Ahkam”, <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/viewFile/24/25>, Jurnal *MADANIA* Vol. 19, No. 1, Juni 2015, (Bengkulu: IAIN Bengkulu), hlm. 71.

⁶⁷ Konsepnya Negara tetapi untuk penerapannya bisa dilakukan didaerah termasuk di Indragiri Hilir sendiri yang masyarakatnya mayoritas Muslim.

merupakan cara terbaik mendukung ekonomi dan kehidupan social sehingga bisa berkesinambungan dan memberikan informasi yang lebih.

Setiap kebijakan pemerintah di harapkan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya, karena semua hal dalam kebijakan pemerintah berkaitan erat dengan kebutuhan pokok masyarakat sehingga urutan prioritas pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat banyak bukan kelompok atau individu, dalam sebuah kaidah terkait kebijakan bahwa;

نصرف الإمام على الرعية موقوف بالتصالحه

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat. Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari'at Islam, sehingga andaikata penguasa menetapkan seorang yang *fasiq* untuk menjadi imam shalat pun, menurut hukum tidak dibenarkan.

Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang *mashlahah* dan bermanfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan *mafsadah* dan memudaratkan terhadap rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

“Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum”⁶⁸

Kaidah ini mendukung otonomi daerah karena kedudukan pemerintah daerah dinilai memiliki arahan yang lebih pas. Belum adanya produk asli

⁶⁸ Abdul Helim, Kumpulan Kaidah Fikih tentang Siyasa/Politik/Kekuasaan <http://ushulfikih.blogspot.co.id/2012/09/kumpulan-kaidah-ikih-tentang-siyasah-politik-kekuasaan.html>. 21 September 2012 diakses pada hari sabtu tanggal 25 september 2017 pukul 07.26 WIB.

daerah yang dinikmati masyarakat secara luas sehingga Perlu perusahaan atau inisiatif pemerintah mengelola sumber daya alam yang berlimpah yang dimiliki oleh daerah dengan melibatkan masyarakat. Padahal pemerintah daerah memiliki kekuasaan khusus atau wewenang untuk mengarahkan hasil kekayaan alam daerah untuk dikelola sehingga lebih bernilai ekonomis bagi masyarakat di daerah, Sebagaimana wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Indragiri Hilir;

"...Melihat sektor utama di kabupaten Indragiri hilir adalah bercocok tanam dan berkebun alangkah baiknya hasil perkebunan dan beras lokal setiap kecamatan di beri label dan di jual apabila telah memenuhi kebutuhan pokok area tersebut. Karena beras lokal menurut saya tidak kalah bahkan lebih enak dari pada beras yang banyak dipasaran baik yang impor ataupun dari daerah lain."⁶⁹

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.⁷⁰ Mannan juga merumuskan langkah operasional dari sumber hukum Islam salah satunya mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya atau atas Target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan dalam kerangka yang ditetapkan dan membandingkan implementasi kebijakan pada langkah pencapaian yang diperoleh. Pembangunan ekonomi daerah sejalan dengan tujuan Mannan dimana harus ada target memaksimalkan kesejahteraan untuk masyarakat membangun sinergi dengan semua pihak.

Wakaf tunai menurut Mannan memiliki arti yang sangat penting bagi perekonomian, sebagai transfer harta kekayaan orang kaya kepada para pengusaha dan warga dalam membiayai berbagai program keagamaan, social, dan pendidikan dalam Negara-negara Islam. Disamping itu wakaf tunai dapat berfungsi sebagai investasi strategis untuk menghapuskan kemiskinan dan menangani keteringgalan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan riset.⁷¹ Penggunaan dana wakaf untuk pembangunan Infrastruktur sudah banyak di lakukan khususnya lembaga

⁶⁹ Wawancara dengan Syamsudin Uti, sebagai tokoh masyarakat Indragiri Hilir mantan DPR D Indragiri Hilir, mantan calon Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan pada tanggal 19 Juli 2017.

⁷⁰ Lincoln Arsyad, 2011. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Kedua*. (Yogyakarta: BPFE), hlm. 109.

⁷¹ Martini Dwi Pusparini, *Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan*, *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, hlm. 26.

swadaya masyarakat atau lembaga filantropi di Indonesia dan bisa di jadikan solusi untuk pembangunan di daerah, karena selama ini masyarakat mengenal perwakafan untuk tanah-tanah yang digunakan membangun masjid ataupun sekolah-sekolah agama.

Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa tujuan pembangunan ekonomi untuk merubah masyarakat sehingga mendapatkan Ridho Allah. Sedangkan Naqwa pembangunan social ekonomi adalah mewujudkan keadilan distribusi pendapatan. Pada dasarnya pendapat tokoh-tokoh Islam ini tidak berbeda dengan Mannan yang mengedepankan pembangunan kualitas hidup masyarakat dari segi spiritual dan ekonomi social secara keseluruhan, jadi yang peneliti dapat tarik dari teori Mannan terkait kebijakan pemerintah dan pembangunan social ekonomi bahwa kemapanan moral masyarakat menjadi hal yang utama untuk dibangun, moral dan spiritual yang baik akan menjadikan masyarakat berekonomi dengan baik dan hidup social lebih tertata serta bisa mengarahkan masyarakat menjadi masyarakat madani yang memiliki aturan yang baik dalam kehidupan.

Paparan diatas dan fakta yang didapat dari penelitian di kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga peneliti merumuskan suatu solusi yang baik diterapkan di Indragiri Hilir dan juga bagian dari perspektif kebijakan fiskal Mannan dalam pembangunan social ekonomi yang memadai untuk daerah, antara lain;

- 1) Pemerintah dan masyarakat harus dengan tegas dan melaporkan setiap tindakan yang menyimpang agar menciptakan Birokrasi yang melayani masyarakat secara kondusif, beretika dan membahagiakan masyarakat.
- 2) Pengalokasian dana harus dikawal secara baik sehingga mengurangi ketimpangan didaerah, pembangunan Infrastruktur yang merata, nyaman, Aman bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.
- 3) Banyaknya masyarakat yang belum terserap dalam dunia kerja sehingga perlu untuk menciptakan Lapangan pekerjaan Baru dan memperbaiki iklim Bisnis daerah sehingga masyarakat termotivasi membangun dunia kerja sendiri, dengan diberikan fasilitas pelatihan skill dari pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Potret pembangunan secara data menunjukkan adanya pertumbuhan namun pembangunan infrastruktur dinilai lambat, Birokrasi yang kurang kondusif, pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena harga komoditas sering mengalami penurunan harga jual, iklim bisnis yang belum berjalan dengan baik, lulusan dari universitas maupun sekolah tinggi belum terserap baik dalam dunia kerja saat ini. Padahal kebijakan fiskal yang baik salah satunya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pembangunan sosial ekonomi di Indragiri Hilir saat ini diutamakan dalam bidang pertanian dan perbaikan perkebunan masyarakat.
2. Permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah Indragiri Hilir merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan sangat memprihatinkan. Padahal Abdul Mannan dalam kebijakan fiskalnya yang mengedepankan prinsip kebahagiaan (*at-targib*) bagi masyarakat. Hal yang sudah sesuai dengan prinsip kebahagiaan yakni adanya bantuan penanggulangan perbaikan perkebunan masyarakat serta trio tata air yang juga merupakan program penanggulangan kerusakan perkebunan di Indragiri Hilir. Program lainnya yang cukup relevan yakni program magrib mengaji yang sangat diapresiasi untuk pembangunan kualitas sumber daya Manusia yang baik dan bermoral. Dinas pendapatan daerah juga sedang gencar melakukan evaluasi untuk meningkatkan pendapatan demi kelancaran pembangunan yang selama ini banyak terhambat.

B. Saran

Penelitian ini untuk pembangunan sosial ekonomi di Indragiri Hilir lebih baik, sehingga setelah melihat kondisi di lapangan perlunya agar;

1. Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan yang lebih ketat terkait kinerja birokrasi, kinerja tim lapangan dalam pembangunan infrastruktur dan melakukan inovasi untuk memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.
2. Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta seharusnya bersinergi dengan mengembangkan produk-produk pertanian dan perkebunan untuk dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan dapat didistribusikan secara merata hingga keluar daerah,

untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta mendukung iklim bisnis daerah.

3. Permasalahan terkait pihak swasta yang ada di Indragiri Hilir beberapa diantaranya tidak melakukan kewajiban pembayaran *Coorporate Social Responsibility* pemerintah seharusnya melakukan tindakan tegas untuk hal-hal semacam ini. Karena sumbangsi pihak swasta akan sangat bernilai untuk kemajuan daerah dan masyarakat setempat dalam pembangunan social ekonomi.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Daftar Pustaka

- Abdurahman selaku anggota DPRD Inhil komisi III, di Tembilahan pada tgl 19 juli 2017.
- Ahmad, Jumal., 2016, "Pemikiran Ekonomi Abdul Mannan". Dikutip dari <https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2014/02/19/pemikiran-ekonomi-abdul-mannan/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 jam 13.00 WIB.
- Andrismar selaku Sekretaris BAPPEDA Indragiri Hilir di Tembilahan pada Tanggal 4 oktober 2017.
- Antonio, Syafi'i & Aam S., 2010, "Peranan Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Daerah". *HARMONI, Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. IX, No. 33 Januari - Maret 2010, Bogor: Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Tazkiya.
- Arif, Nur Rianto., 2015, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia
- Arsyad, Lincolin., 2011. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Kedua. Yogyakarta: BPPE.
- Asdar, Yusup., 2014, "Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedar Naqvi", Desember 2014, Vol. 11, No. 2.
- Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al., 2002, *Faathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, alih Bahasa Ghazirah Abdi Ummah, Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, Cet 1, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ayu, dkk., 2013, "Dampak Pembangunan Fisik Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Prorinsi Sulawesi Tenggara", *Social Science Journal* Vol 1, No 1.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. *Perubahan RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018*. Tembilahan: Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 2016.
- Badan Pusat Statistik Indragiri Hilir, *Katalog Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2016*, Tembilahan: BPS Inhil.
- Bahalau, Yoan, Een Novritha Walewangko dan Hanly F. Dj. Siwu., 2015, "Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Upaya Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara (Periode 1994-2013)", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 15 No. 04 Tahun 2015.
- Bungin, Burhan., 2011, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.

- , 2016, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Burhan Selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah BAPENDA Indragiri Hilir, di Tembilahan pada tanggal 5 oktober 2017
- Data Badan Pusat Statistik Indragiri Hilir., 2016 “Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir 2016”, dikutip dari <https://inhilkab.bps.go.id/frontend/linkTabelStatis/view/id/292>, diakses pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017. Pukul 10.16 WIB.
- Data Badan Pusat Statistik yang didapat dari kementrian Agama 2016.
- Data Statistik Sektorial Kabupaten Indragiri Hilir 2013*, Tembilahan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
- Depertemen Agama Republik Indonesia., “Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid II, III, VI”, Naskah Asli Milik Depertemen Agama Republik Indonesia, (Percetakan UII: Yogyakarta, tanpa tahun).
- Farid, F.R., “*Theory of Fiscal Policy in an Islamic State*”. *J. Res. Islamic Econ.*, Vol. 1, No. 1, pp. 15-30 (1403/1983). King Ahdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia.
- Ginting, Ekayanta., 2017, “Kelahiran Uni Soviet”, dikutip dari https://www.academia.edu/6428087/Kelahiran_Uni_Soviet, diakses pada hari Senin 3 April jam 16.56 WIB.
- Hadi, Soetrisno., 1985, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum UGM.
- Haneef, Mohammed Aslam., 2010, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer analisis komparatif terpilih*. Jakarta: Rajawali.
- Hariadi, Pramono., 2010, “Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah” *Trikonomika* Volume 9, No. 2, Desember 2010.
- Hartono, Djoko Setyo, “Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Krisis Ekonomi Eropa”, Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan 112 Fakultas Ekonomi UNIMUS 2011.
- Hartono, Djoko Setyo., 2011, “Seminar Nasional Ilmu ekonomi Terapan 112”, Fakultas Ekonomi UNIMUS. *Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Krisis Ekonomi Eropa*.
- Haryanto, Joko Tri., “Desentralisasi Fiskal Seutuhnya Oleh, pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI”.
- Helim, Abdul., 2012, “Kumpulan Kaidah Fikih tentang Siyasa/Politik/Kekuasaan”, <http://ushulfikih.blogspot.co.id/2012/09/kumpulan-kaidah-ikih-tentang->

siyasah-politik-kekuasaan.html, diakses pada hari sabtu tanggal 25 september 2017 pukul 07.26 WIB.

- Herdiansyah, Haris., 2014, *Metode penelitian kualitatif (untuk ilmu-ilmu social)*, cet. III, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hermansyah, Haris., 2017, “Kebijakan Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Nasional”, **dikutip dari** http://harishermansyah84.blogspot.co.id/2015/04/makalah-pengaruh-kebijakan-fiskal_28.html, diakses 12 Maret jam 14.25 WIB.
- Heykal, Mohamad., 2014, “Ibnu Khaldun & Pengaruhnya Dalam Kebijakan Fiskal”, **dikutip dari** <https://accounting.binus.ac.id/2014/07/23/ibnu-khaldun-pengaruhnya-dalam-kebijakan-fiskal/>, diakses pada hari sabtu tanggal 2 Desember 2017 jam 22.00 WIB.
- Ibu Mugomulyo, Selaku tenaga pengajar di Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah. Di Kuala Enok pada tanggal 17 Juli 2017.
- Jaelani, Aan, 2012, “Pengelolaan APBN Dan Politik Anggaran Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *MPRA* 2012. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Jumiati, Ipah Ema., Tanpa Tahun, “Sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha Dan Masyarakat Sipil (Civil Society) Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Cilegon”. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Kamaruddin., Tanpa Tahun, “Pemikiran Politik Ibnu Khaldun dan Pembentukan Teori *Sosiologi Politik*”, Dosen Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.
- Karim, Adiwarmam., 2012, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi ke 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mannan, Muhamma Abdul, 1997, *Islamic Economic Theory and Practice*, alih Bahasa M. Nastangin, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Cet. 1. Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa.
- Masykur Hz, Selaku Kasubbid Sumber Daya Alam dan Pertanian BAPPEDA Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan, 4 oktober 2017.
- Mawardi, Al, 1995, *Adab al-Dunya wa-al-Din*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Moleong, Lexy., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. XV. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mth, Asmuni., 2003, “Konsep Pembangunan Ekonomi Islam”, *Al-Mawarid* Edisi X.
- Muammam, Khalif., 2009, “Factor kegemilangan Tamadun Islam: Pengajaran dari Masa Lalu”, *Jurnal Hadhari Bil Universitas Kebangsaan Malaysia*.

- Muhammad., 2002, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Salemba Empat.
- Mujiatun, Siti., Tanpa tahun, “Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Islam”, Fakultas Ekonomi UMSU.
- Mujib, Ahmad., 2017, “3 Langkah Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman”, di kutip dari <http://www.wikipendidikan.com/2017/05/analisis-data-kualitatif.html>, diakses pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 jam 16.17 WIB.
- Multazam., Ahmad, 2014, “Hadis tentang Amanah”, <https://multazam-einstein.blogspot.co.id/2013/03/hadis-tentang-amanah.html>, diakses pada tanggal 28 November 2017, pukul 07.20 WIB.
- Nawawi, Hadari., 2012, *Metode Penelitian Bidang Sosial, cet. XII*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur., 2012, “Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia”, *ISLAMICA*, Vol. 6, No. 2, Maret 2012. Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan.
- Pusparini, Martini Dwi., Tanpa Tahun, “Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan”, *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
- Qardawi, Yusuf 1995, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, Asmak Ab., 2009, “Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia”. *Shariah Journal*, Vol. 17, No. 1, 113-152. Academy of Islamic Studies, University of Malaya.
- Rahmawati, Lilik., 2008, “Kebijakan Fiskal dalam Islam”. *Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 2, Desember 2008. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Riadi, RM dan Caska., Tanpa Tahun, *Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Riau*, (Pekanbaru: Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat FKIP UR)
- Rosyida, Isma dan Fredian Tonny Nasdian., 2011, “Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan”. *Jurnal Sodality*. ISSN: 1978-4333, Vol. 05, No. 01 30 Maret 2011, Bogor: Institut Pertanian Bogor Fakultas Ekologi Manusia.
- Said Syarifuddin, Selaku SEKDA Kab. Indragiri Hilir, di Tembilahan, 19 Juli 2017.
- Salim, Agus., 2006. “Teori dan Paradigma Pemelitian Sosial”. Edisis. 2, Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Sebayan, Asnita Frida., 2005, “Kinerja Kebijakan Fiskal Daerah Di Indonesia Pasca Krisis”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10 No. 3.
- Setianingrum., Any., 2013, “Desentralisasi Fiskal Kontemporer Dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam”, *Ekonomika-Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Az Zahra Jakarta, Vol. 4 No.1 Bulan Januari.
- Seto, Septian Hario., Tanpa Tahun, “Menggagas Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Melalui Obligasi Syariah”.
- Somad, Bukhori Abdul., 2015, “Nilai-Nilai Masalah Dalam Hukum Potong Tangan: Analisis Kritis Perspektif Hadis Ahkam”, <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ma-dania/article/viewFile/24/25>, *Jurnal MADANIA* Vol. 19, No. 1, Juni 2015, Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Sugiyono., 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, cet. XXI, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukirno dalam Nur Rianto, 2015, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sukma, Romi., “Strategi Pembangunan Sosial: Upaya Pengentasan Masalah Kemiskinan”, dikutip dari <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/6010>, di akses pada Sabtu 8 April 2017 jam 12.30 WIB.**
- Sukotjo., 2009, “Produktivitas Suatu Faktor Penentu Bagi Pembangunan Sosial Dan Ekonomi” *Majalah Ilmiah Ekonomika* Volume 12 Nomor 3, Agustus 2009.
- Sumardi selaku Ketua Komisi IV DPRD Indragiri Hilir di Tembilahan pada tanggal 18 Juli 2017.
- Supangat, 2013, “Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Economica*, volume IV/ Edisi 2/ November 2013. Semarang: IAIN Walisongo.
- Supriadi, Ady., 2017, “Keterkaitan antara kebijakan fiskal dengan Pengeluaran Pemerintah”, Dikutip dari <http://www.skokul.com/1780/keterkaitan-antara-kebijakan-fiskal-dengan-pengeluaran-pemerintah/>, diakses pada Sabtu tanggal 2 Desember.
- Suryono, Wiranto Bagus, dalam Hasibuan., Tanpa Tahun, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah”, Tanpa No.
- Suyanto., 2010, “Flypaper Effect Theory Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 11, Nomor 1, Juni 2010, Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo.

- Syamsi, Ibnu., 1983, “Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara”, Jakarta: Bina Aksara,.
- Syamsudin Uti, sebagai tokoh masyarakat Indragiri Hilir mantan DPR D Indragiri Hilir, mantan calon Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan pada tanggal 19 Juli 2017.
- Syarifuddin sebagai masyarakat yang memiliki kebun dan bekerja sebagai petani di Benteng Inhil tanggal 8 Juli 2017.
- Tanpa Nama., 2011, “Tahapan Analisis Data Penelitian Kualitatif”, Dikutip dari <https://bersukacitalah.wordpress.com/2011/01/20/tahapan-analisis-data-penelitian-kualitatif/> Akses Minggu 9 April 2017 jam 22.30 WIB.
- Tanpa Nama., 2016, “10 Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomia”. dikutip dari dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/perpajakan/peran-kebijakan-fiskal, diakses pada hari Selasa 4 April 2017 jam 15.30 WIB.
- Tanpa Nama., 2016, “Bupati Inhil 'Wardan' Paparkan Keunggulan Pertanian Kelapa Dihadapan Komisi B DPRD Riau 2015”, dikutip dari <http://detakriau.com/read-5049-bupati-inhil-wardan-paparkan-keunggulan-pertanian-kelapa-dihadapan-komisi-b-dprd-riau-.html>, di akses hari Senin 10 April 2017 jam 20.20 WIB.
- Tanpa Nama., 2017 “Gubri Akui Ekonomi Inhil Stabil”, *Posmetro Indragiri*, Edisi; 1.533/V, hlm 1 & 11, kolom 1, Tembilahan.
- Tanpa nama., 2017, “Pengertian dan macam-macam adil”, dikutip dari <http://www.bacanmadani.com/2016/08/pengertian-dan-macam-macam-adil.html>, diakses pada hari Jum'at tanggal 24 November.
- Taufik Hidayad selaku anggota DPRD Indragiri Hilir Komisi II, di Tembilahan pada tanggal 18 juli 2017.
- Taufik, “Manusia dalam pandangan ekonomi islam,” dikutip dari <http://taufikopini.blogspot.co.id/2011/01/manusia-dalam-pandangan-ekonomi-islam.html>, pada Selasa 4 April 2017 jam 17.30 WIB.
- Thobias, Erwin, A.K. Tungka, J.J Rogahang. dkk., 2013, “Pengaruh Modal Sosial Terhadap Perilaku Kewirausahaan”, *Journal Acta Diurna*, Edisi April.
- Tinambunan., Andri, 2017, “Entas Kemiskinan dengan Zakat sebagai Fiskal Negara”, dikutip dari <http://www.acehtrend.co/entas-kemiskinan-dengan-zakat-sebagai-fiskal-negara/>, diakses pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017.
- Ulum, Fahrul., 2009, “Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan”. *Al-Qanun*. Vol. 12, No. 2, Desember 2009.
- Utomo, Sugeng Hadi dan Hadi Sumarsono., 2009, “Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur”, *JESP Vol. 1, No. 2, 2009*.

Viprianti, Nyoman Utari., Tanpa Tahun, “Studi Sosial Ekonomi Tentang Keterkaitan antara Modal Sosial dan pembangunan Ekonomi wilayah studi kasus di Empat Kabupaten di Provinsi Bali” *Thesis*, Bogor: Sekolah Pasca Sarjana IPB.

Widani, Cok Istri Krisnanda., Ni Made Adi Erawati., 2016, “Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Indeks Pembangunan Manusia”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Bali*, Vol.17.1. Oktober.

Yudha Manggala Putra, “*Banyak Faktor yang Sebabkan Desa Tertinggal*”, *Republika.co.id* dikutip dari http://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/nmum5x, diakses pada Sabtu 24 November 2017, pukul 06:02 WIB.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DRAF WAWANCARA

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Pembangunan social ekonomi apa yang sudah dilakukan dan di programkan untuk dimasa jabatan bapak/ ibu?
2. Adakah pengembangan atau inovasi program pembangunan sosial ekonomi atau mengikuti masa jabatan sebelumnya?
3. Bagaimana program-program pembangunan sosial ekonomi di daerah INHIL?
4. Apa kebutuhan mendasar yang dibutuhkan masyarakat inhil sendiri untuk mengembangkan pembangunan social ekonomi?
5. Idealnya menurut anda system pembangunan social seperti apa yang dibutuhkan masyarakat INHIL?
6. Menurut bapak/ Ibu program apa yang dapat membahagiakan masyarakat INHIL khususnya?
7. Apa dan bagaimana program peningkatan kualitas hidup yang di jalankan pemerintah untuk masyarakat daerah INHIL?
8. Bagaimana pemerintah meningkatkan kualitas SDM untuk produktif, menguasai IPTEK dan berwawasan lingkungan?
9. Pembangunan infrastruktur sering mengalami hambatan dan ditunda dalam jangka waktu yang lama apakah ini permasalahan sumber dana atau ada kendala lain?
10. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pihak swasta yang ada didaerah?
11. Apakah pihak swasta sering dilibatkan dalam pembangunan sosial dan ekonomi?
12. Bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat, pendidikan dan kesehatan masyarakat INHIL saat ini? Kendala apa yang dihadapi dalam mengembangkan 3 kategori tersebut?
13. Menurut bapak/ ibu secara pribadi adakah peningkatan perekonomian masyarakat saat ini? Alasannya!
14. Bagaimana tingkat kejahatan di daerah INHIL saat ini?

NB. Sekiranya pertanyaan wawancara ini tidak dapat di jawab langsung mohon kesedian Bapak/ Ibu yang bersangkutan untuk mengirimkan hasil jawaban di alamat email Salmiamiss@gmail.com atau di no Whatshap 085271576902. Atas kesediannya menjadi responden, Peneliti mengucapkan Terima Kasih. Wassalam

Hormat Saya

Salmia, S.E. I

INTERVIEW GUIDE

Masyarakat Indragiri Hilir

1. Bagaimana Bapak/ Ibu melihat pembangunan daerah saat ini?
2. Apakah ada peningkatan dalam pembangunan saat ini?
3. Apa hal yang sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat Indragiri Hilir?
4. Menurut Bapak atau Ibu dibandingkan daerah lain bagaimana pembangunan social dan ekonomi di daerah kita?
5. Apa harapan bapak atau ibu dengan pemerintah terkait pembangunan social ekonomi di daerah?

DRAF WAWANCARA BAPENDA

1. Bagaimana penyusunan kebijakan pendapatan daerah di INHIL?
2. Dalam pemantauan terhadap pendapatan daerah kejanggalaan apa yang sering di temui?
3. Bagaimana dengan rencana program kerja dalam badan pendapatan daerah?
4. Seperti apa rencana program yang dilakukan dalam meningkatkan keuangan dan aset daerah?
5. Bagaimana dengan sistem penyusunan kebijakan pajak di INHIL?
6. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar pajak di INHIL?
7. Adakah inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi membayar pajak sehingga pendapatan pajak daerah meningkat?
8. Menurut bapak/ ibu pribadi langkah apa yang sebaiknya harus diterapkan untuk meningkatkan pajak daerah khususnya INHIL?
9. Penyusunan atau program seperti apa untuk pengembangan pendapatan daerah?
10. Koordinasi apa yang telah dilakukan BAPENDA dengan Instansi terkait dalam pengembangan pendapatan daerah?
11. Apa hasil dari pengembangan pendapatan yang sudah dilakukan? dan apa yang akan di lakukan untuk kedepannya?
12. Adakah inovasi yang dilakukan oleh SUBI untuk pengembangan dan pendapatan daerah?

2. LAMPIRAN FOTO-FOTO DENGAN INFORMAN

- 2.1. Wawancara Dengan SEKDA Terkait Pembangunan Infrastruktur Daerah Dan Wawancara Dengan BAPENDA Terkait Pendapatan, Pajak Dan Pengeluaran Daerah.



2.2. Wawancara dengan DPRD terkait pembangunan ekonomi daerah dan social.



INDONESIA

2.3. Wawancara dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terkait pembangunan social ekonomi, infrastruktur daerah dan terkait CSR.



2.4. Wawancara dengan anggota DPRD terkait pembangunan daerah dan wawancara dengan tokoh masyarakat terkait tanggapannya mengenai program yang dijalankan pemerintah



TABULASI WAWANCARA LENGKAP

DPRD Indragiri Hilir

1. **Informan 1** (Wawancara dengan Bpk Taufik Hidayad selaku anggota DPRD Indragiri Hilir Komisi II)

Kebijakan fiskal ya! Kalau ekonomi maju di Inhil nie perkebunan, secara spesifik 70% ekonomi masyarakat di tunjang dari perkebunan, pertanian, kalau perikanan ada karena sungai dan laut juga ada. Transportasi kita ketergantungan sama laut mungkin akses darat hanya 30%. No 1 ini kalau dilihat secara ekonomi seperti yang diawal saya sampaikan inhil tidak terlepas dari baiknya dari pada hasil dari perkebunan masyarakat kita, karena 70% pendapatan dan kegiatan ekonomi di Inhil di tunjang dari perkebunan dan sebagian pertanian tapi lebih menonjol keperkebunan. Ada program yang sekarang ini upaya untuk meningkatkan dari penyelamatan kebun khususnya kebijakan yang dilakukan oleh dewan dan khususnya di komisi 2 dari pada sistem swakelola Alhamdulillah dalam 2 thun ini kita coba jalankan itu dengan adanya swa kelola ini ada pencapaian target untuk meyelamatkan kebun semakin banyak kita ketahui hampir 100.000 hektar perkebunan di Inhil rusak karena naiknya air laut, atau krena sudah tua dan segala macam kondisi perkebunan yang tersisa di Inhil hampir 400.000 saja secara umum, di Inhil sendiri kepemilikan lahan dan perkebunan turun temurun dari kake, bapaknya. kalau untuk investasi memang harus mengikuti aturan dan regulasi, Kalau ada perusahaan yang ingin ber investasi membuka lahan itu seharusnya memang di batasi dan pembatasan, kalau masyarakat sendiri tdk boleh di batasi. Tapi jela pembatasan itu ada kalau itu lahan pertanian di upayakan tidak ada alih fungsi lahan, kalau untuk kelapa masyarakat tidak di perbolehkan diali fungsikan ke sawit. Seandainya masyarakat atau ingin membuka perkebunan 100 baris dan memiliki tanahnya tentu tidak bisa di larang. Untuk perusahaan swasta skala besar di himbau untuk tidak menjadikan perkebunan kelapa biasa dialih fungsikan kesawit. Karena pemerintah Inhil sendiri tetap ingin memberdayakan klapa rakyat/ kelapa biasa lokal. Karena untuk kelapa hidrolik terbesar di Indonesia memang di Inhil. 10 atau 20 tahun yang lalu kelapa kita hanya dikelola untuk di buat minyak dan turunannya tidak banyak, minyak goreng sabun. Tapi untuk sekarag ini turunna dari kelapa itu sudah mulai banyak di buat tepung santan minuman dsb otomati dengan demikian kelapa kering itu atau bulat. Kelapa bulat pekerjaannya mudah dan harganya sudah semaiin mahal karena turunannya sudah banyak kaya pengelolaan perusahaan terpadu di guntung, di pulau burung maupun perusahaan yang ada disekitar sini. Untuk perusahaan asing atau swasta akan sedikit terkendla sekarang, karena peraturan daerah tentang tata ruang atau rt/rw smapai sekarang belum di saahkan. Pemeritah pusat dalam pengembngan investasi baik

asing untuk perijinan karena sudah terkendali, dan perijinan gangguan sudah di hapus.

2. **Informan 2** (Wawancara dengan Bpk Sumardi selaku Ketua Komisi IV DPRD Indragiri Hilir di Tembilahan pada tanggal 18 Juli 2017)

Kalau hari ini kita melihat memang pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik, hal ini karena juga sudah di dukung infrastruktur seperti jalan yang baik jembatan sudah menghubungkan di masing2 desa ini kan membuat masyarakat lebih mudah melakukan perekonomian, komisi 4 membidangi kesejahteraan masyarakat, semakin bagusnya perekonomian masyarakat semakin membantu dalam hal-hal social kemasyarakatan. Adapun program2 kita akan melakukan pendataan terhadap para posisi yang miskin, anak yatim dan lain sebagainya yg terkait dengan sosial, kalau bisa angka kemiskinan di Indragiri Hilir bisa menurun. Prioritas bagi anak-anak yang tidak mampu tapi berprestasi kita perjuangkan ke dinas pendidikan tentang beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu tetapi berprestasi nanti kalau seandainya anak tidak mampu dan kurang berprestasi kita coba juga di bantuan pendidikan miskin. Pengembangan keislaman Alhamdulillah komisi kita mitra kerjanya di bagian KESRA (Kesejahteraan Rakyat) bagian agama, kita juga membuat dan aktif mendukung program magrib mengaji dengan Pemda setempat, juga semua koordinasi keagamaan mereka menjalankan program masing-masing. Saya rasa program ini

....

3. **Informan 3** (Bpk Abdurahman selaku anggota DPRD Indragiri Hilir komisi III, di Tembilahan pada tgl 19 juli 2017) Saya mengetahui bahwa ada 2 kebijakan, yakni Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pada dasarnya dpr tidak memiliki Visi misi, tetapi visi misi dibuat oleh bupati dan wakilnya. RPJM Sehingga dpr hanya mengaplikasi kebijakan aja dan mengadvokasi apakah itu berkesesuaian dengan RPJMD yang ditetapkan oleh kepala daerah terpilih, sehingga dri bupati. infrastruktur memang sudah berjalan diluar itu dari komisi 3 kita hanya mengadvokasi dari tingkat urgensi misalnya jalan A dan Jalan B yang menjadi skala prioritas, misalnya di jalan kota baru itu seharusnya di jadikan skala prioritas itu saja sih yang kita coba bela dari komisi 3 hal semacam itu. Idealnya Menjembatani percepatan pembangunan tetapi dpr itu adalah politisi yang memiliki kepentingan syukur-syukur jika kepentingannya itu untuk orang banyak. Kita akan susah apabaila berbicara tentang inovasi karena kami hanya kinerja aja Cuma kalau inovasi hanya masalah teknis saja karena kita sudah ada aturan dari tata aturan perundangan-undangan saja. Hanya seolah mengiyakan saya atau menidakkan dan meluruskan yang dianggap kurang tepat dari program pemerintah, skala prioritas kita dari masa jabatan sebelumnya di inhil ada skla

multiers, yakni pembangunannya menelan dana yang sangat besar ini butuh lebih dari satu anggaran sampai masa jabatan bupati atau 2 tahun anggaran hingga 3 tahun anggaran yang kaya itu dari bupati saat ini apalagi karena anggaran sangat besar. Misalnya juga proyek mercusuar, yang kenyataannya dasen dan dasolen misalnya banyaknya kendala yang pembangunan proyek2 terbengkalai, karena sebenarnya tidak di perlukan misalnya Islamic Center, gedung UNISI. Penyebabnya anggaran karena dana tidak ada dimana bentuk penganggaranya multiers yang sifatnya kebijakan daerah karena bukan merupakan skala provinsi dan bukan skala nasional. Statusnya baru jalan penghubung kecamatan sehingga itu urusan daerah. Bupati sebenarnya tidak menginginkan proyek multiers karena anggarannya cukup besar dan minimal 2 tahun anggaran. Kaya jempatan sungai gergaji itu itu proyek multiers karena tidak bisa digunakan dalam 1 tahun anggaran. Di Inhil SDM nya bagus, secara pertumbuhan bagus, tetapi kita tidak mengetahui bagus apa bagaimana, contohnya seperti saat sekarang. Mereka sebenarnya tahu. Jika pertanyaan etisnya lebih baik apa buruk itu perlu data akurat. Tetapi untuk masyarakat melek huruf diperkirakan masyarakat Inhil hampir 100% namun tidak ada yang 100% bahkan bupati inhil sebelumnya memiliki program 1 rumah 1 sarjana. Riau sendiri. Idealnya pembangunan social ekonomi yang harus terus ditingkatkan adalah pertanian itu yang ampuh. Dari sisi daya beli hari ini kita menurun inflasi kita kita terus naik, lihat saja akibat dari perkebunan yang banyak rusak sehingga bulan September ada festival kelapa nasional dan Negara sahaabat akan banyak yang datang. Kita memberikan fasilitas eksafator untuk perbaikan tanggul walaupun belum maksimal. Sehingga kita juga menyediakan fasilitas misalnya jalan untuk mempermudah masyarakat dalam menjual hasil perkebunannya baik transportasi darat maupun laut. Untuk program peningkatan kualitas hidup masyarakat hari ini bagus soalnya program pendidikan anak usia dini untuk magrib mengaji, dan program 1 PAUD 1 desa. Karena Riau bumi melayu sangat identic dengan islam. Sehingga yang terlibat dari program magrib mengaji mendapatkan intesif dari pemda, itu untuk semua desa di INHIL. Kita memiliki perda CSR, CSR sebenarnya untuk membantu fasilitas umum dan berkelanjutan, itu yang tersu kita control, csr pemahamn lamanya yang dibawa sampai saat ini, pengawalannya dari komisi tiga terkait pelaporan perusahaan CSR.

Untuk sdm yang produktif dan mengerti IPTEK misalnya utuk wilayah tembilahan misalnya penggunaan internet gratis di wilayah kantor bupati dan taman. Karena kita berharap program pemerintah yang tenang dan kami membawahi kominfo juga, kita berharap internet mudah dapat diakses oleh masyarakat desa, komisi 3 menyediakn fasilitas dan infrastruktur kami hanya menyediakan lapaknya, peningkatan perekonomian saat ini bagus artinya

masyarakat inhil dulukan kelapa dulu harganya masih kurang sekarang sudah mulai ada harganya. Peralihan kelapa yang tradisional sudah mulai di moderisasi ala-ala ptpn kaya sawit meskipun berbeda komoditas ini kalau kelapa bisa langsung. System ekonomi dipengaruhi oleh perbankan

Sekretaris Daerah Indragiri Hilir

4. **Informan 4** (Said Syarifuddin, Selaku SEKDA Kab. Indragiri Hilir, di Tembilahan, 19 Juli 2017): Kita ketahui bahwa daerah kita mayoritas penduduknya merupakan berprofesi sebagai pekebun/ petani, sehingga program-program pemerintah selalu mengedepankan untuk perbaikan dalam meningkatkan hasil perkebunan. Festival kelapa internasional akan dilaksanakan pada bulan september tahun ini, untuk mendukung program pemerintah dan memberikan kesempatan untuk masyarakat, karena daerah yang memiliki kelapa hydro terbesar di dunia yakni Inhil merupakan salah satu yang memiliki kelapa hydro. Namun saat ini masyarakat dihadapkan dengan masalah kerusakan kebun kelapa. Sehingga pemerintah sudah melakukan program-program untuk menanggulangi kerusakan kebun kelapa di inhil

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indragiri Hilir

5. **Informan 5** (Wawancara dengan Andrismar selaku Sekretaris BAPPEDA Indragiri Hilir di Tembilahan pada Tanggal 4 oktober 2017): Pada dasarnya usaha untuk melakukan pembangunan darah terus dilakukan untuk jalan-jalan lintas provinsi pemerintah juga melakukan banyak lobi ke pusat untuk pelaksanaan pembangunannya, walaupun yang sulitnya untuk di daerah Indragiri Hilir, pemerintah sering mengalami defisit anggaran hingga 21 t 3 tahun deficit dan penurunan dana yang masuk berkisar 40 miliar jadi banyak terhambatnya karena alokasi dana yang masih kurang. Sedangkan untuk kerusakan yang sangat cepat terjadi karena struktur tanah di indragi memang banyak tanah gambut, belum jadi pembangunan infrastruktur seing terhambat karena masalah kondisi Alam. Untuk pembangunan jembatan yang seharusnya dapat dilakukan agar mengurangi penggunaan transportasi laut sudah pernah direncanakan walaupun sampai saat ini belum ada realisasi lanut. Karena jika infrastruktur terbagun dengan baik maka akan mempermudah masyarakat untuk menjual hasil pertanian dan perkebunan. Mahasiswa yang berkuliah di ibu kota kabupaten juga akan mudah untuk dapat membantu pekerjaan org tua di kampung karena akses darat yang baik bisa mempermudah mahasiswa untuk pulang pergi dalam waktu sehari dan lebih hemat. Beberapa desa dan kecamatan masih ada yang infrastrktur listriknya belum bisa hidup siang malam jadi hanya malam saja. Ini akibat dari infrastruktur jalan yang juga belum selesai sehingga

untuk memasukkan bahan baku tiang listrik dan sebagainya asih tidak memungkinkan, sehingga infrastrukur jalan di Inhil yang terhambat berakibat bagi pembangunan daerah listrik, ekonomi dan akses pendidikan masyarakat. Strategi lain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat karena masyarakat kita mayoritas berkebun sehingga trio pengairan dimana setiap kecamatan diberi alat untuk bisa mengerok 1 kecamatan 1 pengerok. Walaupun untuk dananya dari pemerintah masyarakat juga banyak yang melakukan swadaya untuk mengoperasikan mesin tersebut baik pengerukan jalan maupun kebun. Sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan renovasi kebun karena di Indonesia sendiri Inhil merupakan penghasil kelapa hydro terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Nah maka dari itu kemarin telah dilakukan festival kelapa internasional. Sehingga kelapa-kelapa yang dulu hanya bisa dibuat minyak sekarang bisa diinovasi bahkan di buat dalam minuman kemasan dll serta produk kreativitas lainnya. Adanya system Resi Gudang yang bekerja sama dengan perusahaan yang mengelola hasil dari perkebunan di INHIL hal ini sangat benefit bagi perusahaan. Belum lagi program pembenahan tanggul 1 kecamatan 1 excavator programnya ini bernama trio tata air.

6. **Informan 6**, (wawancara dengan Masykur Hz, Selaku Kasubbid Sumber Daya Alam dan Pertanian BAPPEDA Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan, 4 oktober 2017) Dalam mengawasi perusahaan yang memberikan CSR pihak kami selalu melakukan diskusi dengan pihak perusahaan yang mengelola hasil sumber daya alam dan membrikan pengawan terhadap perusahaan tersebut kalau perusahaan yang di guntungkan dan di kuala enok CSR yang diberikan pun cukup besar. Sedangkan kalau Bank Syariah sendiri Sampai saat ini bank syariah belum fair dalam melakukan CSR nya serta sumbangsinya bagi pembangunan daerah INHIL belum nampak. Sedangkan untuk pendidikan di Indragiri Hilir sudah sangat baik dengan adanya kampus di Indragiri Hilir masyarakat sudah bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi yang aksesnya dekat dengan kampung dan bisa ditempuh dengan hitungan jam bisa berkuliah dan sambil membantu orang tuanya berkebun dikampungnya. Terkait beberapa bangunan kampus yang awalnya akan di gunakan untuk kampus tersebut namun sekarang malah belum di fungsikan saya tidak bisa memberikan komentar karena say tidak layak untuk mengomentari hal tersebut.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

7. **Informan 7** (Wawancara dengan Bpk Burhan, MH Selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah BAPENDA Indragiri Hilir, di Tembilahan pada tanggal 5 oktober 2017)

Karena setiap tahunnya pendapatan daerah tidak meningkat signifikan dan diluar dari target dan perhitungan pemerintah, maka pemerintah melalui bapenda sekarang ini melakukan jemput bola yang untuk saat ini pembayaran pajak tanah masyarakat. Masyarakat kadang enggan membayar pajak tanahnya misalnya perkebunan dengan dalih sejak zaman nenek moyang sudah ada tanah itu dan tdk pernah di bayar, kepekaan masyarakat yang sangat minim mengakibatkan pendapatan daerah yang didapat juga sangat minim padahal untuk inhil sendiri pendapatan yang harus terkumpul harus berkisar ... namun untuk saat ini yang terkumpul baru berkisar ini sangat jauh dari target yang diharapkan. Kita baru saja melakukan studi banding terkait pengelolaan pendapatan daerah dari Jawa Barat, untuk memaksimalkan dan memudahkan pemungutan pajak ini akan di buat program yang dapat diakses masyarakat melalui situs resmi dari bapenda INHIL yang programnya nanti akan di launching dalam waktu dekat, hal ini untuk memudahkan dan membuat transparansi terkait perpajakan di Indragiri Hilir. Sekarang kita konsen untuk melihat hasil usaha baru masyarakat yang memiliki keuntungan besar, seperti pajak burung walet, pajak tambang pasir yang merupakan milik perorangan di daerah kota baru, pajak usaha penjualan hasil bumi dll. Untuk masa jabatan saya sendiri saya ingin melakukan diskusi lebih lanjut terkait renovasi pasar terapung sehingga bisa dimanfaatkan secara luas untuk bisnis masyarakat dan membantu perekonomian daerah. Kita sangat menyesuaikan dengan undang-undang perpajakan diatur oleh Negara. Nah masalahnya sumber pajak yang besar-besarnya sudah langsung di kelola oleh pemerintah pusat jadi sisanya untuk BAPENDA INHIL sendiri mengurus pajak-pajak yang kecil dan agak rumit disini sedangkan masyarakat yang sulit ini sudah dilimpahkan oleh pusat agar dipantau oleh BAPENDA sudah lah sulit kecil lagi. sehingga cenderung lama dalam pengumpulannya. Partisipasi masyarakat masih sangat kecil namun setelah dilakukan program jemput bola seperti ini sehingga masyarakat mengapresiasi pembayaran pajak. Jadi ada beberapa dari pemilik tanah yang belum pernah membayar pajak sudah melakukan pembayaran. yaitu tadi rencananya kita akan membuat program yang memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait pendapatan daerah, serta mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak. Bapenda melakukan koordinasi dengan dinas pembangunan daerah, DPR D Inhil serta pemerintah pusat. misalnya seperti pasar terapung itu dilakukan diskusi untuk perbaikan fasilitas sehingga banyak yang dapat melakukan bisnis di pasar tersebut otomatis apabila pasar tersebut sudah di renovasi akan banyak pendatang dan menghasilkan pendapatan dari penjualan makanan maupun parkir. Karena pekerjaan yang dilakukan masyarakat kian bervariasi dan banyak yang mulai berbisnis sehingga Pendapatan daerah semakin meningkat walaupun peningkatannya belum bisa dikatakan signifikan. Kami akan meminta untuk pemerintah melakukan renovasi di pasar

puji sera sehingga pengelolaan untuk pajak perdagangan, parkir dapat dipungut dan meningkatkan pendapatan daerah.

Masyarakat Indragiri Hilir

8. Informan 8 (Ibu guru di mogomolyo)

Saya di Riau juga pendatang saya suku sunda dan tinggal lama di Jogja, tapi sekarang uda jadi warga Mugomulyo Inhil Riau, di masa soeharto saya sering dengar berita tentang kekayaan Riau saya sampai berfikir Riau itu semegah Singapore soalnya riau merupakan provinsi yang menyumbang separoh pendapatan Negara dari riau. Jadi setelah saya di kenalkan sama ustad saya bapak (suami) saya terima karena disaranin sama ustad orangnya sholeh, tinggalnya di Riau. Setelah nikah diajaklah ke kampung suami, dan suda berkomitmen menetap di kampung suami. Disini saya mengajar dari pelajaran sains sampai pelajaran social padahal baground saya Akuntansi, soalnya untuk menghadirkan pengajar yang dari pendidikan Fisika, Kimia, dan Biologi itu sudah mbak kasih honorinya harus besar sedangkan kita jua

9. Informan 9 Syamsudin Ute, Pengusaha, Mantan DPRD Inhil, mantan calon Bupati Inhil, calon wakil bupati Inhil 2018.

Pemerintah seharusnya melakukan inisiatif untuk meningkatkan ekonomi dengan cara memanfaatkan bank daerah maupun bank-bank yang sudah ada didaerah dengan menitipkan dana yang masuk di depositokan. Keuntungan dari deposito tersebut kemudian di salurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan terutama untuk penyaluran beasiswa kepada masyarakat Inhil yang berprestasi dalam bidang olahraga dan akademik. Melihat sektor utama di kabupaten Indragiri hilir adalah bercocok tanam dan berkebun alangkah baiknya hasil perkebunan dan beras lokal setiap kecamatan di beri label dan di jual apabila telah memenuhi kebutuhan pokok area tersebut. Karena beras lokal menurut saya tidak kalah bahkan lebih enak dari pada beras yang banyak dipasaran baik yang impor ataupun dari daerah lain.

10. Informan 10, H. Syarifuddin masyarakat Kecamatan sungai batang, petani dan pekebun.

Ah... harga barang-barang kebun seringnya turun, jadi bingung dibilang kita bahaya dimasa sekarang, Sering kali rasanya kesal kalau hasil kebun sudah di panen kenapa buru-buru dipanen atau di mundurkan jadwal panen karena harganya lagi kurang bagus, setelah uda dengar kabar harganya lagi bagus buru-buru dipanen setelah habis panen harga anjlok lagi mau ditahan takut hasilnya kelapa atau pinang rusak nanti malah gak ada harganya mau di jual uda turun harganya jadi kadang merasa kerja sama hasilnya kurang maksimal.

Lampiran PERDA terkait CSR dan Perusahaan yang Mengeluarkan Dana CSR



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 487 / VII / HK - 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR
Kpts. 487 / VII / HK - 2014 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM DAN
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2014-2018

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya mutasi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 perlu mengubah Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Corporate Social Responsibility;
- b. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi;
- c. bahwa sesuai pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 15 tahun 2007 setiap penanam modal wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat;
- d. bahwa sesuai pasal 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 05/MBU Tahun 2007 Persero dan Perum Wajib melaksanakan Program Kemitraaan BIMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 487/VII/HK-2014 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Corporate Social Responsibility Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018.

Daftar Isi

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indonesia (Ditambah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 2754));
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Koperasi Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kependidikan dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Nomor 204 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21/2007, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kependidikan dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56289);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56411);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pendidikan dan Pengembangan Usaha Kecil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan dan Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
15. Peraturan Menteri Negara Nomor 87 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7005 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Percepatan Perdatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 2011-2025;
20. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/ MBU/ 2007 Tentang Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/ MBU/ 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Nomor PER-05/ MBU/ 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Tingkat II Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20363;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Kerja Tahunan Jawah Sosial dan Lingkungan Pemerintah Terbatas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 Nomor 91; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang peningkatan pendidikan dan pengembangan keterampilan;

Memperhatikan

MENETAPKAN

Menetapkan

KESATU

Perubahan Atas Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Apts. 487/VI/HK-X/14 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Corporate Social Responsibility Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018.

KEDUA

Menunjuk/mengangkat Forum yang tertera sebagaimana tersebut dalam kolom 2, dan mendudukkan dalam Forum sebagaimana tersebut dalam kolom 3 Lampiran 2 Keputusan ini.

KETIGA

Menunjuk/mengangkat Sekretaris Forum yang jabatannya sebagaimana tertera dalam kolom 2, dan mendudukkan dalam Sekretariat Forum sebagaimana tersebut dalam kolom 3 Lampiran 2 Keputusan ini.



KEEMPAT

Forum sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2 Keputusan ini.

KEDUA

mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dengan Perusahaan terkait dengan upaya pemanfaatan Corporate Social Responsibility yang Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018; dan

- b. Melakukan langkah-langkah promotif dan pendekatan dalam upaya pemanfaatan Corporate Social Responsibility dengan perusahaan/perusahaan yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Melaksanakan fungsi administrasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Corporate Social Responsibility Kabupaten Indragiri Hilir;

- b. Membantu dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Corporate Social Responsibility Kabupaten Indragiri Hilir; dan

KEDUAM

c. Mendukung atau memberikan kegiatan Filial
Kendaraan Corporate Social Responsibility Kabupaten
Indragiri Hilir.

Pada-Pada sebagaimana tersebut dalam lampiran
menyebutkan sebagai berikut:

- a. Menekan dan memunculkan perhatian perusahaan
untuk berprestasi di sektor Kabupaten Indragiri Hilir
untuk Insan Indragiri Hilir masa depan.
- b. Melakukan berbagai inisiatif positif dan konstruktif
dengan perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugas
Corporate Social Responsibility.
- c. Melakukan dan menyalurkan rencana kegiatan dan kegiatan
yang akan menjadi target dari akseleerasi program Corporate
Social Responsibility.
- d. Melakukan berbagai program Corporate Social
Responsibility yang akan dilaksanakan melalui
pembinaan di lapangan dalam rangka target kerja dari
tahun anggaran.
- e. Kerja sama dengan dalam rangka pencapaian dan
penguatan pelaksanaan Corporate Social Responsibility
di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai arahan Ketua Forum
New Forum.

f. Memperkuat dan kegiatan kepada Bupati Indragiri Hilir
melalui Asas dan Bidang Administrasi Pemerintahan dan
Pelayanan Publik Kabupaten Indragiri Hilir selaku
New Forum.

KETUJUH

Selanjutnya dengan ini ditetapkan keputusan ini
dibaca dan diucapkan dengan Pembacaan dan Belanja
Daerah (APDD) Kabupaten Indragiri Hilir.

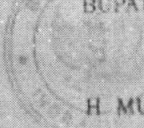
KEDELAPAN

Sebagaimana tersebut dalam lampiran dan terdapat dalam
pembacaan dan diucapkan dengan Pembacaan dan Belanja
Daerah (APDD) Kabupaten Indragiri Hilir.

KESEMBILAN

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

INDONESIA
Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 1 Juni 2017
BUPATI INDRAGIRI HILIR,


3A
H. MUHAMMAD WARDAN

- Tembusan, disampaikan kepada Yth,
1. Gubernur Riau di Pekanbaru.
 2. Kepala Bappeda Provinsi Riau di Pekanbaru.
 3. Inspektur Inspektorat Kab. Inhil di Tembilahan.
 4. Yang bersangkutan.

PT. Berkat Sawit Sejahtera (Kec. Kerawang)	Anggota
PT. Bumi Agri (Kec. Kemuning)	Anggota
PT. Bumi Mandiri (Kec. Tempaling)	Anggota
PT. Bumi Putra Lestari (Kec. Kengk)	Anggota
12. Pokja III (Muyuk, Gas dan Tambang Lainnya)	
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Indragiri Hilir	Ketua
Dinas PU dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
Kabag Adm. Perekonomian dan SDA Setda Kab. Ihib	Anggota
PT. Pertamina	Anggota
PT. Bayus Budiarta (Kec. Kempas)	Anggota
PT. Sumber Kencana (Kec. Kempas)	Anggota
PT. Dumai Biking (Kec. Kempas)	Anggota
PT. Multi Dunia Lestari Abadi (Kec. Kemuning)	Anggota
PT. Riaman Scham Paha Indonesia (Kec. Kemuning)	Anggota
PT. PLN	Anggota
13. Pokja IV (Perikanan, Pariwisata, Industri dan Jasa Lainnya)	
Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Indragiri Hilir	Ketua
Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
Disporabudpar Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
PT. Alam Sejahtera Sejahtera (Kec. Kemuning)	Anggota
PT. Indah Pratama Hotel (Kec. Tempaling Hilir)	Anggota
PT. Hikmah Jaya Beton (Kec. Tempaling Hilir)	Anggota
PT. BNI 45	Anggota
PT. BRI	Anggota
PT. Bank Mandiri	Anggota
PT. Bank Riau Kepri	Anggota
PT. Bank Syariah Mandiri	Anggota
PT. Bank Riau Kepri Syariah	Anggota
PT. BCA	Anggota
PT. Danamon	Anggota
PT. Bank Mega	Anggota
PT. Bank Pania	Anggota
PT. Bank Muammalat	Anggota
PT. Telkomsel	Anggota
PT. Pos Indonesia	Anggota
PT. Pelindo	Anggota




UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,
H. MUHAMMAD WARDAN

SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2014-2018

JABATAN	KEDUDUKAN
1. Sekretaris Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	Ketua Sekretaris
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perencanaan dan Kerjasama Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
6. Kepala Bidang Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pengaduan Layanan Dinas Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
7. Kepala Sub Bagian Fasilitas, Bidang Perencanaan Modal dan BUMD pada bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Inhil	Anggota
8. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Perikanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
9. Kepala Sub Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
10. Kasubbid Kerjasama Pembangunan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

 H. MUHAMMAD WARDAN

DAFTAR PERUSAHAAN PMA DAN PMDN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
4/8 JANUARI 2016

NO	LOKASI PROYEK	PERUSAHAAN	MODAL	ALAMAT BANTOR	SEBANG USJAH	NILAI INVESTASI (Rp.)	REALISASI INVESTASI (Rp.)
1	KEC. PLONGIRAN Desa Tanjung Simpang	1. PT. SURUNGSI ISHAMA HUDA	PMA	Desa Tg. Senang, Kec. Pelongiran	PEL	471.110.000.000	10.000.000.000
		2. PT. SIASTRABAU SA MITINDO PERKASA	PMDN	Gunungpaku, Melayu, Lela, Pula	Perkebunan Kelapa Sawit	462.279.833.230	
2	Pelongiran Simpang Lela Simpang Lela Desa Suka Rantan	3. PT. CITRA MANEVI LAWITA	PMDN	Desa Pelongiran, Kecamatan Pelongiran	Industri Kelapa Sawit	1.000.000.000	
		4. PT. TAKUNG HAI INDO PLANTATION	PMDN	Desa Tg. Simpang, Kec. Pelongiran	PEL	401.000.000.000	9.470.000.000
		5. PT. BUKAH HEKSA NUSA SEJATI	PMDN	Desa Suka Rantan, Kecamatan Suka Rantan	PEL		
3	PELAU BULUNG Desa Pulau Bulung	6. PT. GUNTING NASRAT AMAM, IS	PMDN	Desa Suka Rantan, Kec. Tg. Senang	Makan Sawit		400.000.000.000
		7. PT. BIAU SAKTI UNITED PLANTATION	PMDN	Desa Pulau Bulung, Kec. Pulau Bulung	Kelapa Hibrida	11.710.000.000	
4	KEC. MANDAM	8. PT. SATINA PERIASA ASIUNG	PMDN	Desa Pulau Bulung, Kecamatan Pulau Bulung	Industri Kelapa Sawit (IKS)		10.000.000.000
		9. PT. BIAU SAWITINDO ABADI	PMDN	Kelabau Kelapa, Sempit, Kecamatan Lela	Kelapa Sawit	441.074.941.000	10.000.000.000
		10. PT. KETUSA SAWIT MAKMUR	PMDN	Kelabau Kelapa, Kecamatan Lela	PERUSAHAAN KELAPA SAWIT	405.074.051.000	
		11. PT. KEDUA AGRO MAKMUR	PMDN	Kelabau Kelapa, Kecamatan Lela	Perkebunan Kelapa Sawit	407.074.051.000	
5	KEC. LETAMAN	12. PT. SETIA AGROINDO LAYA	PMDN	Desa Suka Rantan, Kecamatan Suka Rantan	Perkebunan Kelapa Sawit	210.000.000.000	10.000.000.000
		13. PT. OSCAR INVESTAMA	PMDN	Desa Suka Rantan, Kecamatan Suka Rantan	Perkebunan Kelapa Sawit	400.000.000.000	10.000.000.000
		14. PT. SUMATERA TIMUR INDONESIA	PMDN	Desa Suka Rantan, Kecamatan Suka Rantan	Perkebunan Kelapa Sawit	11.000.000.000	
		15. PT. PULAU SAMBU GUNTING	PMDN	Desa Pulau Sambu, Kecamatan Pulau Sambu	Kelapa Hibrida		11.000.000.000
6	Desa Mayang Sari Desa Sp. Karaman Desa Perjuru	16. PT. BIAU SAKTI TRANS MAMBA	PMDN	Desa Pulau Sambu, Kecamatan Pulau Sambu	Kelapa Hibrida	110.000.000.000	11.000.000.000
		17. PT. KARPA SAKTI ABADI	PMDN	Desa Pulau Sambu, Kecamatan Pulau Sambu	Kelapa Hibrida	110.000.000.000	11.000.000.000
		18. PT. BIANI SINERGI INDONESIA	PMDN	Desa Perjuru, Kecamatan Perjuru	Industri Tali	3.000.000.000	
7	KEC. T. PERAH dan ENOK	19. PT. KRISNA KERETA KENCANA	PMDN	Desa Perjuru, Kecamatan Perjuru	Kelapa Sawit	21.000.000.000	10.000.000.000
		20. PT. ISTIANA RATUS MIA	PMDN	Desa Perjuru, Kecamatan Perjuru	Perkebunan Kelapa Sawit	10.000.000.000	
		21. PT. PRIMA SAMBU KUALA ENOK	PMDN	Desa Perjuru, Kecamatan Perjuru	Konstruksi, Perdagangan, Jasa	7.000.000.000	
		22. PT. PULAU SAMBU KALINOR	PMDN	Desa Perjuru, Kecamatan Perjuru	Perkebunan Kelapa Sawit		10.000.000.000
8	KEC. RITEN	23. PT. KERTAS KENCANA	PMDN	Desa Perjuru, Kecamatan Perjuru	Perkebunan Kelapa Sawit	75.000.000.000	
		24. PT. GUNGGAL SABAH	PMDN	Desa Perjuru, Kecamatan Perjuru	Perkebunan Kelapa Sawit	9.000.000.000.000	
9	Desa Pulau Kiang KEC. SUNGAI BATANG	25. PT. KRISNA MUSTIKA KENCANA	PMDN	Desa Perjuru, Kecamatan Perjuru	Perkebunan Kelapa Sawit	74.000.000.000	
		26. PT. ANUGERAH REZEKI VIKEM	PMDN	Desa Perjuru, Kecamatan Perjuru	Perkebunan Kelapa Sawit	271.400.000.000	9.770.000.000
		27. PT. INDRAGIRI BAKTI	PMDN	Desa Perjuru, Kecamatan Perjuru	Perkebunan Kelapa Sawit	1.000.000.000.000	
10	Desa Pesangrahan KEC. KEMUNING	28. PT. INDRAMANG LESTARI	PMDN	Desa Perjuru, Kecamatan Perjuru	Industri Minyak Makan Kelapa		
		29. PT. PUTERA KERITANG SAWIT	PMDN	Desa Keritang, Kecamatan Kemuning	Perkebunan dan Pengolahan		
11	Desa Kerandang Desa Tuk Jirun Desa Batu Ampar	30. PT. AGROINDUSTRI BERKATINDO	PMDN	Desa Tuk Jirun, Kecamatan Kemuning	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit	75.000.000.000	75.000.000.000
		31. PT. BUN KUMITA MUTIARA	PMDN	Perkebunan Sudirman Raya P. Baru	PEL		
		32. PT. BARA BATU AMPAR PRIMA PRATAMA	PMDN	Kec. Kemuning	Batu bara		
		33. PT. KERITANG BUANA MINING	PMDN		Pertambangan batu bara		
		34. PT. KEMUNING TAMBANG SENTOSA	PMDN		Pertambangan batu bara		
		35. PT. BARA MITRA SEJAHTERA	PMDN		Pertambangan batu bara		
36. PT. KUALA TAMBINDO BUMI SAKTI	PMDN		Pertambangan batu bara				

No	Nama	PT	Alamat	Produk	Volume	Volume		
Desa Selaman	37	PT MELATI GUNA LESTARI ABADI	PMON	Desa Selaman Kecamatan Selaman	Minyak Kelapa Sawit (PKS)	50.000.000,000	42.571.617,880	
	38	PT. ROMAN SOHAN PALM INDONESIA	PMON	Gd. Duta Sungsang Tiga, Pekanbaru	Minyak Kelapa Sawit	180.000.000,000		
	39	PT. BINTANG ALAM BAYU	PMON	Jaya Tiga Pagar, Lempit Sarayan	Crude Palm Oil (CPO) Industri Minyak Kelapa Sawit	10.000.000,000		
	40	PT. EMASANTIK ALAMANTAN	PMON	K. Duta Sungsang dan Perkebunan	Kelapa Sawit	11.000.000,000		
Desa Lumbaga / Bt. Tuaja	41	PT. BATA PRIMA MATAMBA	PMON	Desa Lumbaga	Kelapa Sawit			
	42	PT. MULTI ANUNIRAN KATA ABADI	PMON	Grupok Jember Utara	Kelapa Perkebunan Kelapa Sawit	110.400.000,000	4.523.341,530	
Desa Rumbia / Bt. Urah	43	PT. HANI LINDUNGAN SAKTI NISAH	PMON	Grupok Jember Utara	Kelapa Perkebunan dan Kelapa Sawit	80.100.000,000	11.078.461,120	
Desa Congcong / Bt. Ponda	44	PT. INDOGRIJES JAYA ABADI	PMON	Grupok Surya Duta, Pekanbaru	Perkebunan Kelapa Sawit	200.800.000,000	144.884.638,620	
Desa Gaung / Bt. Gas	45	PT. BUNDA OKOH SAKTI SUBUK	PMON	Grupok Jember Utara	Kelapa Perkebunan Kelapa Sawit	110.400.000,000	1.041.175,000	
Desa Saung		46	PT. BUNDA OKOH SAKTI SUBUK	PMON	Grupok Jember Utara	Perkebunan Kelapa Sawit		
		47	PT. SETIA ALINDO LESTARI	PMON	Grupok Surya Duta, Pekanbaru	Perkebunan Kelapa Sawit	200.400.000,000	6.421.274,280
		48	PT. CITRA PALMA KENDARA	PMON	Grupok Surya Duta, Pekanbaru	Perkebunan Kelapa Sawit	110.500.000,000	18.996.518,250
Desa Pungat / Bt. Tori	49	PT. BINA DUTA LANSANA BINA	PMON	Desa Pungat	Perkebunan Kelapa Sawit			
	50	PT. BENG LAM	PMON	Selat Panjang	Industri Kelapa Sawit	1.700.000,000		
Desa Batang Tuaka	51	PT. BINA KUNALA INDONESIA	PMON	Grupok Jember Utara	Perkebunan Kelapa Sawit	10.000.000,000	1.898.360,000	
Desa Gas dan Bt. Tuaja	52	PT. BEKAT SAKTI SEHANTERA	PMON	Jln. Jln. Jember, Gambir	Perkebunan Kelapa Sawit	5.950.000,000	286.475.674,620	
Desa Senayang		53	PT. BINA PARI	PMON	Desa Senayang Bt. Kamban	Perkebunan Kelapa Sawit		
		54	PT. KATA SAKTI ABADI	PMON	Tempung Kamban Bt. Kamban	Perkebunan Kelapa Sawit	110.000.000,000	
Desa Tempuling / Bt. Tuaka	55	PT. SETIA ALINDO MANGRI	PMON	Grupok Surya Duta, Pekanbaru	Perkebunan Kelapa Sawit	101.400.000,000	171.286.712,410	
	Desa Tera, Mumpu	56	PT. PERMASA ALINDO LEMBAGA	PMON	Permasa Kedondong, Kerteh Jln. Jln. Kamban	Perkebunan Kelapa Sawit	30.120.154,860	
		Desa Tempung	57	PT. LEMBAR SEPAKANA PMON	PMON			
Desa Kemapas	58	PT. INDRAMURI AGRO LESTARI	PMON	Jln. Jln. Sungsang Tiga, Pekanbaru	Industri Kelapa Sawit	1.000.000,000		
	Desa Sungai Gantang	59	PT. AGRO SURABAYA INDONESIA	PMON	Jln. Jln. Sungsang Tiga, Pekanbaru	PKS	1.821.130.299,100	
		60	PT. BINA SAMUDRA KELAPA	PMON	Jln. Jln. Sungsang Tiga, Pekanbaru	PKS	70.000.000,000	790.601.000,000
		61	PT. INDRAMURI AGRO LESTARI	PMON	Kampung Gedung Indah, Jakarta Utara	PKS, Unit Pakan	80.114.000,000	
		62	PT. ALAM SURIK SEHANTERA	PMON	Jln. Jln. Sungsang Tiga, Pekanbaru	Perkebunan Kelapa Sawit	637.125,000	12.637.125,000
Harapan Tani / Bt. Pagan Tiga	63	PT. CITRA ANDHA	PMON	Jln. Jln. Sungsang Tiga, Pekanbaru	Industri Kelapa Sawit	790.601.000,000		
	64	PT. KHARISMA DHARMA ENERGI	PMON	Jln. Jln. Sungsang Tiga, Pekanbaru	PKS	36.000.000,000	1.900.000,000	
	65	PT. KHARISMA DHARMA ENERGI	PMON	Jln. Terengganu, Pekanbaru	Konsumsi, Perkebunan Kelapa Sawit	5.050.000.000,000		
Desa Jaya	66	PT. GUSLANI PERMATA HATI	PMON	Desa Jaya	Tanah Tambun			
	67	PT. SUNBER KENCANA	PMON	Desa Jaya	Tanah Tambun			
	68	PT. PUNAMA BULBUNG	PMON	Desa Jaya	Docking			
	69	PT. DEU MUDA PERASA	PMON	Desa Jaya	Industri Minyak Makan dan Lemak	80.422.036,000	28.749.330.740	
Desa Jaya	70	PT. WILAHAN NABATI INDONESIA	PMA	Kabupaten Indragiri Hilir	Industri Minyak Makan dan Lemak	1.871.230.288,177	1.136.520.170.120	
	71	PT. BAYAS BIOPULS	PMA	Kel. Bayas Jaya Kel. Kempos	Industri Minyak Makan dan Lemak			
	72	PT. JUMATERA RIANG LESTARI	PMON		HTI			
Desa Jaya	73	PT. BUNDA OKOH SAKTI SUBUK	PMON	Desa Bayas Jaya Kel. Duta	PKS			
	74	PT. YUNANI GEMBARA	PMON	T. Batu Kertuh, Kab. Tambora	Perkebunan Kelapa Sawit	1.750.000.000,000		



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 KAMPUS 1
 JALAN KH. SAMUDRA RANGKAP
 SURABAYA 60132

Lampiran Terkait APBD 2017



BUPATI INDRAGIRI HILIR
KABUPATEN RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar kepada masyarakat serta tetap berjalannya roda pemerintahan dan pembangunan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13).



MEMUTUSKAN :

Mencantumkan: PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017



Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
6. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Non PNS yang ditunjuk dan/atau diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
7. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah.

Pasal 2

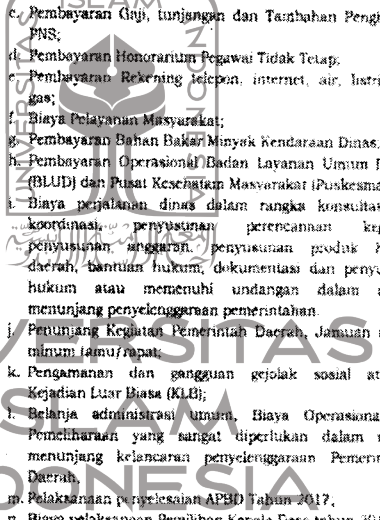
- (1) Maksud peraturan ini adalah sebagai landasan dalam penganggaran dan pelaksanaan untuk mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

(2) Tujuan peraturan ini adalah untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar kepada masyarakat serta tetap berjalannya roda pemerintahan dan pembangunan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pasal 3

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2017, dipergunakan setinggi-tingginya angka APBD tahun anggaran 2016 sebagai dasar dalam melaksanakan pengeluaran Daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kebutuhan belanja Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Pembayaran Gaji, Tunjangan dan biaya operasional Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

- 
- c. Pembayaran Gaji, tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS;
 - d. Pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap;
 - e. Pembayaran Rekening telepon, internet, air, listrik dan gas;
 - f. Biaya Pelayanan Masyarakat;
 - g. Pembayaran Bahan Bakar Minyak kendaraan Dinas;
 - h. Pembayaran Operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas);
 - i. Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi, penyusunan perencanaan kegiatan, penyusunan anggaran, penyusunan produk hukum daerah, bantuan hukum, dokumentasi dan penyuluhan hukum atau memenuhi undangan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan;
 - j. Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah, Jamuan makan minum jamu/rapat;
 - k. Pengamanan dan gangguan gejalok sosial ataupun Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - l. Belanja administrasi umum, Biaya Operasional dan Pemeliharaan yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - m. Pelaksanaan penyelesaian APBD Tahun 2017;
 - n. Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2017.

Pasal 4

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari Anggaran Belanja Perangkat Daerah Tahun

Anggaran 2016.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pembayaran harus memenuhi:

- a. Ketentuan yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa;
- b. Ketentuan yang mengatur perpajakan;
- c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung pengeluaran, atau
- d. Ketentuan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 6

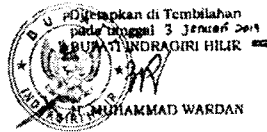
Pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila:

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- b. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.



Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

H SAÏD SYARIFUDDIN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TAHUN AKADEMIK 2016/2017



Nama Mahasiswa/NIM : Salmia / 15913192
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Tempat / Tanggal lahir : Benteng, 20 Juni 1994
Jenis Kelamin : ~~Laki-laki~~ / Perempuan *)
Alamat Tinggal : Jalan Serai Rt. 005/002, Kelurahan Benteng,
Kecamatan Sungai Batang, Kab. Indragiri Hilir, Riau.
Nomor Telepon/HP : 085271576902
Email/Facebook : Salmiamiss@gmail.com/ Mia.sa
Kesehatan : Baik
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tinggi Badan / Berat : 156 Cm/ 52Kg
Status Perkawinan : ~~Kawin~~ / Belum Kawin / Janda / Duda *)
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia
Tanggal Masuk UII : 12 Maret 2016
Tahun Tamat UII : 2017
Pembimbing Tesis I : Dr. Yusdani, M.Ag
Penguji Tesis I/II : - / -
Angkatan : 2016
Biaya Kuliah : ~~Beasiswa~~ / Orang Tua / Sendiri / ~~Lain-lain~~ *)
Jalur Masuk : ~~Ujian Seleksi~~ / Tanpa Ujian Seleksi *)

Asal SD : SDN 09 Benteng, Provinsi Riau
Asal SMP : SMPN 1 Reteh, Provinsi Riau
Asal SMA : MAN 039 Tembilahan, Provinsi Riau
Asal SI : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Provinsi DIY
Prodi SI : Muammalah, Ekonomi dan Perbankan Islam
Jurusan : Ekonomi dan Perbankan Islam
Kesan/Saran Untuk Jurusan : Senang bisa menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Islam Indonesia, semoga semua lulusannya bisa menjadi penyebar benih-benih kebaikan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi
YOGYAKARTA

2017